

Analisis PARIWISATA

ISSN 1410 - 3729

DIPUBLIKASIKAN OLEH

FAKULTAS PARIWISATA UNIVERSITAS UDAYANA

Analisis Pariwisata terbit sebagai media komunikasi dan informasi ilmiah kepariwisataan, yang memuat tentang hasil ringkasan penelitian, survei dan tulisan ilmiah populer kepariwisataan. Redaksi menerima sumbangan tulisan para ahli, staf pengajar perguruan tinggi, praktisi, mahasiswa yang peduli terhadap pengembangan pariwisata. Redaksi dapat menyingkat atau memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

SUSUNAN PENGURUS JURNAL ANALISIS PARIWISATA

Penanggung Jawab

Drs. I Putu Anom, M.Par. (Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana)

Penasehat

Dra. Ida Ayu Suryasih, M.Par. (Pembantu Dekan I Fakultas Pariwisata Universitas Udayana)
Dra. Ni Made Oka Karini, M.Par. (Pembantu Dekan II Fakultas Pariwisata Universitas Udayana)
I Nyoman Sudiarta, SE., M.Par. (Pembantu Dekan III Fakultas Pariwisata Universitas Udayana)

Ketua Dewan Penyunting

Drs. Ida Bagus Ketut Astina, M.Si.

Penyunting Ahli (Mitra Bestari)

- Prof. Adnyana Manuaba, M.Hons.F.Erg.S.FIPS,SF. Universitas Udayana
- Prof. Dr. I Wayan Ardika, MA. Universitas Udayana
- Prof. Dr. Michael Hichcoch University of North London
- Prof. Dae-Sik Je, M.Pd. Young San University - Korsel.
- Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, M.Arch. Ph.D. Universitas Gajah Mada
- Prof. Dr. Ir. I Gede Pitana, M.Sc. Universitas Udayana
- Prof. Dr. I Made Sukarsa, SE., MS. Universitas Udayana
- Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH., MS. Universitas Udayana
- Dr. Hans-Henje Hild SES Bonn - Germany

Penyunting Pelaksana

- I Wayan Suardana, SST.Par., M.Par.
- IGA. Oka Mahagangga, S.Sos., M.Si.
- I Made Kusuma Negara, SE., M.Par.
- Made Sukana, SST.Par., M.Par., MBA.
- I Nyoman Sukma Arida, S.Si., M.Si.
- Yayu Indrawati, SS., M.Par.
- I Gde Indra Bhaskara, SST.Par., M.Sc.
- I Gst. Bagus Sasrawan Mananda, SST.Par.

Tata Usaha dan Pemasaran

- I Wayan Darma Santosa, SE.
- I Gusti Putu Setiawan, SH.
- I Wayan Sudarma, SH.
- Luh Yuni Artini

ALAMAT PENYUNTING DAN TATA USAHA

Fakultas Pariwisata Universitas Udayana
Jl. Dr. R. Goris 7 Denpasar Bali, Telp/Fax : 0361-223798
E-mail : analisispariwisata@unud.ac.id

PENGANTAR REDAKSI ANALISIS PARIWISATA

Jurnal Analisis Pariwisata Volume 13, Nomor 1, Tahun 2013 sebagai suatu upaya publikasi temuan dari hasil penelitian terbaru bidang kepariwisataan. Pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk kembali mengingatkan bahwa pariwisata senantiasa dinamis namun tetap harus dipelajari dan dimaknai proses dari perjalanan kepariwisataan tersebut. Begitu banyak "pilihan-pilihan" justru mengharuskan para pemegang kebijakan dan para praktisi semakin bijaksana dan tidak hanya "*taken for granted*" tanpa memilah dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Beberapa tulisan ilmiah yang ditampilkan kali ini diharapkan mampu memenuhi dahaga para akademisi, mahasiswa dan *stakeholders* pariwisata yang hingga saat ini masih sulit mendapatkan literatur-literatur ilmiah bidang kepariwisataan di Indonesia. Besar harapan tim redaksi agar kedepannya segenap pihak yang terjun di sektor primadona ini dapat menyumbangkan banyak sumbangan pemikiran, kritik, saran dan masukan dalam tulisan ilmiah melalui Jurnal Analisis Pariwisata, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.

Denpasar, Juli 2013

Redaksi

PERSYARATAN NASKAH UNTUK ANALISIS PARIWISATA

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian pustaka yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris (abstrak bahasa Inggris). Abstrak tidak lebih dari 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (keywords). Naskah berupa ketikan asli dan CD dengan jumlah maksimal 15 halaman ketikan A4 spasi 1½, kecuali abstrak, tabel dan kepastakaan.
3. Naskah ditulis dengan batas 2,5 cm dari kiri dan 2 cm dari tepi kanan, bawah dan atas.
4. Judul singkat, jelas dan informatif serta ditulis dengan huruf besar. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul.
5. Nama penulis tanpa gelar akademik, alamat e-mail dan asal instansi penulis ditulis lengkap.
6. Naskah hasil penelitian terdiri atau judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka dan metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran serta kepastakaan.
7. Naskah kajian pustaka terdiri atas judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, masalah, pembahasan, simpulan dan saran serta kepastakaan.
8. Tabel, grafik, histogram, sketsa dan gambar harus diberi judul serta keterangan yang jelas.
9. Dalam mengutip pendapat orang lain, dipakai sistem nama penulis dan tahun. Contoh : Astina (1999); Suwena *et al.* (2001).
10. Kepustakaan memakai "harvard style" disusun menurut abjad nama penulis tanpa nomer urut.
 - a. Untuk buku : nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit, judul, jilid, edisi, tempat terbit dan nama penerbit.

Picard, Michael. 1996. *Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapore: Archipelago Press.
 - b. Karangan dalam buku : nama pokok dari inisial pengarang, tahun terbit, judul karangan, inisial dan nama editor : judul buku, hal permulaan dan akhir karangan, tempat terbitan dan nama penerbit.

McKean, Philip Frick. 1978. "Towards as Theoretical analysis of Tourism: Economic Dualism and Cultural Involution in Bali". Dalam Valena L. Smith (ed). *Host and Guests: The Antropology of Tourism*. Philadelphia : University of Penvsylvania Press.
 - c. Untuk artikel dalam jurnal: nama pokok dan inisial pengarang, tahun, judul karangan, singkatan nama majalah, jilid (nomor), halaman permulaan dan akhir.

Pitana, I Gde. 1998. "Global Proces and Struggle for Identity: A Note on Cultural Tourism in Bali, Indonesia" *Journal of Island Studies*, vol. 1, no. 1, pp. 117-126.
 - d. Untuk Artikel dalam format elektronik : Nama pokok dan inisial, tahun, judul, waktu, alamat situs.

Hudson, P. (1998, September 16 - last update), "PM, Costello liars: former bank chief", (*The Age*), Available: <http://www.theage.com.au/daily/980916/news/news2.html> (Accessed: 1998, September 16).
11. Dalam tata nama (nomenklatur) dan tata istilah, penulis harus mengikuti cara penulisan yang baku untuk masing-masing bidang ilmu.
12. Dalam hal diperlukan ucapan terima kasih, supaya ditulis di bagian akhir naskah dengan menyebutkan secara lengkap : nama, gelar dan penerima ucapan.

Analisis PARIWISATA

ISSN 1410 - 3729

DAFTAR ISI

- FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI PEREMPUAN SEBAGAI PENGELOLA PONDOK WISATA DI KELURAHAN UBUD, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR _____ (1 - 10)**
Anak Agung Putri Sri
- STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA EKOLOGIS DI DESA BELIMBING, KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN ____ (11 - 31)**
I Putu Sudana
- USAHA PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA BERABAN DALAM PENGELOLAAN TANAH LOT SECARA BERKELANJUTAN _____ (32 - 44)**
Luh Gede Leli Kusuma Dewi
- KOMODIFIKASI INFORMASI PARIWISATA BUDAYA FUNGSI DAN MAKNA UPACARA MEMASUKI USIA DEWASA DI JEPANG DAN BALI : PERSPEKTIF LINTAS BUDAYA _____ (45 - 57)**
I Made Sendra
- STUDI TENTANG ARAH PERUBAHAN SUBAK MUWA SEBAGAI AKIBAT PERKEMBANGAN SARANA KEPARIWISATAAN DI KELURAHAN UBUD-GIANYAR _____ (58 - 72)**
I Ketut Suwena, I Gusti Ngurah Widyatmaja
- WISATAWAN KURANG MINAT KE HUTAN BAMBUI SEBAGAI ATRAKSI EKOWISATA DI DESA PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI _____ (73 - 85)**
I Nyoman Jamin Ariana
- SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI MODAL PERANGKAT INFRASTRUKTUR SDM MENGHADAPI PASAR GLOBAL _____ (86 - 96)**
Yohanes Kristianto
- KEAMANAN DAN KENYAMANAN WISATAWAN DI BALI (Kajian Awal Kriminalitas Pariwisata) _____ (97 - 105)**
I Gusti Agung Oka Mahagangga, I Made Bayu Ariwangsa, I Gst. Ayu Athina Wulandari
- PENGELOLAAN POTENSI EKOWISATA DI DESA CAU BELAYU KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN _____ (106 - 111)**
Ida Bagus Suryawan
- POTENSI KEPARIWISATAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi Kasus di Kawasan Pariwisata Komodo) _____ (112 - 118)**
I Putu Anom

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMOTIVASI PEREMPUAN SEBAGAI PENGELOLA PONDOK WISATA DI KELURAHAN UBUD, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR

Anak Agung Putri Sri
aaputrisri@yahoo.com
Dosen Fakultas Pariwisata Unud

Abstrak

Artikel ini mengungkapkan motivasi perempuan sebagai pengelola pondok wisata, dengan landasan teori fungsional structural dan motivasi. Adapun motivasi perempuan sebagai pengelola pondok wisata untuk mengaktualisasi diri guna meningkatkan ekonomi keluarga. Selain untuk meningkatkan ekonomi demi kesejahteraan keluarga, tetapi juga didasarkan atas pertimbangan faktor budaya, sistem sosial, kemajuan teknologi, pendidikan, dan faktor lingkungan. Meskipun kegiatan perempuan mampu memberikan sumbangan ekonomi yang cukup besar terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, namun dalam kenyataan belum mampu mengurangi beban kerja perempuan di sektor domestik serta memberikan hak yang setara dengan laki-laki dalam membuat keputusan, hal ini terganjal oleh adat patrilineal yang berakar pada agama Hindu

Kata Kunci : Motivasi, Perempuan, dan Pondok Wisata

I. PENDAHULUAN

Bali merupakan primadona salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang mendatangkan wisatawan. Pulau Bali terkenal di mancanegara dan nusantara, sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan asing maupun nusantara. Hal ini karena daya tarik Bali yang memukau wisatawan baik karena budaya, adat istiadat, kesenian yang beraneka ragam serta keindahan alam yang mempesona, sehingga Bali dijuluki *The Last Paradise*. Untuk itulah pembangunan kepariwisataan yang dikembangkan adalah pariwisata budaya yang bersumber pada agama Hindu seperti yang tertuang dalam perda No. 3 tahun 1991.

Tujuan wisatawan yang berkunjung ke Bali sangat bervariasi. Mereka ada yang datang untuk berlibur, bisnis, dan *MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition)*. Dalam melakukan kunjungan para wisatawan memerlukan sarana dan prasarana kepariwisataan di antaranya: sarana transportasi, akomodasi, dan restoran (Yoeti, 2001). Perkembangan bisnis akomodasi selain hotel dikenal juga sarana akomodasi lainnya seperti: hotel melati, pondok wisata, *homestay*, graha wisata remaja (*youth hostel*) dan bumi perkemahan (*camping site*).

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dewasa ini dipandang sebagai pertanda peralihan dari status perempuan sebagai pekerja keluarga, menjadi pekerja upahan dengan status sebagai penerima yang mandiri (Hardyastuti, 1994:1-2). Selanjutnya beban perempuan akan bertambah nyata manakala mereka juga bekerja mencari nafkah untuk berbagai alasan di antaranya alasan ekonomi keluarga. Ini

membawa konsekuensi terhadap peranan perempuan semakin majemuk atau ganda. Ayami Nakatani (2004) mengatakan perempuan Bali *wonderwomen*. Kalau di Barat peran ganda perempuan sering menjadi persoalan, maka perempuan Bali tidak hanya menjalankan dua peran, tetapi sekaligus tiga peran, yakni peran domestik (rumah tangga), peran ekonomi (mencari nafkah), dan peran sosial (adat).

Perkembangan pariwisata membuka kesempatan bagi perempuan untuk menempati berbagai profesi, dapat dilihat dari keberadaan tenaga kerja perempuan dalam berbagai segmen industri pariwisata di antaranya: *public relation, sales and marketing, house keeping, front office, ticketing*, pramusaji, dan pramugari. Hal ini karena perempuan dipandang lebih telaten, rapi, hati-hati dan efisien dalam melakukan pekerjaan (Pendit, 2001). Dengan bervariasi usaha jasa pariwisata, tentulah memberi kesempatan kepada perempuan untuk bekerja dengan sistem penggal/paruh waktu serta usaha yang dilakukan lebih banyak mendekati sektor informasi (Utarini, 1995).

Gerak dan dinamika masyarakat membawa kecenderungan untuk mengemukakan banyak permasalahan yang dihadapi, termasuk di dalamnya perempuan. Perempuan memiliki masalah yang integral di masyarakat, sehingga banyak mendapat sorotan dan penanganan dari pemerintah. Hal ini berarti telah adanya kesadaran akan peran dan andil perempuan pada pembangunan karena kemajuan perempuan pada hakikatnya berarti pula kemajuan suatu negara (Swarsi, dkk., 2002:1).

Terjadinya pergeseran dari struktur perekonomian yang terfokus pada pertanian menjadi terfokus pada perekonomian industri. Pergeseran ini membawa akibat pada peran kaum perempuan. ditambah lagi dengan globalisasi perekonomian dunia (perdagangan bebas 2020), menyebabkan persaingan dalam pasar tenaga kerja (kemungkinan masuknya tenaga kerja asing perempuan) dalam negeri terutama di sektor modern menjadi tinggi. Oleh sebab itu gambaran mengenai peran tenaga perempuan menjadi penting diamati sebagai upaya mengantisipasi perkembangan di sektor modern.

Berdasarkan uraian tersebut maka kajian ini akan mencoba menelaah tentang "Apa Faktor-faktor yang Memotivasi perempuan sebagai Pengelola Pondok Wisata di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar", merupakan salah satu permasalahan yang dianggap cukup menarik dan relevan untuk dikaji.

II. PEMBAHASAN

Modernisasi telah memberikan peluang agar partisipasi perempuan di berbagai bidang yang secara tradisional dianggap hanya milik laki-laki seperti kegiatan ilmiah, seni, dan profesi. Sekarang banyak keluarga di Indonesia sudah merupakan *two earner families* dan di masa depan diperkirakan jumlahnya akan meningkat lagi. Hal ini berarti bahwa banyak perempuan/isteri akan berperan ganda, dan jika ini tidak diikuti peran ganda laki-laki/suami, maka wanita akan menjadi *overloaded* atau dituntut menjadi *superwomen*.

Selain itu, alasan tentang perempuan meningkat bekerja, karena ingin keluar dari rutinitas domestik, mengembangkan diri dengan bekerja di sektor publik agar memiliki uang sendiri, sehingga mereka bisa mengambil keputusan sendiri dalam menggunakan uang tanpa harus minta persetujuan atau *berembug* dengan suami (Suratiyah, 1997:230). Demikian juga dengan pendapat Agassi (1991:323) menyatakan bahwa keseimbangan status perempuan dalam rumah tangga baru bisa terwujud jika

ada kekuatan yang sama di antara suami-istri dalam bidang ekonomi dan kontrol terhadap sumber-sumber yang vital.

Idiologi patriarki syarat dengan keuntungan yang hanya berpihak kepada kaum laki-laki dan selalu menganggap kaum perempuan itu rendah serta mudah untuk dikuasai (Bhasin, 1996:11). Dengan berpartisipasi perempuan di sektor publik, mereka dapat membebaskan diri dari kondisi yang selama ini menghantui bahwa kelak mereka dapat dihargai oleh suami dan keluarganya (perubahan konstruksi budaya). Motivasi perempuan sebagai Pengelola Pondok Wisata dikaji dengan teori fungsional struktural seperti berikut.

2.1 Teori Struktural Fungsional

Menurut Koentjaraningrat (1987); Kaplan (2000); Pelly (1994); Soekanto (1986); Sanderson (1993); Horton (1999), adapun ciri pokok dari struktural fungsional struktural adalah gagasan tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat (*societal needs*). Para fungsionalis percaya bahwa masyarakat sangat serupa dengan organisme biologis, karena mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan keberadaannya atau setidaknya dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya Nasikun (1995) mengatakan bahwa masing-masing bagian dari sistem yang saling terkait akan secara terus menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni. Teori ini dapat mengungkapkan tentang pemilahan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat seperti sekarang ini.

Parsons mengatakan aliran struktural fungsional selalu menekankan unsur stabilitas, integrasi, fungsi koordinasi, dan konsensus. Asumsinya, 1). Setiap masyarakat struktur unsur-unsurnya relatif stabil, 2). Setiap masyarakat tersusun atas unsur-unsur yang terintegrasi secara baik, 3). Setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi, yakni memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan keutuhan sistemnya, dan 4). Setiap fungsi struktur sosial didasarkan atas konsensus terhadap nilai-nilai di antara anggota-anggotanya. (Soekanto, 1986; Pelly, 1994; Soeprapto, 2002).

Pandangan Parson tentang teori struktural fungsional hanya menjelaskan masyarakat sebagai suatu sistem dan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain serta hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut berfungsi ganda dan timbalbalik. Parsons tidak menjelaskan hubungan yang terjadi dalam pembangunan pariwisata. Untuk itu, maka perlu dikemukakan pandangan Natori (2001:6) tentang pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang menyebutkan bahwa hubungan yang harmoni antara masyarakat lokal, sumberdaya, dan wisatawan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan.

Dari pandangan teori struktural fungsional digunakan untuk mengkaji perempuan yang berkecimpung sebagai pengelola pondok wisata di Kelurahan Ubud. perempuan pengelola pondok wisata sebagai bagian dari suatu sistem sosial (keluarga dan masyarakat) dituntut agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara baik sehingga keutuhan sistem sosialnya tetap terpelihara. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dari teori fungsional struktural dilengkapi dengan teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow, dkk., sangat tepat dipergunakan untuk menggambarkan peran perempuan di Desa Ubud yang berkecimpung sebagai pengelola pondok wisata.

Abraham Maslow adalah ahli jiwa (psikologis) mengembangkan teori motivasi yang dikenal dengan hirarki daripada kebutuhan (*The hierarchy of needs*). Ia melihat kebutuhan manusia itu diatur dalam bentuk yang bertingkat-tingkat (hirarki), yaitu

dimulai dari kebutuhan yang rendah sampai kepada kebutuhan tertinggi. Apabila kebutuhan yang rendah telah terpenuhi, maka menyusul kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Kebutuhan pokok manusia menurut Maslow sesuai dengan tingkat-tingkatannya (hirarkhi) yang penting adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan fisik (*Physiological need*), yaitu kebutuhan pokok untuk memelihara kelangsungan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan.
2. Kebutuhan memperoleh keamanan atau keselamatan (*security or safety need*), yaitu kebutuhan yang bebas dari bahaya, ketakutan, ancaman kehilangan pekerjaan, miliknya, pakaian atau perumahan.
3. Kebutuhan bermasyarakat (*social need*), atau kebutuhan untuk menerima/bekerjasama dalam kelompok (*affiliation or acceptance need*), yaitu kebutuhan untuk berkelompok dan bermasyarakat. Manusia suka berkelompok bersama-sama untuk maksud-maksud kehidupan yang beraneka ragam. Mereka memerlukan bergaul, termasuk di dalamnya untuk menerima dan diterima menjadi anggota kelompok, untuk mencintai dan dicintai.
4. Kebutuhan untuk memperoleh kehormatan (*Esteem need*), yaitu kebutuhan memperoleh reputasi/kemasyuran, terhormat dan dihormati. Mereka membutuhkan pujian, penghargaan dan pengakuan atas kedudukannya (status)
5. Kebutuhan untuk memperoleh kebanggaan (*Self actualization need*), yaitu kebutuhan untuk membuktikan dirinya sebagai seorang yang mampu mengembangkan potensi bakatnya, sehingga mempunyai prestasi yang dapat dibanggakan. Menurut Maslow kebutuhan yang terakhir ini adalah kebutuhan manusia yang tertinggi menurut hirarkhi. Selain itu juga menggunakan teori motivasi Kartono dan Clayton Alderfer.

2.2 Faktor-faktor yang Memotivasi Perempuan sebagai Pengelola Pondok Wisata

Berdasarkan penelitian terhadap perempuan Pengelola pondok wisata di Daerah Ubud, dapat dikemukakan bahwa alasan atau motivasi mereka menekuni profesi ini sebagai berikut.

2.2.1 Untuk Aktualisasi Diri

Motivasi wanita sebagai pengelola pondok wisata dikaitkan dengan pendapat (Fromm, 1996, dalam Bawa, 2004), terkait dengan suatu harapan, yakni harapan kehidupan yang lebih baik, harapan memiliki apa yang dinilai lebih bermakna bagi kehidupannya. Selain itu, adanya harapan terbebas dari kejenuhan seperti ingin mengembangkan dan mengaplikasikan diri sesuai kemampuan atau spesialisasi, ingin meningkatkan pendapatan keluarga, juga untuk mengatasi ketimpangan status sehingga dalam keluarga ia tidak dipandang rendah. Perempuan atau istri yang gagal beradaptasi, apalagi malas bekerja, maka mertuanya sering berujar, "*Nyeret teken tingsang-tingsang dogen nyai dini*" (Artadi, 1993:38; Bawa, 2004). Jika didekonstruksi tampak bahwa ucapan tersebut tidak saja terkait dengan kemalasan, tetapi bertalian pula dengan kemiskinan perempuan akan sumber daya ekonomi. Dalam sistem kekeluargaan patriarkat, anak laki-laki adalah ahli waris harta benda yang ditinggalkan orang tua maupun leluhurnya. Akibatnya, perempuan yang masuk ke dalam keluarga suami, tidak memiliki basis ekonomi sebagai sarana *bargaining power*, sehingga peluang mereka disubordinatkan oleh suaminya menjadi sangat besar (Sanderson, 1993 ; Bawa, 2004). Oleh karena itu perempuan, termotivasi bekerja untuk meningkatkan

status dalam keluarga. Ungkapan perempuan berkecimpung sebagai pengelola pondok wisata merupakan aktualisasi diri dapat disimak dari penuturan Ibu Cok :

"Saya sarjana peternakan pada waktu muda saya suka beternak ayam, babi, dan sapi, selain itu juga memasarkan. namun setelah menikah hobi beternak terhenti karena memiliki momongan, sehingga aktivitas publik terhambat oleh aktivitas domestik. Hal ini sangat membosankan karena saya lebih banyak beraktivitas seputar urusan domestik. Setelah putri saya berumur enam tahun saya meninggalkan hobi beternak, karena termotivasi berkecimpung dalam pengelolaan pondok wisata di samping tinggal di rumah untuk mengurus si kecil juga dapat berkarir, baik urusan domestik dan publik dapat dikerjakan dengan baik".

Perempuan bekerja untuk menghindari diri dari kejenuhan aktivitas domestik. Karena itu, manusia selalu menginginkan sesuatu yang berbeda daripada yang mereka alami agar kejenuhan dapat dinetralisasikan (Lury, 1998).

2.2.2 Perkembangan Teknologi

Teknologi terdiri dari informasi, peralatan, teknik, manusia beradaptasi dengan lingkungan fisiknya (Lenski, 1970, dalam Sanderson, 1993:60). Ia tidak hanya berisi peralatan atau objek yang bersifat fisik atau konkret, tetapi juga pengetahuan yang dapat diaplikasikan manusia dengan cara tertentu.

Ferkiss (dalam Mangunwijaya, 1985:10) mengatakan bahwa manusia, binatang, teknologi, dan perubahan teknologi faktor fundamental dalam evolusi manusia. Tetapi hanya manusialah perkakas dan kebudayaan merupakan faktor-faktor sentral dalam keberadaannya. Hanya manusia yang terlibat secara kultural, dalam arti dia secara sadar sanggup mengubah lingkungan alam maupun dandanan biologisnya sendiri.

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, idiologi gender telah diperkenalkan secara cepat lewat media massa. Selain intensitas dan frekuensi pertemuan antarbangsa yang disebabkan oleh adanya perjalanan dan perdagangan, misi pendidikan dan politik, misi budaya dan olahraga juga, mengalirnya produk-produk teknologi tingkat tinggi seperti: televisi, telekomunikasi, kamera, audio tech, internet, faks, dan telepon membuat akselerasi interaksi antarbangsa berlipat ganda. Produk ilmu pengetahuan dan teknologi canggih yang melahirkan: Sony, Mc. Donald's, Coca Cola, Honda, Nestle, Yves Saint Laurent, Christian Dior, dll. Adalah produk global yang telah menjadi benda lokal merupakan ciri khas kehidupan desa global (Purwasito, 2003:41).

Dengan globalisasi (perkembangan pariwisata) telah mengubah visi dunia manusia tentang makna kehidupan, persaudaraan, dan masa depan. Berkah penemuan teknologi telekomunikasi telah mempermudah orang untuk melakukan komunikasi baik lewat kabel yang menyebabkan komunikasi antarbangsa lebih cepat dan bersifat massal, maupun dengan adanya media televisi, internet semua kejadian dunia dapat diketahui dalam waktu yang singkat. Sedangkan penemuan teknologi transportasi seperti pesawat terbang mengakibatkan mobilitas manusia yang tinggi, berpindah atau mutasi dari satu negara ke negara lain dengan peningkatan baik frekuensi, volume maupun intensitasnya. Di samping itu dengan kemajuan teknologi produktivitas

semakin meningkat, konsumen mempunyai banyak pilihan untuk membeli barang kualitas yang tinggi dengan harga murah.

Semua jenis teknologi berkembang sendiri dengan kekuatan independennya. Perubahan-perubahan teknologi terjadi sebagai hasil kumulatif kekuatan inventif species manusia. Di samping itu dirasakan bahwa kapanpun bentuk teknologi baru muncul, secara otomatis mengadopsinya karena mereka menyaksikan manfaat yang diberikan.

Ester Boserup (Wilkinson, 1973; Sanderson, 1993:102), mengatakan bahwa orang ingin hidup dengan cara sederhana dan semudah mungkin. Kecenderungan mereka adalah memenuhi kebutuhan subsistensinya dengan bekerja sedikit mungkin. Karena menggunakan teknologi baru secara aktual mengakibatkan manusia bekerja lebih keras dan giat. Mereka tidak akan beralih ke metode baru tanpa kondisi khusus yang memaksa untuk melakukannya. Hal inilah yang memotivasi perempuan untuk ikut terlibat dalam industri pariwisata agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kelurahan Ubud merupakan daerah tujuan wisata yang dijuluki desa wisatawan (*vilage tourism*), karena Ubud sebagai daerah tujuan wisata dari berbagai bangsa di dunia baik dari mancanegara maupun nusantara dengan motivasi yang berbeda-beda. Kedatangan wisatawan ke Ubud di antaranya ada yang datang untuk liburan, bisnis, ataupun *MICE* (*meeting, incentive, conference, exhibition*). Dalam melakukan kunjungan para wisatawan memerlukan sarana dan prasarana kepariwisataan seperti sarana transportasi, akomodasi, restoran atau jasa penunjang lainnya. Inilah yang membuka kesempatan perempuan ikut aktif dalam pengelolaan pondok wisata, agar ia dapat memenuhi kebutuhan memiliki alat-alat teknologi modern untuk menanggulangi pekerjaan domestik. Perempuan mempunyai waktu luang untuk terlibat dalam dunia publik setelah memiliki teknologi modern karena pekerjaan domestik dapat dikerjakan dengan mudah dalam waktu relatif singkat.

Perempuan pengelola pondok wisata di Kelurahan Ubud rata-rata bisa mengatur diri dalam mengerjakan pekerjaan domestik dan publik. Hal ini karena bantuan dari alat-alat modern terutama berkaitan dengan kebutuhan perempuan dalam menjalankan peran reproduktifnya seperti: kulkas, mesin cuci, magic jar, dan lain-lain serta adanya program KB mendukung perempuan untuk memanfaatkan lebih banyak waktu dalam melaksanakan kegiatan produktif maupun reproduktif.

2.2.3 Faktor Ekonomi

Keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi termotivasi karena keinginan untuk meningkatkan pendapatan keluarga guna menciptakan keluarga yang sejahtera dengan pendidikan anak-anak yang sesuai dengan perkembangan globalisasi dengan tuntutan kebutuhan semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan (ITB, 1993: 47). Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh ibu Puspa :

"Saya terlibat dalam pengelolaan pondok wisata karena terdorong untuk mengaktualisasikan diri guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Puspawati dan suaminya sama-sama PNS dengan gaji yang terbatas tetapi kebutuhan di era globalisasi sangat kompleks tentu saja mereka susah memenuhi kebutuhan domestik maupun publik. Dengan terlibat dalam pengelolaan pondok wisata, maka masalah pendapatan bisa tertanggulangi. Dengan kata lain, peningkatan dimensi ekonomi akan diikuti dengan redistribusi kekuasaan".

Pernyataan Puspa menggambarkan bahwa kaum perempuan telah memiliki kekuatan untuk lebih berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Seperti yang dikemukakan oleh Batliwala (1994), bahwa struktur ekonomi berperan sangat penting dalam usaha mencapai kesetaraan dan keberdayaan. Dengan kata lain, peningkatan dimensi ekonomi akan diikuti dengan redistribusi kekuasaan (Sukardja, 1999:48).

2.2.4 Faktor Ekologi

Motivasi wisatawan untuk mengunjungi Kelurahan Ubud karena memiliki panorama alam yang indah, adat-istiadat, dan budaya yang unik beserta iklim atau cuaca, kesenian, sejarah, makanannya, keramahtamahan masyarakatnya, kemampuan dan kemudahan berjalan-jalan ke tempat tertentu (*accessibility*) (Spillane, 1994:64). Sehingga dari tahun ke tahun kedatangan wisatawan semakin meningkat yang membuka peluang munculnya variasi pekerjaan sebagai sumber nafkah. Inilah yang memotivasi perempuan mendirikan pondok wisata sekaligus sebagai pengelola, seperti yang dituturkan oleh ibu WK dan ibu Artini.

"Ibu WK dan Artini termotivasi mendirikan pondok wisata karena Ubud merupakan sentral pariwisata. Sekitar tahun 1980 jumlah penginapan masih terbatas, kebetulan salah seorang warga di sana yang berkecimpung dalam bidang jasa (guide) memerlukan penginapan untuk wisatawan, warga itu menitipkan wisatawan pada Artini. Karena wisatawan tertarik dengan keseharian dan aktivitas budaya yang dilakukan oleh orang Bali secara langsung dan wisatawan merasa betah tinggal di rumah Artini. Sehingga Artini semula hanya mengelola penyosohan beras dengan suami kemudian termotivasi untuk mendirikan penginapan. Artini dan keluarga sering berkomunikasi dengan wisatawan secara langsung sehingga mereka lancar berbahasa Inggris secara praktis. Dengan adanya permintaan dari wisatawan untuk pemondokan, maka Artini pada awalnya memanfaatkan rumah tinggal dari dua kamar sebagai modal awal penginapan. Setelah modal terkumpul baru mereka mendirikan pondok wisata dengan fasilitas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan. Dari 2 kamar berkembang menjadi 4 kamar, 8 kamar dan seterusnya mendirikan di tempat lain, namun yang diluar rumah tinggal diberikan dan sekaligus dikelola oleh anak-anaknya. Setiap anak sudah diberikan warisan agar tidak terjadi konflik kelak dikemudian hari. Dalam pendirian pondok wisata selalu berlandaskan falsafah Tri Hita Karana dan model bangunan meskipun bertingkat namun dipadukan dengan arsitektur Bali. Sehingga khas Balinya tetap menonjol".

Apa yang dikemukakan oleh Artini sesuai dengan ekologi. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 1997 dijelaskan "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan pada kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya". (Dikutip dari Bawa, 2002:19).

2.2.5 Faktor Struktur Sosial

Masyarakat Bali yang berlapis-lapis menurut kasta yang bersumber pada agama Hindu, adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, pada

mulanya merupakan sistem warna yang terdiri atas empat warna yaitu *Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra*. *Brahmana, Ksatria, dan Wesya* dikenal sebagai golongan *Tri Wangsa* dan yang keempat disebut golongan *Sudra wangsa*. Pada prinsipnya sistem warna merupakan sistem pelapisan yang tidak membedakan status antarlapisan, tetapi merupakan penggolongan berdasarkan atas fungsinya (Gede Puja & Rai Sudharta, 1977/1978, dalam Astiti, 1986).

Sistem kekerabatan patrilineal menempatkan laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi, sebaliknya perempuan ditempatkan pada kedudukan yang rendah dan tidak sebagai ahli waris.

2.2.6 Sistem Pembagian Kerja

Dalam era pembangunan ini keluarga dan pekerjaan mempunyai tempat yang penting baik dalam kehidupan laki-laki maupun perempuan, untuk berpartisipasi penuh di luar dan di dalam keluarga. Sehingga tercipta kehidupan yang harmoni dan hidup ini disikapi sangat bermakna.

Mereka mengungkapkan bahwa perbedaan seksual tidak membuat mereka berbeda, malahan mereka dapat memadukan ciri-ciri komitmennya terhadap keluarga dan terhadap pekerjaan sebagai pengelola pondok wisata. Ia dapat dukungan dari suaminya yang dapat memahami aspirasi isterinya terhadap karir dan ia tidak memisahkan dengan tajam antara peran suami dan isteri, sehubungan dengan urusan rumah tangga dan asuhan anak. Suaminya bukan orang yang kaku dan mau menentukan segala sesuatu sendiri, tetapi seorang yang responsif dan sensitif, ikut mempertimbangkan kebutuhan karir isteri dan bersedia berkompromi untuk memajukan usaha dan keluarga.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Suadini, bahwa perbedaan seksual tidak menjadi penghambat dalam pembagian pekerjaan. Suadini tidak melihat dengan memiliki keluarga akan menghambat karirnya, ia menerapkan pola asuh anak yang justru menunjang komitmennya terhadap pekerjaan, apalagi suami sangat mendukung meskipun ia seorang PNS, namun selalu setia membantu bila isterinya mengalami kesulitan.

2.2.7 Pendidikan

Pada zaman modern perempuan memiliki kesempatan untuk tampil sebagai: dokter, direktis perusahaan, pimpinan fakultas, pengemudi pesawat terbang, menjadi astronaut, dan sebagainya. Di sisi lain juga banyak perempuan yang berkecimpung dalam dunia bisnis di antaranya sebagai pengelola pondok wisata dan duduk dalam bidang legislatif. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Ari

"Saya berkecimpung dalam pengelolaan pondok wisata berawal dari banyak wisatawan yang berkunjung ke puri, melihat kehidupan puri secara langsung barangkali wisatawan sangat tertarik dengan aktivitas kehidupan yang dilakoni di puri atau pun di luar puri selanjutnya wisatawan menanyakan tempat menginap, karena saya orang puri tentu termotivasi memenuhi kebutuhan wisatawan untuk menginap dengan berbagai service yang harus dipenuhi. Saya bisa melakukan itu karena didukung oleh lingkungan, pendidikan, pengalaman setelah lama berkecimpung dalam bidang seni. Saya putri dari A. A. G. Mandra (almarhum) tokoh tari dan kerawitan yang terkenal di Peliatan Gianyar sering pentas di hadapan presiden RI I Presiden Soekarno, juga di berbagai tempat di

mancanegara. Dengan seringnya saya berkomunikasi dengan wisatawan maka termotivasi untuk membuat penginapan sekaligus sebagai pengelola. Meskipun kesibukan domestik, pengelola penginapan menyita banyak waktu tidak menyurutkan keinginan saya duduk sebagai anggota dewan di Gianyar mewakili IWAPI”.

Berdasarkan penjelasan Ibu Ari partisipasi perempuan untuk menuntut pendidikan semakin meningkat dari tahun ke tahun, membaiknya tingkat pendidikan kaum perempuan menyebabkan mereka merasa perlu memanfaatkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Perempuan dapat dikatakan mempunyai *multiperan*.

2.2.8 Nilai-nilai Agama

Berkembangnya pariwisata yang menyebabkan terbukanya cakrawala baru bagi perempuan. Guna menjawab berbagai tuntutan dan tantangan serta panggilan untuk mengisi kesempatan kerja yang luas telah dikaji melalui berbagai sumber dari berbagai aspek yang dilambangkan dengan kecakapan, keterampilan perempuan, sikap mental syarat untuk kondisi kerja, faktor sosiologi, dan lain-lain. Secara politis yuridis formal, kedudukan perempuan lebih bila dibandingkan dengan bangsa Asia lainnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari berbagai undang-undang, pelaksanaan GBHN. Kedudukan serta peran perempuan cukup kuat, seperti halnya secara tradisional di Bali, secara normatif sangat dihormati. Hal ini dapat dibuktikan pada kitab suci agama Hindu pada Menawa Dharma Castra Sloka 55 sebagai berikut :

*“Perempuan harus dihormati dan disanjung oleh ayah mereka, kakak-kakak mereka, suami, dan ipar yang menghendaki kesejahteraan mereka” (Menawa Dharma Castra, 73 buku ke-3 tahun 1983). Sedangkan Sloka 56 mengatakan.
“Di mana Perempuan dihormati, di sana dewa-dewi merasa senang tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada kerja yang berpahala”.*

Mengacu pada petikan sloka di atas, secara normatif pada hukum Hindu, perempuan telah mendapat kedudukan yang tinggi dan diistimewakan. Walaupun secara realitas masih ada ketimpangan terkait dengan sistem sosial masyarakat yang masih menganut sistem patrilineal, maupun pada sistem kekerabatan masyarakat dan lingkungannya (Swarsi, 1985).

Undang-undang maupun hukum Hindu secara normatif telah memberikan kesempatan perempuan untuk eksis dalam mengisi pembangunan, sekarang tergantung dari usaha perempuan untuk membuka diri dan siap melawan hambatan maupun tantangan tersebut. Motivasi diri yang mendorong perempuan bekerja masih diwarnai oleh faktor-faktor sosiologis, adat, dan budaya. Walaupun proses emansipasi berjalan terus dalam menemukan dirinya.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka motivasi terbesar perempuan menekuni bisnis pondok wisata karena, bisnis ini memiliki prospek yang cukup bagus dilihat dari aspek aktualisasi, teknologi, ekonomi, ekologi, struktur sosial, pembagian kerja, pendidikan, Agama, di samping itu kegiatan mengelola pondok wisata tidak menjauhkan perempuan dari aktivitas domestik dan kewajiban adat.

Meskipun kegiatan perempuan mampu memberikan sumbangan ekonomi yang cukup besar terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, namun dalam kenyataan belum mampu mengurangi beban kerja perempuan di sektor domestik serta memberikan hak yang setara dengan laki-laki dalam membuat keputusan, hal ini terganjal oleh adat patrilineal yang berakar pada agama Hindu

KEPUSTAKAAN

- Artadi, I Ketut. 1993. *Manusia Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Astiti, Tjok Istri Putra. 1986. "Perubahan Ekonomi Rumah Tangga dan Status Sosial wanita dalam Masyarakat Bali yang Patrilineal". (Tesis Tidak Diterbitkan pada Program Pasca Sarjana IPB Bogor).
- Atmaja, Nengah Bawa. 1992. "Pelestarian Hutan Wisata Kera di Desa Sangeh Bali (Suatu Telaah tentang Peranan Desa Adat dalam Mengelola Objek Wisata)". Tesis Magister pada Program Studi Antropologi Program Pasca Sarjana Universitas Udayana.
- Bhasin, Kamla. 2001. *Memahami Gender*. Jakarta: Teplok Press.
- Hardyastuti, Suhatmini, dan Ana Maris. 1994. *Produksi dan Reproduksi. Kasus Pekerja Wanita pada Industri Rumah Tangga Pangan di Daerah Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Horton, Paul B dan Chester L Hunt. 1999. *Sosiologi Jilid 2*. (Aminuddin Ram dan Tita Sobari Penerjemah). Jakarta: Erlangga.
- Kaplan, David dan Albert A. Manners. 2000. *Teori Budaya* (Landung Simatupang Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Natori, Masahiko (ed). 2001. *A Guide Book for Tourism-Based Community Development*. Japan: Asia Pacific Tourism Exchange Center (APTEC).
- Putri Sri, A. A. 2005. "Wanita dalam Industri Pariwisata: Studi Kasus Wanita Pengelola Pondok Wisata di Kelurahan Ubud, Gianyar". Denpasar: Universitas Udayana.
- Pelly, Menanti. 1994. *Teori-teori Sosial*. Jakarta: Proyek Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sanderson, Stephen K. 1993. *Sosiologi Makro Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Trj. Hotman M. Siahaan. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Talcott Parsons, Fungsionalisme Imperatif*. Jakarta: Rajawali.
- Spillane, James. 1994. *Pariwisata Indonesia. Siasat Ekonomi dan Siasat Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukardja, Putu. 1999. "Pemberdayaan Perempuan Dalam Kerajinan Kain Tenun (Studi Kasus Tentang Dinamika Sosial Budaya dalam Hubungan Gender di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah)". (Tesis tidak diterbitkan pada Program Pascasarjana UNUD Denpasar).
- Suratiyah, Ken, Marcelinus Molo dan Irwan Abdullah. 1997. *Dilema Wanita: antara Kegiatan Domestik dan Industri Rumah Tangga*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Yoeti, Oka. 1990. *Pemasaran Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

STRATEGI PENGEMBANGAN DESA WISATA EKOLOGIS DI DESA BELIMBING, KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

I Putu Sudana
sudanaputu@yahoo.com
Dosen Fakultas Pariwisata Unud

Abstract

This study discusses and examines the strengths and weaknesses and the opportunities and threats to formulate a strategy and program development in the Ecological Tourism Village of Belimbing. This study used quantitative and qualitative approaches. Data collected by observation, in-depth interviews, documentation and dissemination of questionnaires to 75 respondents consisting of bureaucrats, academics, tourism businesses and community leaders, then analyzed by SWOT method. Based on the SWOT analysis obtained alternative strategies that can be applied is create quality ecotourism product, increased promotion strategies through information technology application, human resource competence development strategy and marketing ecotourism products strategies for tourists who stay in villas of Belimbing's village and surrounding. Local people recommended to improve their competence in the field of tourism, tour operator and travel agencies must be active to make an attractive eco-tourism package and promote by technological advancements both online and offline.

Key words: Rural Tourism, Eco-Tourism Packages, Human Resources.

I. PENDAHULUAN

Bali dan Pariwisata adalah dua kata yang sudah melekat kait mengait antara satu dan lainnya. Bali yang total luasnya 5.632,86 kilometer persegi atau hanya 0,29 persen dari luas keseluruhan wilayah Indonesia, menjadi salah satu ikon promosi pariwisata dunia. Eksotisme alam dan budaya serta manusianya telah menobatkan Bali sebagai lokomotif pariwisata Indonesia.

Perkembangan pariwisata Bali nampaknya sampai saat ini belum menyentuh seluruh bagian daerah pulau ini. Hal ini tercermin dari aktivitas kepariwisataan hanya berpusat pada tiga daerah, yaitu Kabupaten Badung, kota Denpasar dan Gianyar. Kondisi seperti itu memicu terjadinya kesenjangan antar kabupaten, padahal sesungguhnya kabupaten-kabupaten di luar Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Gianyar mempunyai potensi dan daya tarik wisata yang layak dijual dan untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata.

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu dari sembilan kabupaten yang ada di Bali, disamping merupakan daerah agraris juga merupakan daerah yang memiliki potensi kepariwisataan yang besar untuk dikembangkan, baik diinjau dari keindahan alamnya maupun dari sisi seni budayanya yang telah mengakar di masyarakat berlandaskan filsafat Agama Hindu. Berdasarkan catatan yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan ada sekitar 24 Objek dan Daya Tarik

Wisata (ODTW). Dari 24 jumlah ODTW tersebut Desa Belimbing merupakan salah satu desa yang dikembangkan sebagai Desa Wisata, yang termuat dalam SK Bupati NO. 470/1998. Pengembangan Desa Wisata di Desa Belimbing juga merupakan amanat dari Undang-Undang Otonomi Daerah (UU. No. 22/99) diberlakukan mulai tahun 2000. Dalam Undang-Undang tersebut pembangunan akan lebih difokuskan di daerah pedesaan, sehingga dengan demikian akan terjadi perubahan sosial kemasyarakatan dari urbanisasi ke ruralisasi (orang-orang kota senang pergi ke desa untuk berekreasi). Departemen Pariwisata telah membuat program yang disebut pola PIR (Pariwisata Inti Rakyat), dengan mengembangkan pembangunan desa wisata. Dengan dikembangkannya pembangunan desa wisata akan terjadi arus urbanisasi ke ruralisasi yang selama ini terjadi karena pembangunan lebih banyak terjadi di daerah perkotaan, sehingga orang-orang desa banyak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, dan kemudian menetap di kota. Ruralisasi artinya orang-orang kota senang pergi ke desa untuk berekreasi. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan sesuai dengan apa yang dikehendaki GBHN tentang TRILOGI pembangunan, dimana salah satunya adalah pemerataan pembangunan. Dengan dibangunnya desa wisata akan merubah wawasan dan pengetahuan serta kreativitas orang-orang desa (Soetarso P dan R.M.M. Mulyadin, 2001).

Upaya pengembangan Desa Wisata di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, perlu dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya serta membenahi kekurangan-kekurangan yang ada serta memanfaatkan berbagai peluang untuk mengatasi berbagai kelemahan. Terlebih masyarakat Desa Belimbing sangat mengharapkan desanya bisa dikembangkan sebagai Desa Wisata Ekologis sehingga mereka bisa ikut berperan aktif di dalamnya sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraannya (Bali Post, 6 Oktober 2007). Selama ini masyarakat Desa Belimbing belum banyak terlibat dalam aktivitas kepariwisataan di desanya, walaupun ada itu hanya sebatas sebagai karyawan di dua buah Villa yang ada di Desa Belimbing, ini disebabkan karena potensi Desa belum tergarap secara maksimal disamping keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Hal ini tercermin dari minimnya wisatawan yang menginap di Vila yang ada di Desa Belimbing yang melakukan aktivitas atau menikmati daya tarik wisata desa ekologis. Wisatawan lainnya yang datang dari Denpasar menuju Singaraja lewat Pupuan atau dari Singaraja ke Denpasar lewat Pupuan pada umumnya hanya mampir (*stop over*) untuk menikmati pemandangan alam dengan sawah berterasering (Sucipta, 2010).

Dengan adanya fenomena minimnya aktivitas wisatawan yang menikmati daya tarik Desa Wisata Belimbing secara lebih mendalam, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam aktivitas kepariwisataan di Desa Belimbing yang notabena memiliki potensi yang sangat potensial untuk dikunjungi sebagai Desa Wisata Ekologis (*special interest tourism*) yang berada di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, sehingga menarik untuk dikaji mengenai kekuatan dan kelemahan dari faktor internal serta peluang dan ancaman dari faktor eksternal di Kawasan Desa Belimbing untuk bisa dipakai pedoman dalam merumuskan strategi dan program pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari faktor internal serta peluang dan ancaman dari faktor eksternal Desa Belimbing dikembangkan sebagai Desa Wisata Ekologis.
2. Untuk merumuskan strategi dan program pengembangan Desa Belimbing sebagai Desa Wisata Ekologis di Kabupaten Tabanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pariwisata

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang mempunyai berbagai komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, sosial ekonomi, budaya dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). Sebagai sebuah sistem, antar komponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, yang berarti bahwa perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan juga terjadinya perubahan pada subsistem yang lainnya, sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru. Pariwisata adalah sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba-laba : “ *like a spider’s web- touch one part of it and reverberations will be felt throughout*” (Fennel, 1999).

Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu : (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Dimasukkan kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media masa. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, dan seterusnya (Pitana dan Gayatri, 2005)

2.2 Model Pengembangan Pariwisata Massa

Kepariwisataan global yang berkembang sangat pesat didorong oleh adanya *mass tourism*. Menurut Kodhyat (1992), pariwisata massa meliputi kunjungan wisatawan dalam jumlah banyak, datang rombongan demi rombongan, dan berasal dari berbagai tingkat sosial ekonomi. Pemikiran Kodhyat terutama menyangkut wisatawan dalam jumlah banyak, diperjelas lagi oleh Cooper (1993) yang mengutip pikiran Cohen yang membagi wisatawan massa menjadi dua jenis yaitu wisatawan massa yang terorganisir (*the organized mass tourist*) dan wisatawan massa yang individu (*the individual mass tourist*). Kedua jenis wisatawan ini masih tergantung terhadap keberadaan industri pariwisata yang ada.

Menurut Fauker (dalam Gunawan, 1997) pariwisata massa merupakan perkembangan pariwisata yang bercirikan jumlah wisatawan yang besar, pembelian paket wisata dan perjalanan wisata yang sangat diseragamkan, mencakup segala-galanya dan dalam kelompok besar. Secara perorangan wisatawan yang ikut dalam wisatawan massa itu relatif tidak berpengalaman, wisatawan yang tidak canggih yang

mengunjungi daerah tujuan wisata yang umum untuk bersantai, menikmati pemandangan dan kegiatan dengan siraman sinar matahari, tanpa terlalu banyak ditantang oleh pengalaman yang asli dan asing baginya. Mereka berupaya memperbanyak pengalamannya dengan memasukkan banyak daerah tujuan wisata dalam jadwal perjalanannya dan mereka sangat merasakan kebutuhan untuk memamerkan “kehebatan” wisatanya kepada teman dan kerabat di tempat tinggalnya.

Secara realitas harus diakui bahwa wisatawan dan fasilitas pariwisata di Bali secara umum didorong oleh munculnya kegiatan pariwisata yang bersifat massa dengan segala ciri-ciri yang dilahirkan di atas. Sebenarnya kepariwisataan massa dapat membuka jalan untuk melahirkan kepariwisataan yang berkualitas (Ismaningrum, 2005).

2.3 Model Pengembangan Pariwisata Minat Khusus

Kepariwisataan yang berkualitas atau disebut pariwisata baru oleh Faulker (dalam Gunawan, 1997) dikatakan sebagai : (1) wisatawan yang lebih canggih dan berpengalaman, (2) sangat suka merencanakan perjalanannya sendiri, dan (3) bepergian secara mandiri. Ciri yang lain adalah bersifat spontan, luwes dalam mengatur susunan perjalanan, lebih terdorong untuk mencari objek wisata dengan minat khusus seperti wisata tirta, petualangan, dan umumnya kaya dan mencari pengalaman yang asli (khas) dan perjalanan mereka singkat ke satu tujuan wisata saja. Bentuk pariwisata minat khusus diterjemahkan dari *Special Interest Tourism*. Bentuk wisata ini apabila dilihat dari wisatawannya merupakan pariwisata dengan wisatawan dengan kelompok atau rombongan kecil (Fandeli, 2002). Pariwisata minat khusus dapat terfokus pada dua aspek, yakni :

a. Aspek budaya

Dalam aspek budaya, wisatawan akan terfokus perhatiannya pada tarian, musik, seni, kerajinan, pola tradisi masyarakat, aktivitas ekonomi yang spesifik, arkeologi dan sejarah.

b. Aspek Alam

Dalam aspek alam, wisatawan dapat terfokus pada flora, fauna, geologi, taman nasional, hutan, sungai, danau, pantai, laut dan perilaku ekosistem tertentu.

Pada prinsipnya, pariwisata minat khusus mempunyai kaitan dengan petualangan, dimana wisatawan secara fisik menguras tenaga dan ada unsur tantangan yang harus dilakukan, karena bentuk pariwisata ini banyak terdapat di daerah terpencil, seperti kegiatan : *tracking*, *hiking*, pendakian gunung, *rafting* di sungai, dan lainnya. Pariwisata minat khusus ini juga dikaitkan dengan upaya pengayaan pengalaman atau *enriching* bagi wisatawan yang melaksanakan perjalanan ke daerah-daerah yang masih belum terjamah atau ke daerah yang masih alami.

Ada beberapa kriteria yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menetapkan suatu bentuk wisata minat khusus (Fandeli, 2002) yakni :

1. *Learning*, pariwisata yang mendasar pada unsur belajar.
2. *Rewarding*, pariwisata yang memasukkan unsur pemberian penghargaan.
3. *Enriching*, pariwisata yang memasukkan peluang terjadinya pengkayaan pengetahuan antara wisatawan dengan masyarakat.
4. *Adventuring*, pariwisata yang dirancang dan dikemas sehingga terbentuk wisata petualangan.

2.4 Model Lingkungan Bisnis

Menurut Umar (2003:74) lingkungan bisnis dapat dibagi atas dua lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: Lingkungan Jauh dan Lingkungan Industri, sementara itu, lingkungan internal merupakan aspek-aspek yang ada di dalam perusahaan. Dalam mengkaji ketiga macam lingkungan ini Umar (2003:74-75) menyatakan bahwa lingkungan Jauh dapat dikaji melalui faktor-faktor PEST (Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi), lingkungan Industri dapat dikaji melalui aspek-aspek yang terdapat dalam konsep strategi bersaing (*competitive strategy*) dari Porter, serta lingkungan internal akan dikaji melalui beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan fungsional, rantai nilai (*value chains*), kurva belajar/pengalaman (*learning curve*), dan *balanced scorecard*.

2.5 Konsep, Faedah, dan Kriteria Desa Wisata

2.5.1 Konsep Desa Wisata

Berkembangnya sektor pariwisata diharapkan dapat meminimalisir kantong-kantong kemiskinan terutama di daerah yang potensial untuk dijadikan kawasan wisata. Masyarakat seharusnya merasakan efek pariwisata dalam kesehariannya dan sadar bahwa pariwisata bukan hanya milik segelintir orang. Putra (2008) menyatakan desa wisata pada dasarnya mempunyai dua komponen dasar yaitu akomodasi dan atraksi. Dalam konsep ini akomodasi diartikan sebagai tempat tinggal penduduk yang disewakan kepada wisatawan dan selanjutnya atraksi merupakan wujud keseharian penduduk desa serta setting fisik desa yang unik. Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993). Sedangkan Inskeep (1995) menyatakan desa wisata merupakan jenis pariwisata dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat. Bercermin kepada pola konsumsi wisatawan terutama mancanegara maka dewasa ini banyak bermunculan wisatawan minat khusus yang orientasinya tidak lagi terbelenggu oleh keindahan alam semata tetapi lebih kepada suatu interaksi baik terhadap budaya, masyarakat maupun alam setempat. Efektifitas dan wujud dari interaksi yang maksimal dapat direalisasikan melalui keunikan suatu kawasan. Terutama jika dikawasan tersebut ditemui hal-hal yang tidak lazim dan berbeda dari keseharian wisatawan tersebut. Keunikan tersebut dapat tertuang dalam suatu bentuk kebiasaan, aktivitas sehari-hari, ritual serta pola hidup yang harmonis dengan alam. Berlandaskan semangat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta menyikapi keinginan wisatawan untuk mencari sesuatu hal yang baru, maka konsep desa wisata merupakan salah satu sarana untuk menyatukan kedua elemen tersebut. Terpeliharanya nilai-nilai tradisional di suatu desa merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan untuk tidak hanya berkunjung namun juga tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama di desa tersebut. Tidak diragukan lagi hal ini akan menunjang proses *take and give* dari sisi budaya dan ekonomi. (Putra, 2008).

2.5.2 Faedah Konsep Desa Wisata

Pengembangan konsep desa wisata dinilai sangat efektif dalam rangka mengenalkan serta memberi peluang sebesar-besarnya kepada masyarakat pedesaan untuk memahami esensi dunia pariwisata serta menikmati hasil dari kepariwisataan

tersebut. Bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik dan keunikan terutama di keseharian masyarakat desa maka pengembangan konsep ini sangat direkomendasikan. Ada tiga keuntungan yang utama dalam pengaplikasian konsep ini pada suatu daerah yaitu; Pertama, dengan adanya desa wisata maka pengelola harus menggali dan mempertahankan nilai-nilai adat budaya yang telah berlangsung selama puluhan tahun di desa tersebut. Lestarinya nilai-nilai budaya merupakan daya tarik utama bagi wisatawan. Suatu desa tidak akan menarik jika tidak memiliki budaya, adat istiadat yang unik serta *way of living* yang eksotis. Kedua, dengan konsep ini maka secara otomatis masyarakat desa yang notabene memiliki kemampuan ekonomi yang kurang dapat berperan aktif dalam kelangsungan desa wisata. Dengan kata lain, timbul lahan-lahan pekerjaan baru serta pemberdayaan masyarakat desa akan semakin lebih intensif. Akhir dari konsep ini tentu saja agar peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat akan lebih termaksimalkan. Ketiga, masyarakat desa dituntut untuk lebih bersahabat dengan alam sekitar. Lingkungan yang asri, pohon-pohon yang rindang serta terawat adalah salah satu komponen daya tarik desa wisata. (putra). <http://tourism.padang.go.id/index.php?tourism=news&id=5>

Pengembangan dari desa wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata yaitu pendekatan pasar dan pendekatan fisik pengembangan. Pendekatan pasar meliputi: 1) interaksi tidak langsung, model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi semisal: penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya. 2) interaksi setengah langsung, bentuk-bentuk *one day trip* yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk. 3) interaksi langsung, model ini dimungkinkan wisatawan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat setempat. Alternatif lain dari model ini adalah penggabungan dari model pertama dan kedua. Sedangkan pendekatan fisik pengembangan, merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi, diantaranya adalah:

1. Mengonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan dari rumah tersebut. Contoh pendekatan dari tipe pengembangan model ini adalah Desa Wisata di Koanara, Flores. Desa wisata yang terletak di daerah wisata Gunung Kelimutu ini mempunyai aset wisata budaya berupa rumah-rumah tinggal yang memiliki arsitektur yang khas. Dalam rangka mengkonservasi dan mempertahankan rumah-rumah tersebut, penduduk desa menempuh cara memuseumkan rumah tinggal penduduk yang masih ditinggali. Untuk mewadahi kegiatan wisata di daerah tersebut dibangun juga sarana wisata untuk wisatawan yang akan mendaki Gunung Kelimutu dengan fasilitas berstandar resor minimum dan kegiatan budaya lain.

2. Mengonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa tersebut dan sekaligus mengembangkan lahan tersebut sebagai area pariwisata dengan fasilitas-fasilitas wisata. Contoh pendekatan pengembangan desa wisata jenis ini adalah Desa Wisata Sade, di Lombok.
3. Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah desa tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industri skala kecil. Contoh dari bentuk pengembangan ini adalah Desa wisata Wolotopo di Flores. Aset wisata di daerah ini sangat beragam antara lain : kerajinan tenun ikat, tarian adat, rumah-rumah tradisional dan pemandangan ke arah laut. Wisata di daerah ini dikembangkan dengan membangun sebuah perkampungan skala kecil di dalam lingkungan Desa Wolotopo yang menghadap ke laut dengan atraksi-atraksi budaya yang unik. Fasilitas-fasilitas wisata ini dikelola sendiri oleh penduduk desa setempat. Fasilitas wisata berupa akomodasi bagi wisatawan, restaurant, kolam renang, peragaan tenun ikat, plaza, kebun dan dermaga perahu boat.

2.5.3 Kriteria Desa Wisata

Daerah pedesaan dapat dikembangkan sebagai Desa wisata apabila memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah :

1. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.
2. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.
3. Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.
4. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.
5. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

Masing-masing kriteria digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu desa untuk kemudian menentukan apakah suatu desa akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe *one day trip* atau tipe tinggal inap. (http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata).

2.6 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mengacu pada bagaimana masyarakat setempat memiliki pengaruh yang besar secara social maupun secara organisasi kemasyarakatan sehingga mampu mempengaruhi lingkungan hidup mereka. Lingkungan hidup disini meliputi kombinasi antara penggunaan sumber daya dan *social capital* yang ada dengan aktivitas yang dilakukan masyarakat terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Penggunaan sumber daya ini seyogyanya bersifat berkelanjutan, sehingga dapat digunakan saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi disini meliputi keikutsertaan *stakeholders* kunci di dalam proses perencanaan dan pembuat

keputusan. Partisipasi disini dapat berupa partisipasi aktif (seperti pemberian informasi atau konsultasi) sampai partisipasi aktif (seperti bergabung dalam pengambilan keputusan serta bergabung dalam manajemen pemberdayaan masyarakat). www.propoortourism.org.uk.

Pitana (2006 : 137) menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat maka sangat diperlukan program-program pembangunan atau inovasi-inovasi yang dikembangkan mengandung unsur-unsur :

1. Memberikan keuntungan secara relative, terjangkau secara ekonomi dan ekonomis dinggap biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari hasil yang diperoleh (*relative advantage*);
2. Unsure-unsur dari inovasi dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan kepercayaan setempat (*compatibility*);
3. Gagasan baru dan praktek baru yang dikomunikasikan dapat dengan mudah dipahami dan dipraktikkan (*complexity and practicability*); dan
4. Unsure inovasi tersebut mudah diobservasi hasilnya lewat demonstrasi atau paraktek peragaan (*observability*).

Woodly (1993, dalam Pitana 2006) dengan tegas menyatakan bahwa "*Local people participation is a prerequisite for sustainable tourism*" Dalam konsep pemberdayaan, ada tiga komponen yang harus ada, yaitu :

1. *Enabling setting*, yaitu memperkuat situasi kondisi di tingkat lokal menjadi baik , sehingga masyarakat local bisa berkreaitivitas. Ibaratnya, membuat panggung yang baik, sehingga masyarakat local bisa menari diatas panggung tersebut.
2. *Empowering local community*. Setelah ada panggung yang baik untuk menari maka masyarakat setempat harus ditingkatkan kemampuannya menari. Artinya, setelah *local setting* disiapkan, masyarakat lokal harus ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya, sehingga mampu memanfaatkan setting dengan baik. Hal ini antara lain dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan berbagai bentuk pengembangan SDM lainnya.
3. *Socio-political support*. Kalau panggung sudah baik, masyarakat lokal sudah bisa menari, maka diperlukan adanya perangkat pendukung lain, seperti perlengkapan, penonton dan seterusnya, yang tidak lain berupa dukungan sosial, dukungan politik, networking, dan sebagainya. Tanpa dukungan sosial politik yang memadai, masyarakat lokal tidak akan bisa "menari" dengan baik di "panggung", meskipun masyarakat tersebut sesungguhnya pintar "menari" (Pitana, 2004).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian

Penelitian diadakan di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Sampel diambil secara porposif yakni sebanyak 75 orang yang terdiri dari tiga pilar insan pariwisata yakni masyarakat, pelaku bisnis pariwisata (swasta) dan pemerintah yang masing-masing diwakili oleh 25 orang responden untuk mengisi kuesioner yang terkait dengan penentuan indikator peluang dan ancaman dari faktor eksternal, indikator kekuatan dan kelemahan dari faktor internal terhadap pengembangan Desa Belimbing sebagai Desa Wisata Ekologis.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang meliputi jumlah restoran, penginapan, jumlah penduduk yang ada di Desa Belimbing, tabulasi penghitungan bobot, rating dan skor dari indikator-indikator eksternal dan internal di Desa Belimbing.
2. Data Kualitatif yaitu data yang tidak dapat diukur secara langsung dengan angka, tapi berupa informasi-informasi yang jelas dan sesuai kenyataan yang dapat mendukung penelitian ini seperti gambaran umum lokasi penelitian, dan penjelasan-penjelasan lainnya yang berhubungan dengan penulisan.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni para 75 orang responden yang terdiri dari tiga insan pariwisata yakni pemilik bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Melalui daftar pertanyaan yang diajukan, data diperoleh untuk mengetahui pendapat para stakeholder terhadap keberadaan Desa Belimbing sebagai Desa Wisata Ekologis yang terkait dengan faktor internal produk (kriteria Desa Wisata), dan pendapat para stakeholder terhadap faktor eksternal (PEST) serta pemberian bobot oleh para *stakeholder* yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini yang bukan merupakan pihak pertama seperti: daftar usaha pariwisata di Desa Belimbing, profil daerah penelitian dari kantor Kepala Desa Belimbing, dan teori-teori dari berbagai pustaka yang digunakan sebagai landasan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan turun secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui secara jelas gambaran umum lokasi penelitian di Desa Belimbing.
2. Penyebaran Kuesioner, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 75 orang responden dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner terstruktur. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui pendapat dari para insan pariwisata yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan pihak swasta, terhadap keberadaan Desa Belimbing berkaitan dengan penentuan kekuatan dan kelemahan dari faktor internal (kriteria Desa Wisata yang terdiri dari : atraksi wisata, jarak tempuh, besaran desa, system kepercayaan dan kemasyarakatan dan kesediaan infrastruktur), dan penentuan peluang serta ancaman dari faktor eksternal (Lingkungan Jauh yang meliputi Politik, Ekonomi Sosial dan Teknologi/ PEST)
3. Wawancara mendalam, dilakukan kepada para tokoh-tokoh masyarakat Desa Belimbing, untuk mendapatkan data mengenai deskripsi segenap potensi (atraksi: budaya, alam, buatan) dan sejarah perkembangan pariwisata di Desa Belimbing.
4. Dokumentasi, metode pengumpulan data secara dokumen dilakukan untuk menelusuri dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini seperti monografi dan sejarah Desa Belimbing.

3.5 Identifikasi Variabel

Sesuai dengan model penelitian yang dirancang, ada beberapa variabel yang diidentifikasi. Dalam evaluasi eksternal variabel yang diidentifikasi meliputi lingkungan jauh Variabel lingkungan jauh antara lain: lingkungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST). Dalam evaluasi internal ada beberapa variabel yang diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut adalah variabel-variabel yang menyangkut kriteria Desa Wisata yang meliputi: Atraksi wisata, jarak tempuh, Besaran Desa, Sistem Kepercayaan dan Kemasyarakatan, dan Ketersediaan Infrastruktur terkait dengan potensi Desa Belimbing untuk dikembangkan sebagai Desa Wisata Ekologis.

Rincian variabel dan indikator faktor internal dan faktor eksternal dapat dilihat dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 :

Tabel 3.1. Variabel dan Indikator Kriteria Desa Wisata (Faktor Internal)

No	Variabel	Indikator
1	Atraksi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> - Keindahan sawah berterasering - Adanya dua buah air terjun - Kerajinan membuat gula aren dari minuman tuak - Pura Luhur Mekori dan sekitarnya yang dihuni oleh ratusan ekor kera - Budaya subak di Desa Belimbing - Alam masih Asri didukung oleh udara yang sejuk, air sungai yang jernih dan berbatu - Budaya Kuliner di Desa Belimbing
2	Jarak tempuh	<ul style="list-style-type: none"> - Jalur wisata Denpasar-Lovina (Singaraja) - Sarana dan prasarana jalan yang memadai - Jarak Desa Belimbing dengan sentra pariwisata Kuta, Sanur dan Nusa Dua
3	Besaran Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Wilayah yang cukup luas (2.606,66 ha) untuk pengembangan Desa Wisata Ekologis - Pemukiman penduduk yang belum padat (0,66% dari luas wilayah Desa) - SDM di Desa Belimbing
4	Sistem kepercayaan dan Kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat beragama Hindu yang menerima perkembangan pariwisata - Budaya gotong royong di Desa Belimbing
5	Ketersediaan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Penginapan dan villa sebagai sarana akomodasi di Desa Belimbing - Jumlah rumah makan yang memenuhi standar wisatawan cukup tersedia - Tersedianya guide lokal/penunjuk jalan traking - Rumah penduduk lokal yang sudah dijadikan tempat menginap bagi wisatawan - Tersedianya 8 buah jalur trekking di Desa Belimbing

Tabel 3.2. Variabel dan Indikator dari Lingkungan Jauh (Faktor Eksternal)

No	Variabel	Indikator
1	Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Dicabutnya bebas visa kunjungan singkat (BVKS) oleh pemerintah tahun 2004 - Kondusifnya situasi keamanan Bali menjelang/pasca Pemilu legeslatif tahun 2009 - SK Bupati No.470/1998 tentang Pengembangan Desa Belimbing sebagai Objek Wisata
2	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak penurunan harga BBM - Nilai tukar rupiah yang lemah
3	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap masyarakat setempat terhadap pengembangan Desa wisata ekologis di Desa Belimbing - Dukungan Lembaga Desa Adat dan Lembaga Pemberdayaan Desa Adat di Desa Belimbing
4	Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan teknologi informasi / internet dalam memasarkan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis **SWOT**. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan yang dipengaruhi oleh kebijakan internal perusahaan serta peluang dan ancaman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan. Kombinasi antara kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman diperoleh suatu matriks yang dikenal dengan istilah matriks SWOT. Matriks SWOT yang dimaksud ditunjukkan dalam Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Matriks SWOT

IFAS	Kekuatan/ <i>Strength (S)</i> Faktor-faktor Kekuatan Internal	Kelemahan/ <i>Weaknesses (W)</i> Faktor-faktor Kelemahan Internal
EFAS Peluang/ <i>Opportunities (O)</i> Faktor peluang Eksternal	Strategi <i>SO</i> 1 Ciptakan strategi yang menggunkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi <i>WO</i> 3 Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Ancaman/ <i>Threats (T)</i> Faktor ancaman eksternal	Strategi <i>ST</i> 2 Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi <i>WT</i> 4 Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Diadopsi dari David 2004:186.

Gambar 3.1 menunjukkan adanya empat kuadran dalam matriks **SWOT**, dimana setiap kuadran memiliki strategi masing-masing. Strategi-strategi tersebut yaitu :

1. Strategi *SO* di kudran 1

Perusahaan pada posisi ini memperoleh peluang yang besar dengan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Kondisi seperti ini mendorong perusahaan agar menerapkan strategi dengan orientasi pertumbuhan (*Growth Oriented Strategy*).

2. Strategi *ST* di kuadran 2
Ditengah-tengah kekuatan yang dimiliki perusahaan, terdapat banyak ancaman eksternal perusahaan. Pada kondisi seperti ini strategi yang digunakan perusahaan adalah strategi diversifikasi, dimana perusahaan menggunakan segala kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk membangun peluang-peluang jangka panjang yang lebih menjanjikan.
3. Strategi *WO* di kuadran 3
Pada kuadran ini, perusaan dihadapkan pada peluang-peluang dalam kelemahan yang dimiliki perusahaan. Pada kondisi ini perusahaan harus berusaha menghilangkan kelemahan-kelemahan yang dimiliki berusaha memperoleh peluang yang ada.
4. Strategi *WT* di kuadran 4
Kondisi pada kuadran ini adalah kondisi terburuk yang dimiliki perusahaan. Ditengah-tengah kelemahan yang dimiliki terdapat ancaman-ancaman terhadapnya. Kondisi seperti ini mendorong perusahaan untuk melakukan pengunduran diri.

Pemberian interval penilaian atas posisi perusahaan terhadap faktor internal dan eksternal 0,75.

Tabel 3.3. Kriteria Hasil Analisis

Nilai	Range	Hasil
4	3,26 - 4,00	Sangat Baik
3	2,51 - 3,25	Baik
2	1,76 - 2,50	Kurang Baik
1	1,00 - 1,75	Sangat Kurang Baik

Sumber: Rudika, 2004:77.

Berdasarkan Tabel 3.3, variabel eksternal memberikan gambaran tentang peluang dan ancaman. Apabila nilai yang diperoleh dengan sebutan baik dan sangat baik, maka akan merupakan suatu peluang bagi perusahaan, tetapi apabila nilai yang diperoleh dengan sebutan kurang baik dan sangat kurang baik maka hal tersebut merupakan suatu ancaman. Berdasarkan tabel 3.3 posisi peluang berada pada rentang nilai 2,51 sampai 4,00 dan posisi ancaman berada pada rentang nilai 1,00 sampai dengan 2,50.

Untuk lingkungan internal, memberikan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sebutan sangat baik diidentikkan dengan sangat kuat, baik diidentikkan dengan kuat, kurang baik diidentikkan dengan lemah, sangat kurang baik diidentikkan dengan sangat lemah. Jadi Kreteria baik dan sangat baik merupakan kekuatan, berada pada rentang nilai 2,51 sampai dengan 4,00 sedangkan kurang baik dan sangat kurang baik merupakan kelemahan berada pada rentang nilai 1,00 sampai dengan 2,50.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Belimbing

4.1.1 Latar Belakang Sejarah Desa Belimbing

Sejarah nama Desa Belimbing erat kaitannya dengan sejarah berdirinya Pura Luhur Mekori. Menurut legenda adalah Pura Puseh Bale Agung Mekori yang sekarang

dilihat sebagai pura luhur Mekori dari Kerajaan Keahuripan yang pada jaman dahulu mempunyai penduduk kurang lebih 200 KK. Kerajaan ini mempunyai rakyat raksasa 2 orang, laki dan perempuan. Setiap upacara di Pura Puseh Bale Agung Mekori biasanya diadakan pertunjukan kesenian tari rejang dan penari paling belakang selalu hilang pada saat pertunjukan. Pada suatu hari prajuru berusaha memasang perangkap dengan mengikat benang yang terulur pada penari paling belakang dan akhirnya penari tersebut hilang dengan diikuti benang yang telah diikat pada pinggangnya. Benang yang terpasang tersebut sebagai petunjuk bagi masyarakat ke mana arahnya dan terus diikuti oleh masyarakat. Ternyata penari tersebut dibawa ke dalam goa di sebelah timur laut Pura Puseh Bale Agung Mekori dan ternyata penari tersebut dilarikan dan dimakan oleh raksasa.

Selanjutnya masyarakat berusaha membunuh raksasa tersebut dengan jalan memasukkan sekam padi ke dalam mulut goa untuk dibakar dan goa ditutup dengan tanah. Dari dalam goa terdengar suara raksasa laki-laki, mengatakan kalau rakyat membunuhnya dia adalah tidak bersalah, sebab yang melarikan penari adalah raksasa perempuan. Maka raksasa lelaki tersebut mengeluarkan kutukan agar terjadi hujan api pada Kerajaan Kahuripan sampai terbakar hangus dengan seluruh rakyatnya. Raksasa laki dan perempuan itu juga terbunuh dalam goanya. Lubang goa tersebut tembus sampai ke Desa Angkah, pada lubang gua dusun lumbung tempat penari dicurinya. Di bibir gua tersebut ditemukan banyak timbunan tulang-tulang berserakan, itu pula sebabnya disebut Desa Angkah. Setelah lenyapnya Kerajaan Kahuripan, pada suatu hari tersebar wabah penyakit yang merajalela (gerubug) yang menyebabkan semua penduduk mati. Lama sejak itu kerajaan Kahuripan tidak ada penghuninya, sampai akhirnya datanglah Pasek Margatelu untuk menguasai wilayah Kerajaan Kahuripan tersebut. Selanjutnya datanglah Pasek Wanagiri untuk menundukkan Pasek Margatelu, dengan menggunakan tipu muslihat dan segala daya untuk mengusir Pasek Margatelu. Warga Margatelu merasa dikalahkan oleh pedatang baru dan warga merasa dikalahkan di wilayah dekat dengan pohon beringin raksasa, maka orang-orang Margatelu menyebut wilayah itu bernama Belimbing dan semenjak itu warga Wanagiri menetap di wilayah Belimbing berkembang sampai saat ini, kemudian diikuti dengan datangnya warga lainnya, seperti warga dari keturunan Kebayan, Pasek, Pande maupun Arya. Jadi semenjak warga margatelu meninggalkan wilayah tersebut disebut Desa Belimbing dan tetap bernama yang sama sampai sekarang.

4.1.2 Kondisi Ekowisata di Desa Belimbing

Desa Belimbing terletak di wilayah pegunungan yang secara umum berada di jalur Denpasar- Singaraja dengan jarak dari kota kecamatan sekitar 1,5 Km, dari kota kabupaten sekitar 35 Km, dan dari ibu kota provinsi sekitar 60 Km yang terdiri dari delapan banjar dinas dari tiga desa pekraman dan memiliki enam subak basah. Melihat dari letak geografis desa yang berada pada ketinggian 500-600 m dari permukaan laut lebih memungkinkan dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, sehingga mayoritas pekerjaan penduduk dapat dikatakan sebagai petani. Dengan rata-rata pendidikan adalah tamatan SD/SLTP. Disamping itu dengan wilayah yang cukup luas dan penduduk yang banyak dapat memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa yang berbasis pertanian dan pariwisata.

Luas Wilayah Desa Belimbing mencapai 2.606,66 ha dengan rincian luas tanah sawah 644,60 ha, kebun 1.700,56 ha, pemukiman 18,00 ha, tanah adat 225,00 ha, hutan 20,00 ha, dan perkantoran 0,50 ha. Desa Belimbing terdiri dari delapan Banjar

Dinas : Banjar dinas Pemudungan, Belimbing Tegal, Belimbing Anyar, Belantih, Beniti, Belimbing Desa, Duren Taluh, dan Suradadi.

Wilayah Desa Belimbing memiliki karakteristik berbukit-bukit dengan lembah yang dialiri aliran sungai yang cukup banyak dan suhu rata-rata 25 derajat Celcius. Potensi sumber daya alam dan budaya di wilayah Desa Belimbing yang diidentifikasi untuk dapat dijadikan daya tarik ekowisata meliputi : 1) Hutan Mekori, 2) Persawahan, 3) perkebunan, 4) Pemandangan alam, 5) Pura Luhur Mekori, 6) Sekaa Kesenian, 7) Kelompok Subak, 8) Kelompok Tani, 9) Sungai dan air terjun dan lain-lain.

4.2 Analisis dan Skor Lingkungan Internal

Untuk menilai lingkungan internal potensi kawasan Desa Belimbing digunakan pedoman identifikasi dan definisi variabel seperti disajikan dalam Tabel 4.1 Pemingkatan diberikan dengan menjawab pilihan dari empat alternatif yaitu sangat buruk, buruk, baik dan sangat baik. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing responden memberikan nilai yang bervariasi. Perhitungan nilai peringkat (rating) responden didasarkan pada nilai rata-rata dari seluruh responden. Pemingkatan yang diberikan oleh responden (*stakeholder*) terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Peringkat dan Rating Lingkungan Internal (*Internal Factor Analysis Summary*)

No	Faktor Internal	
	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Rating
1	Keindahan sawah berterasering	3.784
2	Adanya dua buah air terjun	3.137
3	Kerajinan membuat gula aren dari minuman tuak	3.686
4	Pura Luhur Mekori dan sekitarnya yang dihuni oleh ratusan ekor kera	3.647
5	Budaya subak di Desa Belimbing	3.372
6	Alam masih Asri didukung oleh udara yang sejuk, air sungai yang jernih dan berbatu	3.490
7	Budaya Kuliner di Desa Belimbing	3.352
8	Jalur wisata Denpasar-Lovina (Singaraja)	3.286
9	Sarana dan prasarana jalan yang memadai	3.260
10	Wilayah yang cukup luas (2.606,66 ha) untuk pengembangan Desa Wisata Ekologis	3.265
11	Pemukiman penduduk yang belum padat (0,66% dari luas wilayah Desa)	3.190
12	Masyarakat beragama Hindu yang menerima perkembangan pariwisata	3.380
13	Budaya gotong royong di Desa Belimbing	3.196
14	Penginapan dan villa sebagai sarana akomodasi di Desa Belimbing	3.347
15	Jumlah rumah makan yang memenuhi standar wisatawan cukup tersedia	2.988
16	Tersedianya guide lokal/penunjuk jalan traking	2.978
17	Rumah penduduk lokal yang sudah ada dijadikan tempat menginap bagi wisatawan	2.897
18	Tersedianya 8 buah jalur trekking di Desa Belimbing	3.304
	Kelemahan (<i>weakneses</i>)	Rating
1	Jarak Desa Belimbing dengan sentra pariwisata Kuta, Sanur dan Nusa Dua	2.413
2	SDM di Desa Belimbing	2.471

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

4.3 Analisis dan Skor Lingkungan Eksternal.

Lingkungan eksternal dari kawasan Desa Belimbing sebagai desa Wisata Ekologis yang akan menciptakan peluang dan ancaman dinilai oleh 45 orang responden yang terdiri dari para satakeholder yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha pariwisata dan pihak akademisi yang ada di Kawasan Desa Belimbing. Dalam menilai lingkungan eksternal, responden memakai pedoman identifikasi faktor lingkungan eksternal yang sudah disiapkan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya variasi nilai yang diberikan responden terhadap masing-masing indikator. Untuk mendapatkan nilai dari semua responden maka dihitung berdasarkan rata-rata (*mean*) persepsi responden. Adapun hasil penelitian terhadap pemeringkatan responden terhadap lingkungan eksternal dapat dilihat pada kolom rating pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Peringkat dan Rating Lingkungan Eksternal (*External Factor Analysis Summary*)

No	Faktor Eksternal	
	Peluang	Rating
1	Kondusifnya situasi keamanan Bali menjelang/pasca Pemilu legeslatif tahun 2009	3.705
2	SK Bupati No.470/1998 tentang Pengembangan Desa Belimbing sebagai Objek Wisata	3.579
2	Dampak penurunan harga BBM	3.294
3	Nilai tukar rupiah yang lemah	2.882
4	Sikap masyarakat setempat terhadap pengembangan desa wisata di Desa Belimbing	3.058
5	Dukungan Lembaga Desa Adat dan Lembaga Pemberdayaan Desa Adat di Desa Belimbing	3.529
	Ancaman	Rating
1	Penggunaan teknologi informasi / internet dalam memasarkan pariwisata minat khusus yang ada di Kawasan wisata Kintamani	2.235
2	Dicabutnya bebas visa kunjungan singkat (BVKS) oleh pemerintah tahun 2004	2.294

Sumber : Hasil Penelitian, 2012.

4.4 Strategi Pengembangan Desa Belimbing Sebagai Desa Wisata Ekologis

Untuk mengembangkan Desa Belimbing sebagai Desa Wisata Ekologis di Kabupaten Tabanan yang berkelanjutan serta menguntungkan semua pihak dan tetap melestarikan alam perlu dirumuskan strategi dalam pengembangannya. Berdasarkan hasil kajian kekuatan dan kelemahan dari faktor internal serta peluang dan ancaman dari faktor eksternal maka dengan analisis SWOT akan ditemukan strategi dan program pengembangannya, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Analisis SWOT Strategi Pengembangan Desa Belimbing Sebagai Desa Wisata Ekologis

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Kekuatan (Strength)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keindahan sawah berterasering • Adanya dua buah air terjun • Kerajinan membuat gula aren dari minuman tuak • Pura Luhur Mekori dan sekitarnya yang dihuni oleh ratusan ekor kera • Budaya subak di Desa Belimbing • Alam masih Asri didukung oleh udara yang sejuk, air sungai yang jernih dan berbatu • Budaya Kuliner di Desa Belimbing • Jalur wisata Denpasar-Lovina (Singaraja) • Sarana dan prasarana jalan yang memadai • Wilayah yang cukup luas (2.606,66 ha) untuk pengembangan Desa Wisata Ekologis • Pemukiman penduduk yang belum padat (0,66% dari luas wilayah Desa) • Masyarakat Desa Belimbing beragama Hindu • Budaya gotong royong di Desa Belimbing • Tersedianya villa sebagai sarana akomodasi • Jumlah rumah makan yang memenuhi standar wisatawan cukup tersedia • Tersedianya guide lokal/penunjuk jalan tracking • Rumah penduduk lokal yang sudah ada dijadikan tempat menginap bagi wisatawan • Tersedianya 8 buah jalur trekking 	<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jarak Desa Belimbing dengan sentra pariwisata Kuta, Sanur dan Nusa Dua • SDM di Desa Belimbing
<p>Peluang (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kondusifnya situasi keamanan Bali menjelang/pasca Pemilu legeslatif tahun 2009 • SK Bupati No.470/1998 tentang Pengembangan Desa Belimbing sebagai Objek Wisata • Dampak penurunan harga BBM • Nilai tukar rupiah yang lemah • Sikap masyarakat setempat terhadap pengembangan pariwisata di Desa Belimbing • Dukungan Lembaga Desa Adat dan Lembaga Pemberdayaan Desa Adat di Desa Belimbing 	<p>Strategi SO</p> <p>Menciptaan dan pengembangan produk ekowisata yang berkualitas (kombinasi a,b,c,d,e, dengan 1,2,3,4,5,6,7,8,9)</p>	<p>Strategi WO</p> <p>Peningkatan Kualitas SDM pariwisata di Desa Belimbing secara berkelanjutan (kombinasi a,b,c,d,e, dengan 1, 2,,)</p>
<p>Ancaman (Treat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dicabutnya bebas visa kunjungan singkat (BVKS) oleh pemerintah tahun 2004 • Penggunaan teknologi informasi / internet dalam memasarkan pariwisata di Desa Belimbing 	<p>Strategi ST</p> <p>Peningkatan promosi melalui penggunaan kemajuan teknologi informasi. (kombinasi a,b,dengan 1,2,3,4,5,6,7,8,9)</p>	<p>Strategi WT</p> <p>Memperkuat distribusi pemasaran produk ekowisata kepada wisatawan yang tinggal di Vila-vila yang ada di Desa Belimbing dan sekitarnya. (kombinasi a,b,dengan 1,2,)</p>

Berdasarkan analisis SWOT yang disajikan dalam Tabel 4.3 disusun strategi pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing. Adapun beberapa alternatif strategi yang dapat dirumuskan dalam mengembangkan Desa Wisata Ekologis di DEsa Belimbing adalah sebagai berikut :

1. Strategi *Strength Opportunities (SO)* strategi ini berupaya untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar atau lingkungan eksternal. Strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan Desa Belimbing sebagai Desa Wisata Ekologis adalah menciptakan dan mengembangkan produk ekowisata yang berkualitas.
2. Strategi *Strength Treats (ST)*, strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing adalah meningkatkan promosi melalui penggunaan kemajuan teknologi informasi.
3. Strategi *Weakness Threats (WO)* dalam kuadran ini strategi yang dirancang adalah berusaha meminimalkan kelemahan dengan berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Strategi pengembangan yang dapat diterapkan di Desa Belimbing adalah strategi peningkatan SDM pariwisata di Desa Belimbing secara berkelanjutan.
4. Strategi *Weakness Threats (WT)*, strategi ini bertujuan untuk bertahan dengan meminimalisir kelemahan dengan menghindari ancaman. Strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan Desa Belimbing sebagai Desa Wisata Ekologis adalah memperkuat distribusi pemasaran produk ekowisata kepada wisatawan yang menginap di Vila-Vila yang ada di Desa Belimbing dan sekitarnya.

4.5 Strategi dan Program Pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing

4.5.1 Strategi Menciptakan dan Mengembangkan Pruduk Ekowisata yang Berkualitas

Untuk menarik kedatangan wisatawan untuk berkunjung ke daerah wisata yang masih langka namun unik yang ada di Desa Belimbing, perlu di kemas paket-paket yang menarik guna menambah pengalaman wisatawan, memperdayakan penduduk lokal dan tetap melestarikan alam dan lingkungan. Untuk itu perlu dibuat kemasan wisata yang menarik berupa paket ekowisata yang fokus untuk menambah unsur belajar dari wisatawan, petualangan yang unik, meningkatkan ekonomi penduduk lokal serta peduli terhadap lingkungan.

Adapun program yang dapat diterapkan untuk menciptakan produk ekowisata yang berkualitas adalah :

1. Penyuluhan yang berkelanjutan terhadap masyarakat tentang kualitas pelayanan dan pemahaman tentang Desa wisata dan ekowisata bagi masyarakat Desa Belimbing.
2. Melibatkan masyarakat lokal dalam setiap pelaksanaan paket ekowisata yang dibuat.
3. Mengadakan kerjasama dengan pengusaha lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan (pengusaha akomodasi, restoran dan daya tarik wisata) terkait dengan paket-paket Desa Wisata Ekologis yang dibuat agar terciptanya kepuasan wisatawan yang menguntungkan secara berkelanjutan.
4. Memberikan pengalaman yang maksimal kepada wisatawan dengan melibatkan wisatawan secara aktif untuk mengenal lebih dalam tentang alam, budaya dan aktivitas penduduk lokal yang unik di Desa Belimbing.

4.5.2 Strategi Meningkatkan Promosi melalui Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi

Selama ini terkesan bahwa kawasan Desa Belimbing kurang dipromosikan secara optimal, seperti Pura Luhur Mekori yang dihuni oleh ratusan ekor kera, Air terjun,

pemandangan sawah yang berterasering, lahan pertanian yang subur sangat cocok untuk aneka tanaman buah-buahan seperti durian, manggis, duku, cokelat dan lain-lainnya serta pemandangan alam yang indah udaranya yang sangat sejuk. Wisatawan lebih mengenal sawah berterasering yang ada di objek wisata Jati Luwih dan di Tegalalang dari pada sawah berterasering yang ada di Belimbing. Sehingga promosi perlu ditingkatkan dengan memasarkan paket-paket ekowisata di Desa Belimbing dengan memanfaatkan kemajuan teknologi baik yang online maupun yang offline sebagai berikut :

1. Mempromosikan segala potensi pariwisata yang ada di Desa Belimbing melalui webside, yang diupdate secara berkesinambungan.
2. Menjual dan memasarkan paket-paket ekowisata yang telah dikemas melalui sistem penjualan *online*.

4.5.3 Strategi Penguatan Saluran Distribusi Pemasaran Produk Ekowisata Bagi Wisatawan yang Menginap di Vila-Vila yang ada di Desa Belimbing dan sekitarnya.

Keberadaan sarana akomodasi di Desa Belimbing perlu dioptimalkan dalam memasarkan produk-produk kemasan paket ekowisata yang ada di Desa Belimbing. Wisatawan yang sudah menginap di villa-villa yang ada di Desa Belimbing dan sekitarnya perlu diperkenalkan dan diajak untuk mengenal dan menikmati keunikan budaya dan alam Desa Belimbing dengan mengikuti paket-paket wisata yang sudah dikemas oleh BPW di Desa Belimbing. Adapun program yang dapat diterapkan adalah :

1. Bekerja sama dengan pengelola Vila yang ada di Desa Belimbing dan sekitarnya untuk memasarkan paket -paket wisata ekologis dengan memberikan sistem komisi yang telah disepakati atau kontrak rate.
2. Memperbanyak dan menyebarkan brosur-brosur tentang kemasan paket ekowisata di Desa Belimbing ke Villa-villa yang ada di Desa Belimbing dan sekitarnya.

4.5.4 Strategi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pariwisata di Desa Belimbing secara Berkelanjutan

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mengembangkan daerah menjadi daerah tujuan wisata, karena kepuasan wisatawan sangat tergantung dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh penduduk lokal (*host*) selama wisatawan berada di destinasi wisata. Adapun program yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Desa Belimbing adalah :

1. Memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan Sapta Pesona.
2. Memberikan pelatihan menjadi pemandu wisata lokal di bidang ekowisata di Desa Belimbing .
3. Memberikan pelatihan tentang teknik mengemas paket ekowisata bagi generasi muda dan pelaku wisata di Desa Belimbing

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari analisis yang dilakukan terhadap lingkungan internal dan eksternal Kawasan Pariwisata Kintamani sebagai daya tarik minat khusus dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dari faktor internal adalah : keindahan Danau dan Gunung Batur, kasiat air panas Toyo Bungkah bagi kesehatan, keunikan Desa Trunyan, mendaki gunung Batur dan pemandangan matahari terbit di pagi hari,tersedianya sarana akomodasi di Kawasan Pariwisata Kintamani, jumlah restoran yang memenuhi standar wisatawan cukup tersedia,tersedianya guide lokal yang memandu wisatawan dalam mendaki gunung Batur, jarak antara lokasi wisata dengan tempat tamu menginap, kemudahan transportasi dari hotel menuju tempat wisata Kintamani. Sedangkan kelemahannya adalah Belum tersedianya transportasi lokal yang nyaman dan reguler bagi wisatawan, sarana jalan menuju Desa Songan, Kedisan, Toyo Bungkah, dan adanya truk yang mengangkut galian C.
2. Faktor-faktor yang menjadi peluang adalah kondusifnya situasi keamanan Bali menjelang/pasca Pemilu legeslatif tahun 2009, dampak penurunan harga BBM, nilai tukar rupiah yang lemah, sikap masyarakat setempat terhadap pengembangan pariwisata minat khusus di Kawasan Kintamani, dukungan Lembaga Desa Adat dan Lembaga Pemberdayaan Desa Adat di Kawasan Pariwisata Kintamani. Sedangkan ancamannya adalah Dicabutnya bebas visa kunjungan singkat (BVKS) oleh pemerintah tahun 2004, penggunaan teknologi informasi / internet dalam memasarkan pariwisata minat khusus yang ada di Kawasan wisata Kintamani.
3. Berdasarkan analisis Matrik Internal-Ekternal (IE), posisi Kawasan Kintamani sebagai daya tarik wisata minat khusus adalah ada pada sel I, artinya pengembangan Kawasan Kintamani sebagai Daya Tarik Wisata Minat khusus harus menerapkan *grow and build strategy* yaitu strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. Sedangkan strategi alternatif yang dapat diterapkan adalah menciptakan dan pengembangan produk wisata minat khusus yang berkualitas, strategi peningkatan promosi melalui penggunaan kemajuan teknologi informasi, strategi pembuatan paket wisata minat khusus yang meminimalkan penggunaan akses yang bersamaan dengan truk pengangkut galian C, dan strategi pembuatan paket wisata minat khusus dengan memanfaatkan sarana transportasi air di Danau Batur.
4. Strategi alternatif yang ditetapkan diatas, dapat dijabarkan dengan beberapa program yaitu (1) Penyuluhan yang berkelanjutan terhadap masyarakat tentang kualitas pelayanan dan pemahaman tentang pariwisata minat khusus bagi masyarakat setempat, (2) Melibatkan masyarakat lokal dalam setiap pelaksanaan paket minat khusus yang dibuat, (3) Mengadakan kerjasama dengan pengusaha lokal untuk meningkatkan kualitas pelayanan (pengusaha akomodasi, restoran dan daya tarik wisata) terkait dengan paket-paket minat khusus yang dibuat agar terciptanya kepuasan wisatawan yang menguntungkan secara berkelanjutan, (4) Memberikan pengalaman yang maksimal kepada wisatawan dengan melibatkan wisatawan secara aktif untuk mengenal lebih dalam tentang alam, budaya dan aktivitas penduduk lokal yang unik di daerah yang dikunjungi, (5) Mempromosikan segala potensi pariwisata yang ada di Kawasan Pariwisata Kintamani melalui webside, yang diupdate secara berkisinambungan, (6) Menjual dan memasarkan paket-paket wisata minat khusus yang telah dikemas melalui sistem penjualan *online*, (7) Melaksanakan kegiatan menuju daya tarik wisata minat khusus di pagi hari, (8) Bekerja sama dengan organisasi pengelola boat dan pemilik jukung di sekitar Danau Batur, (9) Membuat paket-paket wisata minat khusus yang memanfaatkan keindahan danau Batur dan sekitarnya. Misalnya mengunjungi Desa

Trunyan, Air Panas Toyo Bungkah, mengunjungi aktivitas kerambah ikan dan jenis aktivitas wisata lainnya yang bersifat pengembangan wisata alternatif.

5.2 Saran

Berdasarkan kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh Desa Belimbing untuk dikembangkan sebagai Desa Wisata Ekologis sehingga dalam pengembangannya tetap melestarikan lingkungan, meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan, memberikan manfaat bagi penduduk lokal secara berkelanjutan, maka dapat disarankan beberapa hal antara lain :

1. Masyarakat lokal khususnya masyarakat Desa Belimbing disarankan untuk selalu meningkatkan kompetensi di bidang pariwisata, dan meningkatkan sadar wisata melalui penerapan program Sapta Pesona.
2. Pihak BPW disarankan untuk selalu aktif membuat kemasan paket ekowisata untuk mengurangi kejenuhan terhadap paket-paket wisata yang bersifat massal dan mempromosikannya dengan menggunakan kemajuan teknologi yang *online* maupun *offline*.

KEPUSTAKAAN

- Anonim. 2007. *Berdayakan Warga Belimbing Menuju Desa Wisata*. Bali Post, 6 Oktober, hal 3.
- _____. 2011. http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata
- _____. 2008. *Profil Desa*. Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan.
- _____. SK Bupati NO. 470/1998. Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Tabanan.
- _____. *Undang-Undang Otonomi Daerah (UU. No. 22/99)*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Cooper, Chris, Jhon Flecher, David Gilbert and StephenWainhill. 1993. *Tourism Principle and Practice*. London : Pitman Publishing.
- Fannel, D. 1999. *Ecotourism : An Introduction*. London: Routledge.
- Kusmayadi dan Sugiarto. 2002. *Metodelogi Penelitian di Bidang Kepariwisataaan*. Jakarta: PT gramedia Pustaka Utama.
- Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan
- Nasir.1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Umar, H. 2003. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Pitana I Gde dan Gayatri Putu G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pitana, I Gde. 2006. Kepariwisataaan Bali dalam Wacana Otonomi daerah. Jakarta: Puslitbang kepariwisataaan.
- Pitana, I Gde 2004. Mispersepsi Pemberdayaan Masyarakat dalam Kepariwisaaan Bali. Bali Post, Maret 2004. Hal 7
- Rangkuti, Freddy. 2004. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rudika, I Nyoman.2003. *Strategi Pengembangan Museum Bali Sebagai Daya Tarik Pariwisata Budaya di Kota Denpasar* (tesis). Denpasar:Universitas Udayana.
- Sucipta, Abdi. 2010. *Strategi Pengembangan Ekowisata di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan* (tesis). Denpasar : Universitas Udayana.

- Umar, H. 2003. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, 2008. Eksotisme Sebagai Modal Dasar Pengembangan Desa Wisata. Diunduh dari <http://tourism.padang.go.id/index.php?tourism=news&id=5>
- Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal. 2-3)
- Inskeep, 1995. *Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach*.
- Soetarso Priasukmana dan R. Mohamad Mulyadin, 2001. *Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah*. Info Sosial Ekonomi Vol 2 No 1.

USAHA PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA BERABAN DALAM PENGELOLAAN TANAH LOT SECARA BERKELANJUTAN

Luh Gede Leli Kusuma Dewi
leli_par@yahoo.com
Dosen Fakultas Pariwisata Unud

Abstract

Tanah lot is a special tourist attraction in Bali that situated in Tabanan Regency. Tanah lot has a long history in terms of its management whereas it was initially managed by private sector and local government. Nowadays the local society that is beraban society has involve in its management. The process of empowering local society has focus on social economic in management of Tanah Lot. This empowerment has increase the welfare and social life of society arounds Tanah Lot there for the awarness and ownership of Beraban society must be maintained for the sustainability of Tanah Lot as a special tourist attraction in Bali and Tabanan particularly.

The research method occurs by descriptif qualitative in purpose to describe and summarize in many condition and situation or social phenomenom in Beraban society that has direct involve in Tanah Lot management.

Key words: Social Economic Empowerment, Sustainable Tourism, And Tourism Management.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki berbagai daya tarik wisata berupa budaya, baik peninggalan sejarah, pemandangan alam maupun kehidupan masyarakat agraris. Beberapa daya tarik wisata yang ada di Tabanan, antara lain: Jati Luh, Kebun Raya Bedugul, Pura Luhur Batukaru, Pura Ulun Danu Beratan, dan Pura Tanah Lot. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali, Tanah Lot merupakan salah satu Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Propinsi Bali selain Kintamani, Bedugul-Pancasari, Palasari, dan Gilimanuk. Tanah Lot dikategorikan sebagai salah satu KDTWK karena Tanah Lot merupakan suatu kawasan yang dijadikan sebagai penyangga pelestarian budaya dan lingkungan hidup di Bali yang harus tetap dilestarikan sehingga pemanfaatan ruang, fasilitas akomodasi, dan fasilitas kepariwisataannya sangat dibatasi.

Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Tanah Lot, selanjutnya disebut Tanah Lot saja, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Jarak yang ditempuh untuk sampai ke Tanah Lot dari Kecamatan Kediri sekitar 13 km, dari kota Tabanan ±18 km, dari kota Denpasar ±30 km. Luas Desa Beraban 629 ha secara administratif, dan terdiri dari 13 banjar dinas dan 15 banjar adat. Adapun 15

banjar adat yang terdapat di Desa Pakraman Beraban yaitu: Engung Pura, Batugaing Kelod, Batugaing Kaja, Beraban, Dukuh, Sinjuana Kaja, Sinjuana Tengah, Sinjuana Kelod, Batanbuah Kelod, Batanbuah Kaja, Gegelang, Ulundesa, Pasti, Kebon, dan Nyanyi. Untuk itu Tanah Lot merupakan bagian dari wilayah Desa Pakraman Beraban, yang selanjutnya akan disebut sebagai Desa Beraban saja.

Selain keindahan pura yang ada ditengah laut, Tanah Lot juga memiliki pesona matahari tenggelam (*sunset*) di ufuk barat yang menambah ketertarikan wisatawan untuk berkunjung. Bertambahnya wisatawan yang berkunjung dari tahun ke tahun, cukup banyak memberikan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Tanah Lot terus meningkat, terbukti pada tahun 2011 lebih dari 2 juta orang yang terdiri dari wisatawan domestik dan manca negara, tepatnya seperti terlihat dalam angka kunjungan tujuh tahun terakhir 2005-2011 (tabel 1.1).

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di KDTWK Tanah Lot Tahun 2005-2011

No	Tahun	Jumlah Wisatawan (jiwa)
1	2005	1.135.399
2	2006	1.452.520
3	2007	1.210.314
4	2008	1.438.356
5	2009	1.854.020
6	2010	2.149.893
7	2011	2.312.252

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan, 2012.

Tanah Lot memperoleh pendapatan bersih tahun 2011 sebesar Rp 14,5 M (tabel 1.2). Pendapatan tersebut didistribusikan kepada Pemerintah Daerah Tabanan, CV. Ary Jasa, Desa Beraban, Desa-desa se-Kecamatan Kediri, serta Pura Luhur Tanah Lot dan sekitarnya.

Tabel 1.2 Jumlah Pendapatan KDTWK Tanah Lot Tahun 2005 sampai 2011

No	Tahun	Penghasilan (Rupiah)
1	2005	2.273.341.400
2	2006	5.512.396.583
3	2007	6.553.617.595
4	2008	8.616.628.242
5	2009	10.656.220.494
6	2010	13.301.422.250
7	2011	14.519.147.750

Sumber : Badan Pengelola KDTWK Tanah Lot, 2012.

Melihat jumlah pendapatan dari Tanah Lot yang selalu meningkat mampu membuat beberapa pihak yang ada di sekitar KDTWK tersebut mulai memberikan perhatian yang lebih terutama masyarakat Beraban yang secara geografis terletak dalam satu lokasi dengan Tanah Lot. Hal tersebut mulai dirasakan oleh masyarakat Beraban sekitar tahun 2000an. Dimana sekitar tahun 1980, Tanah lot baru

dikembangkan oleh pihak swasta yaitu CV. Ary Jasa Wisata yang dimiliki oleh I Gusti Gde Aryadi, selanjutnya disebut Aryadi, diberikan kekuasaan penuh oleh pemerintah untuk mengelola Tanah Lot. Keterlibatan masyarakat hanya sebatas sebagai pedagang yang menjajakan makanan dan minuman saja, pramuwisata, dan pekerja foto keliling serta souvenir di sekitar Tanah Lot untuk mencari nafkah bagi kehidupannya. Jadi masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan Tanah Lot.

Sejak dikelola swasta, masyarakat hanya berpeluang untuk membuka usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata tanpa dilibatkan dalam pengelolaan. Tanah Lot melalui sistem perjanjian kontrak bagi hasil selama kurun waktu tersebut diatas sampai tahun 2011, pendapatan dari retribusi Tanah Lot hanya dinikmati oleh pemerintah dan swasta. Pihak swasta mengadakan kesepakatan atau perjanjian dengan Pemerintah untuk mengelola tertentu dan dapat diperpanjang bila disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebelum berlakunya perjanjian tersebut, masyarakat kurang mendapatkan keuntungan secara material kecuali yang membuka usaha di Tanah Lot. Saat dikelola swasta tampak kurang adanya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan Tanah Lot. Banyak kejadian kriminalitas terjadi di sekitar Tanah Lot, seperti: dibobolnya toko-toko pada pasar seni di malam hari serta wisatawan sering kehilangan barang berharganya saat menikmati panorama, sehingga terkesan tidak mau tahu tentang apapun yang terjadi di Tanah Lot. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya rasa memiliki dari masyarakat dan masyarakat merasa tidak mendapatkan keuntungan dari pengelolaan Tanah Lot, meskipun ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan apabila mencari nafkah di Tanah Lot.

Sejak dilibatkan dalam pengelolaan Tanah Lot, masyarakat mulai diberdayakan baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolanya. Diketahui bahwa proses pemberdayaan itu meliputi pemberdayaan sosial, ekonomi, psikologi dan politik (Scheyvens (2002:60), maka penulis lebih memfokuskan dalam aspek sosial dan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka rumusan permasalahannya adalah: “Bagaimana bentuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Desa Beraban dalam pengelolaan Tanah lot secara berkelanjutan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian diatas adalah untuk mengetahui bentuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Desa Beraban dalam pengelolaan Tanah lot secara berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi pengembangan.
Penelitian ini memberikan kesempatan untuk dapat mengetahui bentuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat Desa Beraban dalam pengelolaan Tanah lot secara berkelanjutan.
2. Manfaat operasional berkaitan dengan kebijakan dan pebisnis pariwisata.
ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah maupun masyarakat lokal dalam keterlibatannya untuk mengelola DTW/DTWK yang berkelanjutan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)

Saat ini pariwisata berbasis masyarakat yang dikenal dengan istilah CBT (*Community Based Tourism*) sangat populer dilakukan dalam membentuk sebuah strategi pembangunan dalam bidang pariwisata. Konsep ini memiliki tujuan untuk melakukan suatu peningkatan intensitas partisipasi masyarakat, sehingga dapat memberikan peningkatan dalam bidang ekonomi serta masyarakat memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola suatu pembangunan dalam bidang pariwisata.

Menurut Kit (2000:4), ada 4 tujuan yang diinginkan dengan berlakunya konsep pariwisata yang berbasis masyarakat, yaitu :

1. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi untuk meningkatkan dan atau memperbaiki konservasi alam atau sumber daya budaya, termasuk keanekaragaman hayati.
2. Pariwisata berbasis masyarakat harus berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal sehingga meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi masyarakat.
3. Pariwisata berbasis masyarakat harus melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
4. Pariwisata berbasis masyarakat mempunyai tanggung-jawab kepada wisatawan untuk memberikan produk yang peduli terhadap lingkungan alam, sosial maupun budaya.

Pariwisata yang berbasis masyarakat harus memperhatikan keterlibatan masyarakat lokal yang merupakan syarat mutlak untuk tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan tersebut harus dilakukan oleh masyarakat setempat yang hidup dan kehidupannya dipengaruhi oleh pembangunan tersebut (Pitana, 2002:55), sehingga akan mengarah pada sistem pengelolaan yang berbasis masyarakat sebagai pelaku utama dalam pariwisata.

Menurut Suansri (dalam Nurhidayati, 2004) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya. CBT merupakan alat pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan. Dengan kata lain CBT merupakan alat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Aspek utama pengembangan CBT berupa 5 dimensi, yaitu :

1. Dimensi ekonomi, dengan indikator berupa adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata;
2. Dimensi sosial dengan indikator meningkatnya kualitas hidup; peningkatan kebanggaan komunitas; pembagian peran yang adil antara laki-laki, perempuan, generasi muda, dan tua; membangun penguatan organisasi komunitas;
3. Dimensi budaya dengan indikator berupa mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, membantu berkembangnya pertukaran budaya, budaya pembangunan melekat erat dalam budaya lokal;
4. Dimensi lingkungan, dengan indikator mempelajari *carrying capacity area*, mengatur pembuangan sampah, meningkatkan kepedulian akan perlunya konservasi;
5. Dimensi politik, dengan indikator: meningkatkan partisipasi dari penduduk lokal, peningkatan kekuasaan komunitas yang lebih luas, menjamin hak-hak dalam pengelolaan sumber daya alam.

Melalui pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat diharapkan suatu pembangunan daya tarik wisata mampu memenuhi prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dalam ekologis, ekonomi dan sosial budaya. Sehingga pada setiap pembangunan kepariwisataan mampu memberikan manfaat dalam bidang perekonomian yang didistribusikan secara adil, terutama pada masyarakat lokal yang berada pada kawasan tersebut.

Agar manfaat dari sebuah pembangunan kepariwisataan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal dan tetap berkelanjutan, maka perlu dilibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan. Masyarakat lokal adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan terhadap lingkungannya berdasarkan pengalaman yang diturunkan dari generasi ke generasi. Atas pengetahuan dan pengalaman tersebut maka masyarakat setempat memiliki kesadaran untuk mengembangkan berbagai hal yang ramah lingkungan dan dapat diterima secara sosial budaya dan religi.

Dengan konsep pariwisata yang berbasis masyarakat, maka diharapkan masyarakat dapat berperan secara aktif, dan diperlukannya usaha-usaha yang memberdayakan masyarakat lokal secara sistematis sehingga strategi pembangunannya memiliki pondasi yang kuat, serta manfaat bagi masyarakat setempat lebih terjamin serta sebuah pembangunan pariwisata dapat berkelanjutan.

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa prinsip dasar CBT adalah membuka ruang dan peluang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata di daerahnya sehingga mereka ikut mendapatkan keuntungan secara ekonomi serta ikut bertanggung jawab secara moral dalam menjaga dan melestarikan sumber daya pariwisata tersebut beserta fasilitasnya.

Prinsip CBT dalam pengelolaan pariwisata adalah selalu melibatkan masyarakat lokal dalam merencanakan serta mengelolanya, memberikan keuntungan pada masyarakat lokal, melibatkan seluruh lapisan masyarakat bukan perorangan, menjaga keberlanjutan lingkungan sekitarnya, peduli terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal, tetap memperhatikan dampak yang muncul di masyarakat dengan adanya pengaruh yang dibawa oleh wisatawan.

Konsep-konsep di atas diharapkan mampu mengarahkan peneliti dalam membuat batasan-batasan untuk menganalisis pola *Community Based Tourism* (CBT) di Tanah Lot. Sehingga mampu menggambarkan bentuk pemberdayaan masyarakat Desa Pekraman Beraban khususnya pemberdayaan sosial dan ekonomi dalam mengelola Tanah Lot dengan konsep CBT.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat (dalam Najib, 2005), memiliki 2 pengertian yaitu *to give power or authority* dan *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Pemberdayaan merupakan suatu paradigma baru dalam konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial.

Buchori (2003), mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses dimana individu, organisasi atau kelompok yang dalam kondisi tidak berdaya (*powerless*) menjadi sadar dan tahu (*having knowledge*) akan dinamika kekuasaan yang bekerja dalam konteks kehidupan mereka, membangun ketrampilan dan kapasitas

untuk memperoleh kontrol pada kehidupan mereka, menjalankan (*exercise*) kontrol tanpa mengganggu hak-hak orang lain, dan mendukung upaya pemberdayaan individu atau kelompok lain dalam masyarakat.

Menurut Scheyvens (2002:60), tentang Kerangka Pemberdayaan Masyarakat (*Empowerment of Community Framework*) yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pemberdayaan Ekonomi (*Economic Empowerment*), dimana pariwisata memberikan keuntungan yang berkelanjutan terhadap masyarakat lokal. Keuntungan tersebut dirasakan oleh masing-masing rumah tangga yang telah diberdayakan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan banyaknya rumah-rumah yang permanen untuk dihuni karena pendapatan rumah tangga meningkat, anak-anak mampu bersekolah, dan lain-lain.
2. Pemberdayaan Psikologis (*psychological empowerment*), dengan diberdayakannya masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata tersebut maka secara tidak langsung masing-masing individu merasakan adanya peningkatan penghargaan terhadap dirinya (*self-esteem*) melalui pengenalan akan adat istiadat, budaya, dan sumber daya alam maupun manusia yang mulai diketahui oleh dunia luar. Selain itu adanya peningkatan status sosial dari individu setelah adanya akses terbukanya sebuah lapangan pekerjaan yang berkaitan dengan pariwisata.
3. Pemberdayaan sosial (*social empowerment*), adanya peningkatan kehidupan sosial masyarakat melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh masing-masing keluarga dan individu yang mendukung pembangunan pariwisata tersebut.
4. Pemberdayaan Politik (*political empowerment*), setiap struktur dan lapisan politik masyarakat ditunjukkan dengan adanya keinginan dan kebutuhan dari semua kelompok masyarakat yang dilibatkan sehingga semua kelompok masyarakat merasakan keuntungannya. Adapun kelompok masyarakat tersebut berupa kelompok wanita yang kita kenal dengan PKK, Kelompok muda yang dikenal dengan Karang Taruna, dan lain-lain.

Adapun usaha yang dilakukan untuk melakukan suatu pemberdayaan masyarakat diperlukan beberapa komponen sebagai berikut (Pitana; 2011;6):

1. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana agar masyarakat lokal semakin berdaya.
2. *Motivating*, yaitu memotivasi masyarakat agar tergerak untuk berpartisipasi.
3. *Educating*, yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mengetahui apa yang terjadi dan menyadari pentingnya sebuah program pembangunan.
4. *Encouraging*, yaitu mendorong supaya masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan.
5. *Protecting*, yaitu melindungi masyarakat yang lemah dengan berbagai kebijakan dan strategi proteksi, tidak membiarkannya bersaing di pasar bebas.
6. *Empowering*, yaitu meningkatkan potensi dan kapabilitas masyarakat untuk bisa berperan dalam pembangunan.
7. *Oportuning*, yaitu mengembangkan peluang/kesempatan agar masyarakat bisa berpartisipasi.
8. *Devoluting*, menyerahkan sebagian kewenangan kepada masyarakat sehingga mereka bisa mengambil keputusan.

Melalui pemberdayaan diharapkan masyarakat tidak hanya ingin menuntut haknya untuk dilibatkan dalam sebuah pembangunan pariwisata namun masyarakat tersebut harus memiliki kemampuan dan keahlian yang mendukung keterlibatannya dalam pembangunan pariwisata. Dengan kata lain, melalui suatu usaha pemberdayaan

diharapkan masyarakat mampu membuat keputusan dan mempresentasikan gagasan-gagasannya sehingga masyarakat tersebut memiliki posisi tawar yang memadai ketika berhadapan dengan *stakeholders* yang lain (Arida, 2009).

2.3 Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yang dikedepankan oleh WTO (Pitana, 2002:53), terdapat 3 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

1. *Ecological sustainability*

Sebuah pembangunan pariwisata berkelanjutan harus didukung Keberlanjutan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam (ekologi) sebagai pendukung. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan fisik akibat aktivitas wisatawan *Ecological sustainability*

Sebuah pembangunan pariwisata berkelanjutan harus didukung Keberlanjutan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam (ekologi) sebagai pendukung. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mampu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan fisik akibat aktivitas wisatawan melalui penentuan kapasitas yang terbatas (*carrying capacities*) pada daya tarik wisata tersebut.

2. *Economic sustainability*

Keberlanjutan dalam bidang ekonomi yang mampu menguntungkan masyarakat lokal, wisatawan, dan pelaku bisnis pariwisata dalam daya tarik wisata tersebut.

3. *Social and cultural sustainability*

Keberlanjutan dalam bidang sosial, dimana diharapkan masyarakat lokal berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Baik itu dalam merencanakan, menjalankan, dan mengawasi jalannya sebuah pembangunan tersebut, sehingga masyarakat mampu memilah hal-hal baik maupun buruk yang masuk dalam tatanan sosial masyarakatnya. Keberlanjutan budaya akibat interaksi dengan wisatawan yang memiliki gaya hidup, kebiasaan dan tradisi yang berbeda dengan masyarakat lokal. Diperlukan tindakan pencegahan terhadap distorsi budaya yang dimiliki masyarakat lokal sehingga budaya lokal tetap berkelanjutan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Desa Pakraman Beraban yang mewakili desa yang letaknya paling dekat dengan Tanah Lot dan merupakan desa yang paling banyak mendapatkan imbas positif dari pendapatan yang diterima oleh Tanah Lot. Lokasi terletak di kecamatan Kediri, ±13 km dari kota Tabanan, merupakan bagian dari Kabupaten Tabanan dalam ruang lingkup Propinsi Bali.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif, yaitu berupa uraian data informasi yang dijabarkan secara rinci dan jelas untuk menarik suatu simpulan. Data tersebut berupa hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan lain sebagainya.

Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dihitung serta diolah menggunakan teori statistik untuk menarik simpulan. Adapun data ini seperti: data kunjungan wisatawan ke Tanah Lot dari tahun 2005 sampai 2011, data

pendapatan Tanah Lot dari tahun 2005 sampai 2011, jumlah pegawai, jumlah warga lokal yang bekerja di Tanah Lot, jumlah kontribusi finansial Tanah Lot ke Desa Pakraman Beraban atau stakeholder dan lain sebagainya.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang merupakan data dari sumber informan berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung pada lokasi penelitian melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Data primer ini berupa catatan hasil wawancara, hasil observasi ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian. Data tersebut adalah data yang tidak berbentuk angka tetapi berupa kata, kalimat, skema, dan gambar yang merupakan kata kunci dalam penelitian yang dimaksud. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh orang lain atau instansi yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan data penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain : tape recorder, catatan kecil, serta alat tulis untuk mencatat hasil observasi saat melaksanakan wawancara. Dimana peneliti tetap berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyajikan data, serta membuat simpulan atas penelitiannya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara mendalam melalui metode *purposive sampling*, dan metode dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan tehnik *purposive sampling* yang didasarkan pada ciri dan sifat dari sumber data yang dipandang mempunyai kemampuan dan keahlian yang mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dimana peneliti dapat menentukan dan memilih subyek penelitian tersebut sebagai informan kunci.

Adapun subyek dari penelitian ini adalah tokoh-tokoh masyarakat adat seperti: kelihan adat Desa Beraban dan kelihan banjar adat dari lima banjar terdekat yaitu: Banjar Enjung Pura, Batugaing Kelod, Batugaing Kaja, Beraban, dan Dukuh. Lima masyarakat adat dari masing-masing banjar diatas yang langsung terlibat dalam pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Selain itu pemilik CV. Ary Jasa dan Ketua Badan Operasional Tanah Lot yang berkompeten atas pengelolaan Tanah Lot sebelum dan sesudah melibatkan masyarakat Desa Pakraman. Jadi dapat dikatakan jumlah subyek penelitian adalah 13 orang.

3.5 Analisis Data

Adapun teknik analisis data melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Klasifikasi data, hasil wawancara yang telah didapat itu kemudian dipahami makna apa yang dimaksud dalam wawancara tersebut. Makna yang mendalam akan di dapat melalui wawancara yang mendalam (Bungin, 2003). Data yang didapat tersebut kemudian dipilah-pilah, jika sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti.
- b. Penyajian data, menyajikan data yang telah diklasifikasikan melalui metode deskriptif atau penggambaran data secara narasi agar mudah dipahami dan didukung dengan bagan maupun grafik yang mewakili hasil penelitian serta hasil

wawancara mendalam, sehingga terjawablah rumusan masalah yang dipertanyakan oleh peneliti. Dimana sebelumnya data tersebut diolah, ditafsirkan, dan dimaknai.

Penarikan kesimpulan, menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis secara cermat dan mendalam terhadap data-data yang diperoleh, sehingga terjawablah permasalahan yang dihadapi peneliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Pengelolaan Tanah Lot

Dari sudut pandang keterlibatan masyarakat, Tanah Lot memiliki sejarah yang cukup panjang dalam sistem pengelolaannya yang erat kaitannya dengan pembagian hasil dari pendapatan Tanah Lot tersebut. Diketahui bahwa pengelolaan Tanah Lot pertama kali dikelola oleh pihak swasta (CV. Ary Jasa Wisata) dengan pemiliknya bernama I Gusti Gde Aryadi. Beliau pertama diserahkan untuk dikelola oleh pemerintah. Beliau memulai dari awal dengan melakukan promosi untuk memperkenalkan Tanah lot serta menyediakan sarana akomodasi dan restoran. Lama-kelamaan Tanah Lot tertata dengan baik dan tingkat kunjungan wisatawan semakin bertambah. Adapun pada masa itu pendapatan Tanah Lot hanya dirasakan oleh swasta dan pemerintah tanpa dirasakan oleh masyarakat sekitar terutama masyarakat Beraban secara langsung maupun tidak langsung.

Namun sekitar tahun 1999 Indonesia mengalami perubahan besar-besaran dalam pemerintahan yang berdampak kepada semua sektor kehidupan, khususnya disini adalah tentang pengelolaan Tanah Lot yang mulai diperhatikan oleh Desa Adat Beraban yang memiliki wilayah Tanah Lot. Pada Tahun 2000 terjadi pergolakan dalam masyarakat Beraban yang menuntut ingin mengelola Tanah Lot yang merupakan bagian dari wilayah Desa Beraban. Sehingga pemerintah Kabupaten Tabanan selaku pembuat kebijakan memberikan jalan tengah dengan membentuk badan pengelola yang terdiri dari 3 pihak yaitu: Pemerintah, Desa Pakraman, dan swasta (CV. Ary Jasa Wisata) berdasarkan surat perjanjian dengan nomor : 01/HK/2002. Kemudian dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 207 tahun 2004 tentang pembentukan badan pengelola obyek wisata Tanah Lot dan perjanjian tersebut berlaku sampai tahun 2011.

4.2 Pemberdayaan Masyarakat Beraban dalam Pengelolaan Tanah Lot

Sejak tahun 2004 sampai 2011, masyarakat mulai ikut terlibat dalam pengelolaan Tanah Lot. Adapun keterlibatan masyarakat Beraban dalam pengelolaan Tanah Lot dikategorikan menjadi 2 keterlibatan yaitu langsung dan tidak langsung dalam pemberdayaan. Dimana pemberdayaan yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dari awal perencanaan sampai pengambilan keputusan dalam pengelolaan Tanah Lot. Masyarakat yang langsung terlibat adalah Bendesa Adat Beraban dan beberapa masyarakat yang masuk terlibat sebagai karyawan atau pegawai dalam badan pengelola Tanah Lot. Diketahui bahwa mereka yang masuk sebagai pegawai pada badan pengelola adalah seluruhnya berasal dari masyarakat Beraban yang melalui proses pembukaan lowongan, seleksi sampai perekrutan sesuai dengan bidang yang dicari oleh badan pengelola.

Untuk keterlibatan secara tidak langsung, seluruh lapisan masyarakat Beraban ikut berperan aktif dalam pengelolaan Tanah Lot, seperti dilibatkannya berbagai lapisan masyarakat Beraban dalam kegiatan promosi Tanah Lot yang diadakan setiap

satu tahun sekali untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Tanah Lot. Adapun kegiatan itu berupa:

1. Tari Cak Kolosal tahun 2006, merupakan salah satu pagelaran yang disuguhkan pada pengunjung Tanah Lot yang berjumlah 5000 orang dan tercatat dalam Museum Rekor Indonesia. Salah satu tujuan diadakannya pagelaran ini adalah untuk meningkatkan citra dan mempromosikan Tanah Lot (Sujana, 2009).
2. Festival Budaya Tanah Lot 2010 (*Tanah Lot Art Festival/TLAF*), Tanah Lot Art Festival adalah gelar budaya yang ditampilkan di Tanah Lot dalam upaya manajemen pengelola Tanah Lot melestarikan warisan budaya masyarakat yang diperkenalkan kepada dunia internasional sekaligus merupakan media promosi Tanah Lot. Adapun kegiatan ini banyak melibatkan berbagai lapisan masyarakat Beraban baik tingkat karang taruna untuk terlibat dalam lomba layang-layang, kelompok baleganjur dan kelompok PKK untuk berbagai lomba makanan khas seperti *klepon*.

4.3 Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Beraban dalam Pengelolaan Tanah Lot yang Berkelanjutan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses yang membantu masyarakat untuk memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik dan terus berkembang secara berkelanjutan sehingga mampu berperan aktif dalam pembangunan dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat Desa Pakraman Beraban pada pengelolaan Tanah Lot sebagai salah satu kawasan daya tarik wisata khusus yang ada di Bali. Berikut penjelasan dari pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Beraban (Scheyvens, 2002: 60) :

4.3.1 Pemberdayaan Ekonomi

Sesuai dengan kerangka pemikiran tentang pemberdayaan ekonomi yang dimaksud disini adalah bahwa pariwisata mampu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat lokal yang berupa uang yang diperoleh dan dibagikan kepada tiap-tiap rumah tangga di dalam masyarakat. Dalam hal ini masyarakat beraban memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan Tanah Lot melalui Lembaga Perkreditan Desa (LPD) kepada rekening masing-masing banjar adat. Adapun uang tersebut yang mereka terima setiap bulannya dan laporan tertulisnya ditembuskan kepada setiap kelihan banjar adat, untuk disampaikan kepada warga banjar adat mereka melalui rapat bulanan atau 6 bulan sekali yang diadakan oleh masing-masing banjar adat. Adapun pendapatan tersebut digunakan untuk meringankan beban masing-masing kepala keluarga dalam memenuhi kewajibannya sebagai bagian dari banjar adat. Salah satunya, uang tersebut digunakan untuk pembiayaan upacara agama di masing-masing banjar atau untuk kebutuhan mendesak dari banjar adat. Sehingga secara tidak langsung warga masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan iuran untuk membiayai hal tersebut di atas.

Hal ini menyebabkan masyarakat diberi keringanan dengan adanya keterlibatannya secara tidak langsung dalam pengelolaan Tanah Lot dalam menjalankan kewajiban sebagai warga masyarakat adat. Dengan adanya keringanan tersebut sehingga berdampak terhadap pengelolaan keuangan masing-masing rumah tangga dapat menjadi lebih baik. Sebelum mereka terlibat, pengeluaran untuk membayar iuran kepada banjar adat adalah salah satu bentuk pengeluaran mereka.

Namun sekarang tidak lagi karena sudah ada pendapatan lain dari Tanah Lot, hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Begitu juga untuk masyarakat yang terlibat langsung diberdayakan sebagai pegawai badan pengelola dapat membantu perekonomian keluarga mereka masing-masing secara langsung. Proses pemberdayaan ekonomi tercipta melalui usaha yang dilakukan oleh pihak manajemen operasional dalam memotivasi mereka untuk terlibat (*motivating*). Pemberian pelatihan bahasa Inggris kepada ibu-ibu yang menjaga art shop dengan tujuan supaya mereka dapat langsung berkomunikasi dengan wisatawan asing sehingga dapat membantu melancarkan penjualan barang dagangan mereka serta secara tidak langsung pendapatan mereka bertambah. Usaha ini merupakan suatu proses pemberdayaan yang menciptakan suasana agar masyarakat lokal semakin berdaya (*enabling*). Melalui program pelatihan Inggris tersebut, maka masyarakat dibangkitkan kesadarannya untuk mengetahui apa yang terjadi dan menyadari pentingnya suatu program dalam pembangunan pariwisata (*educating*).

4.3.2 Pemberdayaan Sosial

Diketahui bahwa kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan masih membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan kita selama hidup ini. Untuk itu dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat harus mampu menjalin hubungan yang harmonis sehingga terjadi keseimbangan dalam kehidupan.

Dalam hal ini pemberdayaan dalam bidang sosial yang dimaksud adalah bahwa adanya konsep yang memfokuskan perhatian pada peningkatan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan Tanah Lot sehingga memberikan keuntungan untuk mengembangkan kehidupan sosial masyarakat Desa Pakraman Beraban. Pada masyarakat Desa Pakraman Beraban, sektor pariwisata sudah tidak lagi sebagai suatu hal yang baru di mata mereka karena diketahui sejak tahun 80-an Tanah Lot sudah mulai dikenal oleh wisatawan dan masyarakat Beraban sebagian besar juga sudah bekerja dan berwirausaha tidak jauh dari sektor pariwisata.

Sebelum mereka mulai berpartisipasi untuk ikut serta dalam mengelola Tanah Lot, sebagian masyarakat yang dekat dengan Tanah Lot sudah membuka usaha yang erat kaitannya dengan pariwisata seperti : restoran, penginapan-penginapan kecil, dan *art shop* di depan rumah mereka. Tetapi tidak semua masyarakat menikmati keuntungan dari sektor pariwisata ini. Setelah adanya keterlibatan Desa Pakraman Beraban dalam pengelolaan Tanah Lot tersebut, terlihat mulai terjadinya keseimbangan dan perhatian yang cukup besar terhadap masyarakat tersebut, terbukti dengan adanya:

1. Semua pegawai atau karyawan dari manajemen operasional Tanah Lot adalah warga masyarakat Beraban,
2. Sebagian besar warga masyarakat yang terlibat langsung untuk membuka usaha di Tanah Lot seperti: *art shop*, pedagang acung, tukang foto Polaroid, dan lain-lain. Adapun anak-anak yang menjadi pedagang acung dibagi menjadi 2 kelompok, mereka berjualan secara bergilir tiap harinya setelah pulang sekolah. Selain itu para pedagang di berbagai *art shop* yang ada dan sebagian besar ibu-ibu, diberikan pelatihan bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dengan wisatawan asing,

3. Para pelaku usaha di Tanah Lot mengikuti program-program Kelompok Sadar Wisata dan Sapta Pesona untuk meningkatkan pelayanan yang baik dalam pengelolaan Tanah Lot,
4. Dan yang terakhir adalah seluruh warga masyarakat Desa Pakraman Beraban menerima pendapatan tambahan pada masing-masing Kepala Keluarga melalui banjar sehingga keuntungan itu mampu meringankan warga untuk memenuhi kewajiban mereka dalam melakukan kegiatan adat seperti: pembangunan dan piodalan di Pura Tri Khayangan, perbaikan bale banjar di masing masing banjar adat, serta ada yang sampai mampu membeli gong untuk masing-masing banjar mereka tanpa dipungut iuran.

Berdasarkan kegiatan di atas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Pakraman Beraban dalam bidang sosial sudah dilakukan terbukti dari hal di atas yang mampu membantu masyarakat Beraban dalam meningkatkan dirinya untuk mensukseskan usaha mereka dalam bidang pariwisata serta mengurangi beban mereka yang tidak lagi menanggung beban dari berbagai iuran dalam membangun desanya secara umum. Serta adanya hubungan yang baik antar pedagang *art shop* tersebut dan kelompok anak-anak yang saling menghargai untuk dibagi waktu mereka dalam berjualan di sekitar lingkungan Tanah Lot. Adapun usaha-usaha diatas dilakukan oleh pihak manajemen dengan tujuan mendorong masyarakat agar tergerak untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan pariwisata (*encouraging*) di Tanah Lot.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Bentuk pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Desa Pakraman Beraban yang terlibat dalam pariwisata yaitu :

1. Pemberdayaan ekonomi, dimana masyarakat dapat memberikan keuntungan materiil berupa pendapatan tambahan yang dapat membantu perekonomian keluarga mereka masing-masing. Pemberdayaan psikologis, masyarakat merasa bangga dapat terlibat secara langsung dalam pengelolaan Tanah Lot, hal ini dirasakan oleh masyarakat yang terlibat langsung seperti para supervisor yang bekerja di manajemen operasional Tanah Lot.
2. Pemberdayaan sosial, dengan terlibatnya masyarakat dalam mengelola Tanah Lot dapat mendatangkan keuntungan dan kesuksesan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dalam bidang pariwisata sehingga dapat meningkatkan hubungan yang baik antar individu atau antar keluarga di masyarakat Beraban untuk saling bekerjasama dalam menjaga citra positif Tanah Lot.

Adapun usaha pemberdayaan tersebut berupa: *enabling, motivating, educating, encouraging, empowering, oportuning* dan *devoluting*. Semua ini bertujuan untuk membuat masyarakat berdaya dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki melalui tindakan sehingga tercipta kemandirian dalam pengelolaan untuk mendapatkan manfaat yang berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Perlu adanya peningkatan partisipasi dan pemberdayaan yang bersifat dinamis ke arah yang lebih baik, dalam artian bentuk partisipasi dan pemberdayaan tersebut tidak hanya sekedar memberikan keuntungan materiil tetapi juga mampu meningkatkan sumber daya manusia masyarakat setempat sehingga mampu

mengikuti perkembangan pariwisata di masa yang akan datang, sehingga pengelolaan Tanah Lot yang merupakan warisan budaya dapat dilestarikan dan keberlanjutannya dapat dinikmati oleh generasi penerus.

2. Dengan bertambahnya pemasukan materiil bagi masyarakat Desa Beraban, pihak pemerintah sebaiknya terus mengadakan kontrol dengan menentukan pola-pola baku dalam hal ini pemerintah sebagai salah satu pembuat kebijakan. Untuk mampu menjaga dan meningkatkan kualitas, kelestarian dan keseimbangan dalam pengelolaan Tanah Lot sehingga dapat berkelanjutan serta dapat dijadikan contoh oleh masyarakat desa pekraman lainnya untuk terlibat dalam pengelolaan daya tarik wisata yang ada di daerahnya.

KEPUSTAKAAN

- Apsari, Luh Oka Puji. 2005. "Studi Pengelolaan Obyek Wisata Alam Bukit Jambul Secara Berkelanjutan di Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem" (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Aref, Fariborz dan Ma'rof B Redzuan, 2008. *Barriers to Community Leadership Toward Tourism Development in Shiraz, Iran*. European Journal of Social Sciences - Volume 7, Number 2 (2008).
- Arida, Sukma Nyoman. 2009. *Meretas Jalan Ekowisata Bali (Proses Pengembangan, Partisipasi Lokal Dan Tantangan Ekowisata Di Tiga Desa Kuno Bali)*. Denpasar: Udayana University Press.
- _____. 2011. *Profil Desa Beraban*. Tabanan: Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Liu, Zhenhua. 2003. 'Sustainable Tourism Development: A Critique'. *Journal of Sustainable Tourism* Vol 11 (6): 459-475
- Najib, Ufi. 2005. "Pola Pemberdayaan Masyarakat Desa *Pekraman* Dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Sebagai Obyek Wisata Budaya di Bali" (tesis). Denpasar: Universitas Udayana.
- Pitana, I Gde. 1999. *Community Management dalam Pembangunan Pariwisata, Analisis Pariwisata*. Volume 2 nomor 2 halaman 75-77.
- _____. 2002. *Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisata Bali*. Denpasar: PT. The Works.
- _____. 2011. 'Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata', dalam I Nyoman Darma Putra dan I Gde Pitana (ed). *Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata*, pp: 1-27. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Putra, I Nyoman Darma dan I Gde Pitana. 2010. *Pariwisata Pro-Rakyat Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Scheyvens, Regina, 2002. *Tourism for Development (Empowering Communities)*, England: Pearson Education Asia Pte Ltd.
- Sujana, I Made, 2009. "Persepsi Wisatawan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kunjungan Wisatawan ke Daya Tarik Wisata Tanah Lot Tabanan Bali"(tesis). Denpasar: Universitas Udayana.

KOMODIFIKASI INFORMASI PARIWISATA BUDAYA FUNGSI DAN MAKNA UPACARA MEMASUKI USIA DEWASA DI JEPANG DAN BALI : PERSPEKTIF LINTAS BUDAYA

I Made Sendra
sendramade65@gmail.com
Dosen Fakultas Pariwisata Unud

Abstract

The study of commodification of cultural tourism information using cross-cultural perspective aims to develop the mutual understanding between two countries. The tourist guides having role as cultural mediator and transmitters of tourism informations develop narrative by utilizing parallel dichotomous symbolism between Japanese and Balinese culture. This approach aims to find out the harmonization or the similarities of cultural element between host-guest that is organized into commodification information to be more attractive accord with tourist expectation and easierly understand as well. Developing narrative is conducted due to the Japanese tourist's psychographic i.e. psychocentric tourist that is they are less adventurous, home loving and prefer familiar surrounding and safety and not concern with on-stage authenticity.

Key words : Commodification, Cross-Cultural Understanding, Psychographic, Psychocentric, On-Stage Authenticity.

I. PENDAHULUAN

Seorang pramuwisata diharuskan untuk memiliki pengetahuan lintas budaya. Masyarakat Jepang dan masyarakat Bali memiliki sikap dan tingkah laku keagamaan bersifat religius-magis. Hal ini tercermin dalam berbagai upacara (ritual) yang datang setiap tahun maupun setiap enam bulan sebagai pencerminan sikap dan tingkah laku keagamaan. (Lihat Anwar, 2000:14-15). Makna dan fungsi sosio-religi dari upacara memasuki usia dewasa merupakan manifestasi dari keanekaragaman kepercayaan masyarakat yang terbungkus oleh adat kebiasaan dan tradisi masyarakat.

Makna dan fungsi sosio-religi dari upacara memasuki usia dewasa tidak bisa dilepaskan dari agama dan sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jepang dan Bali. Menurut Miyake Hitoshi (1980:63-71), menjelaskan bahwa sistem kepercayaan yang dianut di Jepang sebelum masuknya agama Budha disebut dengan agama rakyat seperti Shinto. Pada umumnya Shinto dianggap sebagai agama asli orang Jepang, yaitu suatu sistem kepercayaan animistik yang bersumber pada pemujaan terhadap arwah (roh) nenek moyang yang eksistensinya sudah ada sejak zaman dahulu.

Pelaksanaan upacara memasuki usia dewasa pada awalnya adalah upacara penghormatan terhadap roh/arwah yang ada di dalam tubuh manusia sebagai dasar dari agama Shinto. Upacara penghormatan terhadap roh di dalam tubuh manusia dilakukan sepanjang siklus kehidupan manusia Di Bali juga mengenal upacara yang di sebut dengan *menek daha* yaitu upacara memasuki usia dewasa. Upacara ini

merupakan bagian dari pelaksanaan upacara *manusa yadnya*, yaitu upacara yang khusus dilaksanakan berkaitan dengan siklus kehidupan manusia.

Tulisan ini akan difokuskan pada dua pokok permasalahan tentang upacara *seijin shiki* dan upacara *menek daha* sebagai suatu fenomenologi tradisi dan budaya, antara lain: (1) Bagaimanakah komodifikasi fungsi dan makna upacara memasuki usia dewasa dalam masyarakat Jepang dan Bali?, (2) Apakah unsur-unsur persamaan (harmonisasi) fungsi dan makna upacara tersebut dalam masyarakat Jepang dan Bali?

II. KERANGKA KONSEP

Menurut Piliang (2004: 21), komodifikasi (*commodification*), sebagai sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditas, sehingga menjadi komoditi. Secara evolusi, Greenwood (dalam Pitana, 2005) menyebutkan bahwa hubungan antara wisatawan dengan masyarakat lokal menyebabkan terjadinya proses komoditisasi dan komersialisasi dari unsur-unsur kebudayaan, seperti kesenian, sistem kepercayaan (Soekanto, 1982), sehingga memunculkan istilah komodifikasi budaya. Dengan demikian, komodifikasi budaya diasosiasikan dengan proses komersialisasi (kapitalisasi) budaya dimana objek, kualitas dan simbol-simbol budaya dijadikan sebagai produk (komoditi) untuk dijual di pasaran. Untuk meneliti komodifikasi fungsi dan makna sosioal-religius upacara memasuki usia dewasa di Jepang dan di Bali dianalisis dari konsep dinamika keyakinan masyarakat Jepang dan Bali bersifat dualistis yakni bersifat religius-magis. (Kusunoki dalam Anwar, 2001:27). Dimensi religius berkaitan dengan gerak hati atau emosi keagamaan yang bersifat sakral (suci), berorientasi pada kepentingan di alam akhirat, sedangkan dimensi magis berkaitan dengan emosi keagamaan yang diwarnai oleh pamerih untuk mendapatkan pertolongan atau penyelamatan dari kekuatan gaib.

Untuk menjelaskan fungsi dan makna dua unsur religi, unsur itu bisa ditempatkan dalam suatu konteks sistem atau subsistem yang lebih kompleks. Oleh karena itu, untuk menganalisis fungsi dan makna upacara memasuki usia dewasa dalam masyarakat Jepang dan Bali dapat dilakukan melalui pendekatan pemahaman silang budaya dengan mencari unsur-unsur harmonisasi diantara dua budaya tersebut untuk dijadikan sebuah komodifikasi produk. (Reisinger, 2003:121; Watkins,2006; Norman dan Pettersen,2008). Selanjutnya fungsi dan makna unsur-unsur religi ditempatkan dalam sistem yang lebih luas sehingga dapat diungkapkan praktek-praktek sosio religi yang melanggengkannya, memahami motifnya. Analisis fungsionalisme dapat menjelaskan hubungan sebab dan akibat yang menjadi inti mekanisme suatu sistem sehingga dapat memberikan pemahaman tentang hal-hal yang bersifat unik atau khas pada waktu atau tempat tertentu. (Kuper,, 2000:383-385; Brown,1965).

Peranan pramuwisata menyampaikan informasi, memberikan penjelasan, dan menyusun narasi/cerita. Dengan kata lain, peran mereka sebagai sumber untuk bertanya, guru atau instruktur, penunjuk jalan, dan duta wisata (*ambassador*) dari suatu negara (Dahles, 2002; Pond, 1993; Holloway, 1981). Pramuwisata menjadi ujung tombak yang berhadapan langsung dengan wisatawan untuk penciptaan citra (*tourist gaze*) (Urry,1990). Penciptaan *tourist gaze* berkaitan dengan bagaimana wisatawan menginterpretasi apa yang mereka lihat di objek wisata (*something to see*), melibatkan mereka untuk melakukan sesuatu (*something to do*), mereka bisa membeli cindra mata/kenang-kenangan (*something to buy*), dan mengambil hikmah atau pelajaran dari penjelasan pramuwisata (*something to learn*). Semua ini bisa dilakukan

oleh pramuwisata yang memiliki profesionalisme tinggi, pengetahuan tentang *cross-cultural* dari budaya lokal (*local culture*). (Cohen et al., 2002) dan kemampuan membangun narasi (*developing narrative*) dengan memparalelkan dikotomi simbol-simbol (*parallel dichotomous symbolism*) dari dua budaya yang berbeda.

III. PEMBAHASAN

3.1 Agama dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Jepang dan Bali

Shinto dianggap sebagai agama asli orang Jepang. Agama ini merupakan suatu sistem kepercayaan yang bersumber pada pemujaan arwah (roh) nenek moyang, yang dianggap sudah ada sejak zaman dahulu (Nakane, 1967:1). *Shinto* juga disebut agama-tradisi karena didalam ajaran *Shintoo* dipandang sebagai bagian dari tradisi dan adat-istiadat daripada sebagai ajaran agama Orang Jepang percaya bahwa benda-benda di sekitar alam mempunyai (roh/arwah) dan keberadaan mahluk-mahluk halus, dianggap bisa melindungi ataupun merugikan kehidupan manusia. Fenomenologi religi seperti ini digolongkan dalam agama atau kepercayaan primitif. (Emiko, 1997:57).

Istilah *Shinto* mulai dipakai setelah agama Budha masuk ke Jepang dari China melalui Korea (538 Masehi). Istilah ini merupakan analogi dari *Butsudo* (jalan Budha), sehingga istilah *Shinto* artinya jalan Dewa, diciptakan orang Jepang untuk mempertegas eksistensi kepercayaan-kepercayaan asli yang merupakan warisan nenek moyang mereka dimasa lampau. Kepercayaan-kepercayaan asli tersebut pada awalnya secara konseptual belum tersistematisasi dengan baik bahkan eksistensinya sebagai agama asli orang Jepang belum disadari, melainkan hanya dianggap sebagai bagian dari tradisi kehidupan sehari-hari.

Dalam perkembangan selanjutnya, sejak zaman Nara (710-794), muncul fenomena kepercayaan yang disebut dengan *Shumbutsu Shuugoo*, yaitu akulturasi antara *Shintoo* dengan Budha. Akulturasi ini terjadi karena adanya adaptasi ajaran *Shintoo* yang menyesuaikan diri (*conformity*) dengan Budha. (Lihat Merton, 1949). Konsep ini bukan berdasarkan pada pemahaman orang Jepang terhadap ajaran Budha, melainkan bertolak dari anggapan mereka tentang dewa-dewa Budha yang memiliki kekuatan yang identik dengan dewa-dewa *Shintoo*. Dari perpaduan ini muncul konsep *Honjisuijaku* yang beranggapan bahwa dewa Budha adalah perwujudan dari dewa *Shintoo*, sehingga dewa *Shintoo* adalah juga dewa Budha.

Agama Budha Mahayana masuk ke Jepang pada abad ke-enam Masehi (538 M) melalui Semenanjung Korea. Pada mulanya agama Budha tersebut diterima bukan sebagai ajaran agama melainkan sebagai ajaran filsafat, ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh kaum terpelajar, sehingga menyebar ke kalangan bangsawan pada zaman *Heian* (798-1185) sebagai agama yang membawa keuntungan di dunia sekuler. Ketika agama Budha Mahayana diperkenalkan di Jepang, para biksu Budha Jepang merubah cara pandang agama Budha ke arah sekularisme, yaitu mentransformasikan faham Budha ke dalam suatu agama yang bersifat dunia sentris. Mereka mengasimilasikan ajaran Budha dengan membuang aspek-aspek dunia luarbiasa, dan memungut aspek-aspek dunia sentris, seperti aliran agama Budha *Jodo*, *Nichiren* dan *Zen*.

Ajaran Budha sangat ketat melarang minuman keras, melarang makan daging, melarang melakukan hubungan sex tidak bisa diterima oleh orang Jepang. Di dalam ajaran Budha India para penganutnya dengan keras memusnahkan semua emosi, nafsu, keinginan duniawi tidak bisa diterima di Jepang, seperti pendeta *Onko* (1718-1804)

mengajarkan norma-norma moral terdiri atas memenuhi sifat-sifat alamiah manusia. Jadi bertentangan dengan agama Budha di India dan di China yang memisahkan alam agama dengan nafsu manusia dan menempatkan keduanya sebagai dua kutub yang berlawanan, orang Jepang cenderung beranggapan bahwa agama dan nafsu berada bersama dalam satu wilayah. Cinta, seksual, dan emosional ditetapkan sebagai sesuatu yang bukan tidak konsisten dengan agama. Pelaksanaan upacara *seijin shiki* merupakan pencerminan dari sikap dan tingkah laku keagamaan masyarakat Jepang yang bersifat ganda (dualistik) yakni bersifat religius-magis.

Sikap dan tingkah laku keagamaan masyarakat Bali bersumber pada ajaran Agama Hindhu disebut dengan *Panca Crada* yaitu lima dasar kepercayaan antara lain: (1) percaya akan adanya *Brahman* (Tuhan Yang Maha Esa). (2) percaya akan adanya *atman* (roh) yang hidup dalam badan manusia. (3) percaya akan adanya *samsara* (hukum reinkarnasi) yaitu *penitisan* kembali ke dunia, sesuai dengan karma manusia pada perbuatan yang terdahulu. (4) percaya pada hukum *karma pala* (hasil perbuatan) yang terdahulu akan berpengaruh terhadap kehidupan sekarang, dan karma kehidupan yang sekarang akan menentukan kehidupan yang akan datang. (5) percaya akan adanya *moksah* (*vimoksa*), yaitu menyatunya *atman* dengan *parama atma* (Tuhan Yang Maha Esa), sehingga roh itu tidak akan mengalami reinkarnasi lagi ke dunia (*suka tanpawali duka*). Agama Hindhu tidak hanya bersifat religius tetapi juga terdapat dimensi magis (*jujutsuteki*). Dimensi magis berkaitan dengan emosi keagamaan yang diwarnai oleh pamerih untuk mendapatkan pertolongan, atau penyelamatan dari kekuatan gaib yang dipercayai (Lihat Goris,1960:294).

3.2 Komodifikasi Informasi Upacara Memasuki Usia Dewasa

Jinsei girei (upacara penghormatan terhadap roh yang bersemayan dalam tubuh manusia), sebagai pencerminan religi/kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Jepang dan Bali. *Jinsei girei* dan *manusa yadnya* adalah upacara yang dilakukan berdasarkan siklus pertumbuhan diri seseorang dari lahir sampai meninggal. Baik di Jepang maupun di Bali dikenal adanya upacara siklus kehidupan manusia, seperti: (a) upacara kehamilan (*ninshin*) dan upacara *magedong-gedongan*; (b) upacara melahirkan bayi (*shusshan*); (c) upacara kelahiran (*tanjou*) ; (d) upacara pemberian nama (*nazuke*); (e) upacara 100 hari kelahiran anak (*iwaizen*) dan upacara *bulan pitung dina* di Bali; (f) upacara kunjungan pertama ke kuil Jinja (*Miyamairi*) di Jepang dan tiga bulanan (*nelubulanin*) di Bali; (g) upacara ulang tahun pertama (*hatsudanjou*) dan upacara *otonan pertama* (enam bulan pertama semenjak lahir di Bali; (h) upacara memasuki usia dewasa (*seijin shiki*) dan upacara *menek daha* di Bali; (i) upacara pernikahan (*kekkon shiki*) dan *pawiwahan* di Bali; (j) upacara pembakaran mayat (*kasoushiki*) di Jepang dan di Bali upacara *ngaben*. (Burhan,2006:9-10)

Seijin shiki merupakan upacara dalam siklus kehidupan manusia yang dilaksanakan bagi anak-anak yang telah memasuki usia dewasa. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan terhadap diri manusia pada saat memasuki usia tertentu. Pelaksanaan upacara *seijin shiki* merupakan salah satu bentuk dari fenomenologi keagamaan yang bersifat religius-magis yang telah menjadi adat-istiadat dan tradisi masyarakat Jepang. Pelaksanaan *Seijin Shiki* pada zaman feodal di Jepang dan di Bali dibedakan berdasarkan status sosial dalam masyarakat Jepang, seperti *kuge* (kelas bangsawan) di Jepang dan keturunan keluarga raja-raja di Bali, *buke* (kelas samurai) di Jepang dan kelas kesatria di Bali, *shomin* (kelas rakyat biasa) dan kelas sudra di Bali. Pada zaman feodal masyarakat Jepang status sosial mereka dibedakan menjadi empat

golongan disebut dengan *Shi* (*Bushi* yaitu kelas kesatria/*Samurai*); *Noo*(*Noomin* kelas petani); *Koo*(*Koosakunin* kelas tukang); *Shoo*(*Shoonin* kelas pedagang). Di Bali dikenal dengan system kasta, seperti *Brahmana* (kelas pendeta), *kesatria* (kelas prajurit), *wesia* (kelas pedagang), *sudra* (kelas petani). *Seijin shiki* yang dilaksanakan untuk laki-laki disebut dengan beberapa istilah yaitu *genpuku* di Bali disebut *ngeraja singa*. *Seijin shiki* untuk perempuan disebut dengan *kamiage/seijoshiki*, di Bali disebut *ngeraja sewala*.

Genpuku adalah *seijin shiki* yang dilaksanakan untuk anak laki-laki dan kaum bangsawan. *Genpuku* dilaksanakan oleh kaum bangsawan dari zaman kuno hingga sekitar abad pertengahan (sekitar abad ke-14 sampai abad 16). Juga ada *Kootaishika Genpuku* (upacara menyambut kedewasaan putra Mahkota). (Oojima, 1971:15). Pada kelas masyarakat Samurai (*Buke*), upacara ini disebut dengan *Eboshi Iwai*. Apabila pada kelas bangsawan (*kuge*), digunakan mahkota, maka pada kelas samurai (*buke*) digunakan *Eboshi* yaitu topi yang digunakan oleh kalangan samurai sebagai pengganti mahkota. (Tanno,2000:44).

Pada zaman awal Nara dan zaman Heian, upacara *Genpuku* dan *Eboshi Iwai* tersebut dilaksanakan pada kelas bangsawan dan kelas Samurai, tetapi pada zaman modern (*Kinsei*) yaitu sekitar abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 yang juga disebut dengan zaman Edo, upacara tersebut juga dilaksanakan di kalangan masyarakat biasa atau petani. (Takehiko Ojima,1971:15). Mengenai usia yang ditentukan dalam melaksanakan upacara bagi anak laki-laki (*danshi seijin shiki*) pada saat mereka berusia antara 12-14 (Kobari, 2005:120; Wijaya, 2005:8). Upacara menyambut kedewasaan yang dilaksanakan bagi anak perempuan disebut *joshi seijin shiki*.

Tolok ukur dalam menentukan seorang perempuan sudah dewasa ditentukan perkembangan hormonnya, yaitu datang bulan pertama yang dialami oleh anak perempuan. Setelah jaman Meiji (1868-1912), usia seseorang untuk menyambut kedewasaan ditetapkan menjadi usia 20 tahun sampai sekarang ini. Di dalam hukum perdata di Jepang, seseorang dianggap telah dewasa apabila telah berusia dua puluh tahun. Namun apabila seseorang menikah di bawah umur dua puluh tahun, maka secara otomatis orang tersebut sudah dianggap dewasa (Kobari 2005:11)

Pada tahun 1926 (*Taishoo* 15) sampai dengan tahun 1928 (*Shoowa* 2) adalah tahun dimana para pemuda Jepang bersatu dalam wadah pemuda *Seinendan*. Kelompok pemuda tersebut kemudian sering menyelenggarakan festival yang kemudian menyebar diselenggarakan di seluruh pelosok Jepang. Salah satu acara itu adalah *Seinen Shiki* yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 1946 di Kota Warabi, Distrik Kita Adichi, Prefektur Saitama, merupakan asal mulanya *Seijin Shiki* bertujuan untuk mengembalikan semangat pemuda Jepang setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Departemen Pendidikan Jepang memerintahkan agar setiap desa, kota, dan distrik di seluruh Jepang. Pelaksanaan berikutnya diselenggarakan secara rutin setiap tahun sebagai acara tahunan (*nenchuugyooji*) yang bersifat merakyat. Kemudian mulai tahun 2000, hukum yang mengatur mengenai hari libur nasional (*Kokumin Shukujitsu*) diamandemen dan menghasilkan keputusan mengenai hari penyelenggaraan *seijin shiki* yang ditetapkan pada hari Senin minggu kedua bulan Januari. Alasan dari dipilihnya hari tersebut sebagai hari penyelenggaraan adalah untuk mendukung kehidupan rakyat Jepang dengan cara menggabungkan hari festival *Seijin Shiki* dengan hari libur panjang (*renkyuu*).

3.3 Komodifikasi Informasi Fungsi dan Makna Upacara Memasuki Usia Dewasa dalam Masyarakat Jepang dan Bali

3.3.1 Fungsi Biologis Sebagai Penanda Kedewasaan

Seijin Shiki sebagai tolok ukur bahwa anak-anak telah dewasa dalam kehidupan bermasyarakat. Pada zaman feodal Jepang, dikenal upacara menyambut kedewasaan anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk anak laki-laki dilaksanakan pada usia 12 sampai 14 tahun dan untuk anak perempuan 13 sampai 17 tahun. Amano (dalam Kobari 2005: 120) menyatakan bahwa upacara *seijin shiki* merupakan upacara mengubah status seseorang supaya diakui menjadi bagian dari sebuah komunitas orang dewasa. Kedewasaan seseorang tidak hanya diukur melalui usia seseorang, tetapi dapat juga dengan cara-cara tradisional. Untuk laki-laki di daerah Nara, misalnya terdapat tradisi unik yang dilaksanakan untuk mengukur kedewasaan seseorang dengan menaiki gunung.

Kemudian memasuki zaman Meiji (1868-1912), ketentuan mengenai umur seseorang yang telah dewasa adalah usia dua puluh tahun. Berdasarkan UU di Jepang, seseorang telah mencapai usia dua puluh tahun sudah dapat melakukan hal-hal tertentu, seperti boleh menikah untuk pria adalah minimal berusia 18 tahun dan untuk wanita minimal 16 tahun. Berhak memilih dalam pemilihan umum adalah orang berusia minimal 20 tahun. Usia minimal diperbolehkan minum minuman keras adalah 20 tahun. Usia minimal untuk bisa merokok adalah 20 tahun (http://japanese.china.org.cn/jp/ide/2009-01/19/content_1715059, dikutip pada tanggal 30 Juni 2013).

Pada Masyarakat Bali, ciri kedewasaan pada pria ditandai dengan terjadinya perubahan suara yang dibarengi dengan munculnya jakun pada bagian leher; tumbuhnya bulu/rambut pada beberapa bagian tertentu dari tubuh, sebagai penanda kematangan pertumbuhan kelenjar seksual. Dengan kata lain, *menek deha* adalah peringatan pada anak-anak yang mulai meningkat dewasa atau akil balik secara agama Hindhu. Sebutan lainnya adalah *menek deha teruna*, dimaksudkan sebagai suatu pertanda yang dicirikan atau ditandai dengan adanya perubahan suara yang semakin membesar disebut *ngembakin* dan pada bagian-bagian tertentu dari tubuh mulai tampak tumbuh bulu-bulu kecil, seperti: kumis, jenggot dan di bawah ketiak. Ciri lain pada pangkal leher kelihatan muncul jakun (*batun salak*).

Perubahan pada wanita, ditandai dengan adanya pembesaran buah dada, mulai menstruasi (haid), pinggul mulai membesar. Semua perubahan fisik mempengaruhi batin mereka, seperti mulai merasakan adanya getaran-getaran asmara, yaitu mengalami masa pubertas, disebabkan oleh mulainya Dewa Asmara yaitu *Hyang Semara Ratih* menempati lubuk hatinya masing-masing. Sebagai pertanda, mulai munculnya sikap malu-malu, suka menyendiri, sering termenung, mengkhayal, suka bersolek, ingatannya mulai terganggu dalam belajarnya. Terjadinya perubahan secara biologis, menimbulkan adanya perkembangan dalam lahir dan batin setiap manusia dalam ajaran agama Hindhu dibuatkan upacara peringatan bagi anak laki-laki disebut dengan *ngeraja singa* dan bagi anak-anak wanita disebut dengan *ngeraja sewala*.

3.3.2 Fungsi Religius Upacara *Seijin Shiki* dan *Menek Kelih* dalam Masyarakat Jepang dan Bali

Dalam masyarakat Jepang fungsi religius upacara *seijin shiki* telah mengalami pergeseran dari fungsi keagamaan menjadi upacara seremonial dan diperingati sebagai hari festival nasional di Jepang. Sedangkan fungsi religi upacara *menek kelih* dalam

upacara agama Hindhu Bali, merupakan bagian dari pelaksanaan upacara *manusa yadnya*, yaitu ritual yang dilakukan untuk menghormati eksistensi atman yang reinkarnasi pada diri seseorang. Fungsi secara religi dari upacara menek kelih merupakan bagian dari pelaksanaan upacara *manusa yadnya*, yaitu ritual yang dilakukan untuk menghormati eksistensi atman yang reinkarnasi pada diri seseorang. Juga bersifat magis yaitu untuk mendapatkan perlindungan dari para leluhur dan Tuhan (*Idha Sanghyang Widhi*) agar anak-anak yang sudah memasuki usia dewasa tumbuh dengan selamat, tidak terjerumus dalam hal-hal yang bersifat negatif, seperti kenakalan remaja, narkoba, sex pra nikah, kemerosotan moral, pergaulan bebas dan lain-lain. Pelaksanaan upacara menek kelih yang umumnya diperuntukkan bagi anak perempuan, karena kodrat wanita dianggap lebih lemah dan labil jika dibandingkan dengan laki-laki. Wanita secara fisiologis akan mengalami masa-masa seperti datang bulan (*haid*) sehingga mereka sering lemah secara fisik sebagai akibat dari pendarahan selama masa tersebut. Selain itu, wanita menjadi barometer dalam keluarga. (Arwati, 2006).

3.3.4 Fungsi Sosial *Seijin Shiki* dan Menek Deha Pada Masyarakat Jepang dan Bali

Pada perayaan *Seijin Shiki* di Jepang, orang-orang yang telah dewasa yang sedang bekerja atau melanjutkan sekolah di daerah yang bukan daerah kelahirannya akan pulang ke daerah asal, dimana mereka tercatat sebagai penduduk daerah tersebut. Oleh karena itu *Seijin Shiki* ini merupakan sebuah kesempatan bagi mereka untuk bertemu dengan teman-teman yang pernah belajar dari guru-guru yang sama saat masih bersekolah dulu.

Para peserta *Seijin Shiki* pada masing-masing daerah di Jepang, mengenakan pakaian resmi untuk datang ke upacara. Para pemuda mengenakan *kimono* jenis *furisode* (*kimono* berlengan panjang) dan para pemuda mengenakan jas resmi atau *hakama* (pakaian tradisional Jepang untuk pria. *Furisode* adalah *kimono* yang memiliki lengan yang panjang pada bagian bawahnya. *Kimono* jenis ini digunakan oleh wanita yang belum menikah.

Seijinn shiki adalah suatu acara mempertemukan para pemuda dengan teman-teman mereka saat bersekolah di Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah. Bukan hanya bertemu dengan teman-teman saat bersekolah di SD ataupun SMP, tetapi juga merupakan kesempatan untuk berkumpul dengan teman-teman seusia. Sebelum pelaksanaan upacara *Seijin Shiki*, pemerintah kota ataupun pemerintah desa mengundang para pemuda dan pemudi yang pada tahun yang bersangkutan berumur dua puluh tahun datang untuk menghadiri *Seijin Shiki*.

Setiap anak perempuan memakai *kimono* yang indah merupakan impian dari semua anak-anak perempuan di Jepang. Bukan hanya itu, para ibu bangga melihat putra-putrinya menggunakan pakaian yang indah pada saat upacara *Seijin Shiki*. Menurut para peserta *Seijin Shiki* kesempatan untuk menggunakan *furisode* bagi anak laki-laki dan *kimono* bagi anak wanita merupakan alasan utama bagi mereka untuk pergi menghadiri upacara *Seijin Shiki*.

Persatuan pemuda (*wakamonogumi*) merupakan tempat bersatunya pemuda Jepang yang telah ada sejak zaman Edo (1603-1868). *Wakamonogumi* merupakan pelengkap struktur desa yang memiliki tugas membantu dalam hal keamanan, panitia festival dan lain-lain. (Atsuko Kuraishi 1998:309). Seorang pemuda yang telah dewasa akan masuk menjadi anggota *wakamonogumi* (kelompok pemuda), kemudian turut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat desa. Sebagai sebuah organisasi, setiap

anggota baru yang masuk menjadi anggota *wakamonogumi* harus taat kepada aturan dalam kelompok pemuda tersebut. Para pemuda anggota baru dalam *wakamonogumi* akan diarahkan untuk menjalin hubungan dengan senior pada kelompok pemuda tersebut. (Sasaki,1998:309). Kemudian memasuki zaman modern (1868 sampai dengan sekitar setelah Perang Pasifik), *wakamonogumi* menjadi induk dari *Seinendan* (Barisan Pemuda) mulai berkembang di setiap wilayah di Jepang, kemudian mengalami perkembangan pesat setelah Perang Asia Timur Raya (Perang antara Jepang melawan Rusia pada tahun 1904-1905). Pada tahun 1945 pada saat berlangsungnya Perang Pasifik, *Seinendan* dibubarkan dengan alasan para pemuda dihimpun untuk menjadi relawan perang.

Fungsi sosial upacara memasuki usia dewasa dalam masyarakat Bali sebagai tolok ukur pemuda terjun dalam organisasi pemuda, tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial dan proses sosial dalam kehidupan masyarakat Bali. Pengertian fungsi sosial mengacu pada hubungan saling keterkaitan antara struktur sosial dengan proses kehidupan sosial masyarakat Bali. Di dalam struktur sosial terdapat norma-norma, kebiasaan sebagai suatu kesatuan fungsional dalam sistem sosial. Di dalam sistem sosial masyarakat Bali terdapat struktur sosial yang terdiri orang-orang yang saling berhubungan satu sama lainnya yang diatur oleh berbagai aturan, norma, adat dan tradisi dalam proses kehidupan sosialnya. (Lihat Brown,1965).

Upacara ini secara sosiologi berfungsi untuk memperlakukan kepada masyarakat bahwa putra-putri dari suatu keluarga telah memasuki usia dewasa yang berkaitan dengan hak dan kewajiban si anak untuk belajar terjun dalam kehidupan bermasyarakat, seperti masuk menjadi anggota perkumpulan pemuda yang disebut dengan *Sekaha Teruna-Teruni* sebagai bagian dari sistem kehidupan organisasi sosial masyarakat Bali yang disebut dengan *Banjar*. Organisasi pemuda sebagai sub struktur dan organisasi *Banjar* yang menjadi super strukturnya.

Kehadiran seorang anak dalam sistem sosial di Bali sebagai simbol penerus keturunan yang akan membawa nama baik keluarga di masyarakat. Di dalam *awig-awig* (aturan tertulis) yang dimiliki oleh *Banjar*, sudah ditentukan bahwa anak-anak yang telah memasuki usia dewasa (*menek kelih*) harus masuk menjadi anggota perkumpulan pemuda (*sekaha teruna-teruni*), sebagai wadah bagi anak-anak laki-laki maupun perempuan untuk belajar berorganisasi, melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban sebagai persiapan nantinya apabila mereka telah menikah dan membentuk keluarga akan masuk menjadi anggota *Banjar*. Kadang-kadang apabila orang tua mereka berhalangan untuk kegiatan di *Banjar* maka bisa diwakili oleh anak-anak mereka yang sudah memasuki usia *menek kelih* yaitu kurang lebih umur 17 tahun. (Awig-Awig Banjar Panti Sari, Desa Pemogan, 1993:7-8).

Organisasi kepemudaan ini melakukan berbagai aktifitas yang sifatnya kedinasan seperti: penyampaian dan ikut menyukseskan program-program pemerintahan bekerjasama dengan organisasi karang taruna yang ada pada setiap kelurahan/desa dinas; juga ada aktifitas yang ada kaitannya dengan tradisi, adat-istiadat dan kegiatan religius yang ada di lingkungan *desa pakraman* (desa adat), seperti: perayaan tahun baru *isaka* (hari raya *nyepi*), *galungan* dan *kuningan*, upacara pengabenan, pernikahan, ikut menjaga kemandirian desa menjadi anggota *pecalang* dan lain-lain.

3.3.5 Makna Upacara Seijin Shiki dan Menek Kelih dalam Masyarakat Jepang dan Bali

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sosial masyarakat di Jepang yang tergabung di dalam Perhimpunan Peneliti *Seijin Shiki* yang baru (*Shinseijin Shiki Kenkyuu Kai*) tahun 2000, diperoleh mengenai makna *seijin shiki* bagi masyarakat Jepang sebagai berikut: (a) menyadari dirinya tumbuh menjadi orang dewasa. (b) ditanamkan pemahaman tentang kehidupan dalam sanubarinya. (c) pemberian ucapan selamat dan dorongan kepada anak-anak yang sudah tumbuh memasuki kedewasaan. (d) dapat menemukan jati diri dan mengintrospeksi dirinya. (e) reuni untuk bertemu dengan teman-teman lama (f) memperkokoh dan mendalami perasaannya bersatu dengan daerah kelahirannya.

Makna simbolik dalam suatu ritual harus dipahami dalam konteks kepercayaan atau religi yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Dalam kaitan ini, makna simbolik yang terdapat pada upacara menek kelih di Bali, dapat dijelaskan dengan menganalisis hubungan suatu konstruksi hubungan timbal balik yang dinamis antara orang yang meyakini atau mempercayai) dengan doktrin sakral yang diyakini. Makna simbolik pelaksanaan upacara menek kelih bisa dijelaskan dari jenis-jenis banten serta rangkaian pelaksanaan upacara tersebut dalam kehidupan masyarakat Hindhu Bali. Makna simbolik yang terkandung di dalam *banten (upakara)* dalam pelaksanaan upacara *menek kelih* ini, bisa dijelaskan dari konsep pemikiran kajian agama dalam perspektif fenomenologi agama dengan melihat gejala kepercayaan yang sudah menjadi tradisi atau adat istiadat. Sesuai dengan kebiasaan, tradisi adat-istiadat dalam masyarakat Hindhu di Bali segala aktifitas yang dilakukan dalam kehidupan keseharian baik dibidang sosial, seni, budaya dan agama tidak terlepas dari konsep *yadnya* (korban suci) yang diidentikkan dengan *upakara (banten)*. *Banten* yang terdapat dalam upakara memiliki bentuk, fungsi dan makna simbolik.

Oleh karena itu makna simbolik ini adalah (a) pembersihan sepirtuil si anak dari pengaruh negatif yang berasal dari lingkungan fisik (*physical environment*) maupun dari alam gaib (*spiritual environment*). (b) untuk menghormati keberadaan/eksistensi anak yang dipercaya sebagai reinkarnasi dari leluhur. (c) anak laki-laki setelah memasuki usia dewasa menjadi orang yang selalu berjaya (memperoleh kemenangan) dalam setiap aspek kehidupan, memiliki sifat-sifat pemberani (seperti singa) yang menjadi raja di dalam hutan. (d) pemberitahuan kepada dewa-dewa leluhur untuk memberkati si anak yang diupacarai *menek kelih*. (e) anak-anak yang memasuki usia dewasa biasanya memiliki struktur kejiwaan yang labil, sehingga dengan dibuatkan upacara ini diharapkan agar anak anak bisa mengendalikan emosinya untuk menuju pada kestabilan kejiwaan sebagai persiapan si anak untuk memasuki kehidupan *grahasta* (kehidupan berumah tangga).

3.4 Dikotomi Simbol-Symbol Budaya Fungsi dan Makna Upacara *Seijin Shiki* serta *Menek Deha* dalam Masyarakat Jepang dan Bali

Pelaksanaan upacara *seijin shiki* dan upacara *menek kelih* dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Jepang dan masyarakat Bali mempunyai unsur-unsur persamaan budaya.

No	Komponen Simbo-Symbol Budaya	<i>Seijin Shiki</i> di Jepang	<i>Menek kelih</i> di Bali
1	Istilah budaya dan keagamaan	(+)	(+)
2	Merupakan bagian dari kepercayaan rakyat	(+)	(+)
3	Merupakan bagian dari upacara lingkaran kehidupan manusia	(+)	(+)
4	Dibedakan menjadi upacara untuk anak laki-laki) yang berumur 17 tahun dan untuk anak perempuan sejak masa menstruasi pertama kali	(+)	(+)
5	Dirayakan secara nasional dalam bentuk festival pemuda	(+)	(-)
6	Sebagai tolok ukur bahwa seseorang telah dewasa	(+)	(+)
7	Batas umur orang mulai boleh merokok, minum alkohol, mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum	(+)	(-)
8	<i>Seijin shiki</i> sebagai wadah persatuan antar pemuda Jepang dalam (organisasi kepemudaan)	(+)	(+)
10	Kesempatan untuk mengenakan pakaian tradisional	(+)	(+)
11	Orang yang baru dewasa menemukan dan mengintrospeksi dirinya	(+)	(+)
12	Orang yang baru dewasa mendalami perasaannya bersatu dengan daerah kelahirannya	(+)	(-)
13	Setelah memasuki usia dewasa, lebih memiliki tanggung jawab dan berusaha	(+)	(+)
14	Memiliki fungsi religi	(-)	(+)
15	Memiliki fungsi sosial	(+)	(+)
16	Memiliki fungsi secara politik	(+)	(-)
17	Mempunyai makna simbolik	(+)	(+)
18	Batas usia diperbolehkan menikah	(+)	(+)

Catatan : (+) artinya ada; (-) artinya tidak ada.

Adapun unsur-unsur persamaan makna *seijin shiki* dan upacara *menek daha* jika dilihat dari simbol-simbol budaya dalam kepercayaan masyarakat Jepang dan Bali dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Elemen/Unsur Nilai-nilai Budaya	Ritual	Filosofis	Makna simbolik
1	Kepercayaan rakyat Shinto di Jepang dan agama Hindhu yang bercampur dengan animisme di Bali yang banyak memiliki tradisi kepercayaan yang masih dipraktikkan oleh masyarakat Jepang dan Bali sebagai pencerminan sikap dan tingkah laku keagamaan yang bersifat religius-magis.	Di Jepang berupa upacara yang dilakukan setiap tahun upacara lingkaran hidup manusia. Di Bali berupa upacara yang dirayakan setiap enam bulan, upacara lingkaran hidup manusia/upacara <i>manusa yadnya</i> .	Hubungan antara manusia yang mempercayai dengan doktrin ajaran yang dipercayai yaitu masyarakat Jepang dan Bali yang mempercayai adanya spirit yang ada pada fenomena alam, roh leluhur, dewa-dewa alam, binatang dan tumbuh-tumbuhan.	Menjaga dan memelihara keselarasan dengan alam, dan roh-roh /spirit yang ada di alam sekitarnya dengan melantunkan mantra-mantra magis dan korban suci sehingga kehidupan berjalan dengan aman.
2	Upacara perayaan lingkaran hidup manusia.	Upacara-upacara seperti: upacara hari lahir, upacara untuk anak usia tiga, lima, tujuhtahun, (upacara untuk menyambut kedewasaan dan upacara pernikahan).	Upacarpenghormatan terhadap roh/arwah yang ada di dalam tubuh manusia sebagai dasar dari kepercayaan Shinto. Upacara penghormatan terhadap roh di dalam tubuh manusia dilakukan sepanjang siklus kehidupan manusia.	Penghormatan terhadap manusia) adalah upacara yang dilaksanakan berdasarkan tahap pertumbuhan seseorang dalam kehidupannya.
3	Tolok ukur bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan.	Di Jepang dilaksanakan dalam festival <i>seijin shiki</i> pada hari Senin minggu kedua bulan Januari. Di Bali dilaksanakan pada hari baik menurut perhitungan kalender Bali	Upacara penghormatan terhadap roh/arwah yang ada di dalam tubuh manusia sebagai dasar dari kepercayaan Shinto di Jepang dan agama Hindhu yang bercampur animistik di Bali.	Kedewasaan secara fisik bagi wanita setelah mengalami menstruasi, bagi laki-laki perubahan suara, tumbuhnya bulu-bulu-bulu pada bagian tubuh tertentu, kedewasaan dalam cara berpikir kematangan secara emosional.

IV. SIMPULAN

Upacara memasuki usia dewasa, di Jepang disebut dengan upacara *seijin shiki*, sedangkan di Bali disebut dengan upacara *menek daha*. Dalam upacara ini terdapat dikotomi simbol-simbol budaya yang berkaitan erat dengan sistem kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakat Jepang dan Bali. Dinamika keyakinan orang Jepang dan Bali bersifat dualistis yakni bersifat religius-magis. Upacara penghormatan terhadap roh/arwah yang ada di dalam tubuh manusia (*seirei*) di Jepang berasal dari kepercayaan Shinto, sedangkan di Bali berasal dari dasar keyakinan agama Hindhu yang disebut *panca srada*. Salah satunya adalah keyakinan akan adanya eksisten *atman* yang mengalami proses reinkarnasi yang ada pada tubuh seseorang. Upacara penghormatan terhadap roh di dalam tubuh manusia ini, di Jepang disebut *jinsei girei* sedangkan di Bali disebut dengan upacara *manusa yadnya*. Upacara *jinsei girei* dan upacara *manusa yadnya* yang dilakukan sepanjang siklus kehidupan manusia. Di Jepang upacara siklus kehidupan manusia menginjak dewasa dilaksanakan dalam festival pada hari Senin minggu kedua bulan Januari. Di Bali upacara menginjak dewasa disebut dengan upacara *menek daha* di laksanakan pada hari baik menurut perhitungan kalender Bali

Fungsi sosial dari upacara memasuki usia dalam masyarakat Jepang dan Bali adalah: (1) tolok ukur bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan (2) sebagai wadah persatuan antar pemuda Jepang dalam organisasi kepemudaan (3) kesempatan untuk mengenakan pakaian tradisional Jepang dan Bali; (4) memperkuat ikatan dengan daerah kelahirannya; (5) setelah memasuki usia dewasa anak-anak memiliki tanggung jawab dan jiwa berusaha.

KEPUSTAKAAN

- Anwar, Ety Nurhayati, "Menggapai Bumi Suci: Sebuah Refleksi Pemikiran Keagamaan Shinran :Shonin". Dalam *Buletin Kajian Jepang* (BKJ) No.12 Tahun 3, September 2001. Depok: Pusat Studi Jepang UI.
- Anwar, Siti Dahsiar.2000."Agama-Agama Di Jepang" Dalam *Buletin Kajian Jepang*, No. 12/Thn. 3. September 2000. Depok: Pusat Studi Jepang UI.
- Awig-Awig BR. Panti Sari Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, 1993.
- Arwati, Ni Made Sri. 2006. *Upacara Manusa Yadnya*. Denpasar: Tanpa Penerbit.
- Brown, AR Radcliffe.1950.*Structure and Function in Primitive Society*.New York: The Free Press.
- Burhan, Donna. 2006. Upacara Kematian di Jepang: *Hubungan Antara Individualisme dan Koseiteki Dalam Jibun Rashii Osoushiki*. Jakarta:Program Kajian Wilayah Jepang UI.
- Cohen, E.H. (et.al.,). 2002. *A New Paradigm in Guiding: The Madrich as a Role Model*. *Annal of Tourism Research*, 22 (4).
- Dahles, H. 2002. *The Politics of Tour Guiding: Image Management in Indonesia*. *Annal of Tourism Research*, 29 (3).
- Emiko, Ochiai.1997.*The Japanese Family System in Transition: A Sociological Analysis of Family Change in Post War Japan*. Tokyo:LTCB.
- Goris, R.1948. *Sejarah Bali Kuno*. Singaraja: Tanpa Penerbit.
- Hitoshi, Miyake.1980.*Nihon Shuukyoo No Koozoo*(Struktur Agama Di Jepang).Tokyo: Keio University Press.

- Holloway, J. 1981. *The Guide Tour: A Sociological Approach*. Annal of Tourism Research, 8.
- Kobari, Makoto. 2005. *Areruseijinshiki/(Upacara Seijin Shiki Bergelora)* Tokyo: Doshisha Joshi Daigaku (Woman University).
- Kuper, Adam & Jessica Kuper. 2000. *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial Jilid 1 dan 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuraishi, Atsuko.1998 *Nihon Minzoku Shuukyuu Jiten(Kamus Agama Rakyat Jepang)* Tokyodoshuppan.
- Merton, RK. 1949. *Social Theory and Social Structure*. The Free Press of Glencoe Illionis.
- Nakane, Chie. 1967. *Tateshakai No Ningen Kankei (Hubungan Manusia dalam Masyarakat Jepang)*. Tokyo: Kodansha Gendai Shinsho.
- Oojima, Takehiko. 1971. *Nihon wo Shiru Jiten (Kamus Pengetahuan Tentang Jepang)* Shakaishisousha.
- Pettersen, Mari and Sara Norman. 2008. *Reaching the Japanese Tourist*. Australia: School of Business and Engineering.
- Piliang, Yasraf Amir. 2004. *Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Pitana, I Gde dan Putu G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata: Kajian Sosiologi Terhadap Struktur, Sistem, dan Dampak-dampak Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Pond, K. 1993. *The Professional Guide: Dynamics of Tour Guiding*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Reisinger, Yvette and Lindsay Turner. 2003. *Cross-Cultural Behaviour in Tourism: Concepts and Analysis*. Great Britain: Butterworth-Heinemann.
- Sasaki, Horimoto. 1998 *Nihon Minzoku Shuukyuu Jiten (Kamus Agama Rakyat Jepang)* Tokyodoshuppan.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali.
- Tanno, Akira. 2000. *Kurashi Ni Ikiru Nihon No Shikitari (Kebiasaan Hidup Di Jepang)* Tokyo: Kabushikigaisha Joudansha.
- Urry, J. 1990. *The Tourist Gaze*. London: Sage.
- Watkin, Leah. 2006. *Culture, Values and Japanese Tourist Behaviour*. A Thesis of Doctor of Philosophy. New Zealand: University of Otago.
- Wijaya, Kiki Firdansyah. 2005 *Dewasa Itu Pilihan*. Yogyakarta: Panduan.

STUDI TENTANG ARAH PERUBAHAN SUBAK MUWA SEBAGAI AKIBAT PERKEMBANGAN SARANA KEPARIWISATAAN DI KELURAHAN UBUD-GIANYAR

I Ketut Suwena
I Gusti Ngurah Widyatmaja
suwena@yahoo.com
Dosen Fakultas Pariwisata Unud

Abstract

Fast growth of tourism superstructure which awaking up above rice field area of Subak Muja bring impact progressively narrowing rice field farm and annoyed of activity institute subak in arranging traditional agricultural activity as according balance concept of Tri Hita Karana. So that the problem able to be formulated that is how condition of Subak Muwa before and after growth of tourism and how direction change of Subak Muwa in growth of tourism in sub-district of Ubud.

The purpose of this research that is to know the condition of Subak Muwa before and after growth of tourism in sub-district of Ubud, and to know direction change of Subak Muwa in growth of tourism superstructure. The advantages that are expected to be achieved from this research are academic and practical advantages. The operational research variable definition is condition of subak in the form of exploiting rice field farm, irrigation channel, life of society social, social solidarity, social organization, responsibility of ritual in gate of subak, responsibility of ritual at rice field area. Change direction of Subak that is change exploiting of farm head for structure rice field farm, change of social life, social solidarity, social organization up at modern life according to concept of Rogers and Moore, its implication is shifting responsibility toward of Dugul temple.

The collecting data conducted with observation, bibliography study, and in depth interview. To obtain get some information used determination of informant. The data analysis in this research that is descriptive qualitative analysis. Pursuant to result of solution obtained that condition of Subak Muwa after growth of tourism in sub-district of Ubud in 1980 years have experienced of change of previous condition. The change started from change of farm subak Muwa in the form exploiting of rice field farm outside agricultural activity generating structure of farm, in life society social have shifted up at change of traditional society, subsisten up at rational market world/commercial, and changing agricultural activity up at non agriculture in tourism service industries as according to concept Rogers and Moore. Implication arising out is shifting ceremony responsibility in temple of dugul supporter loss.

Key words : Tri Hita Karana, Subak, Tourism Superstructure, Rice Field.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata budaya yang semakin pesat dan terkonsentrasi ternyata menimbulkan dampak tidak hanya positif, akan tetapi juga negatif terhadap

kebudayaan Bali. Spillane (1989: 47-61) mengungkapkan dampak positif dari kemajuan pariwisata meliputi: 1). Memperluas lapangan kerja, 2). Bertambahnya kesempatan berusaha, 3). Meningkatkan pendapatan, 4). Terpeliharanya kebudayaan setempat, dan 5). Semakin terbatasnya lahan pertanian dan organisasi yang mengaturnya, 6). Pencemaran budaya, dan 7). Terdesaknya masyarakat setempat. Dampak negatif yang semakin dirasakan oleh masyarakat Bali dewasa ini adalah semakin terdesaknya lahan pertanian untuk membangun fasilitas kepariwisataan dan terancamnya keberadaan dan fungsi organisasi (subak) sebagai sistem pengairan tradisional.

Ketimpangan tersebut terlihat dari perubahan yang mendasar pada titik berat sektor pariwisata terhadap sektor pertanian, yaitu sektor pariwisata telah mendongkrak 80% dari struktur perekonomian Bali, sedangkan sisanya 20% dari sektor pertanian (Sugawa Korry, 2002). Gejala ini didukung dengan semakin meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pariwisata seperti: hotel, pondok, wisata, restoran, dan akomodasi pariwisata lainnya mengimbangi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Bali.

Pentingnya keberadaan subak dalam pengembangan pariwisata, terlihat dari semakin banyaknya pelaku sektor pariwisata memanfaatkan budaya subak sebagai daya tarik wisata. Apalagi daerah persubakan yang bertopografi miring dan berundag-undag (terasering) menyerupai perbukitan. Prestasi budaya lokal berupa budaya subak merupakan suatu nilai yang sangat berharga sebagai keunggulan dari masyarakat Bali yang tak ada duanya di dunia ini. Keberadaan subak merupakan aset budaya yang sangat mahal dalam mendukung perkembangan kemajuan sektor pariwisata yang menitik beratkan pada budaya masyarakat Bali (Pujaastawa, 2002). Kenyataan yang sering dijumpai adalah sebagai kegiatan unik dan menarik dari petani dalam mengerjakan sawahnya, seperti kegiatan *ngangon meri*, membersihkan pematang sawah, *metekap*, *melasah*, *memula*, *ngodor*, *mejukut*, *manyi* serta sebagai kegiatan petani lainnya secara tradisional dalam mengolah sawahnya. Wisatawan puas tatkala melihat dan mengabadikan kegiatan petani saat mengolah sawahnya, seperti menyiangi padi, atau bahkan segala aktivitas produksi padi di sawah sampai pada panen padi. Pemandu wisatawan pun tak kalah puasnya dengan menyaksikan semua itu, karena peluang untuk mendapatkan dolar dari kepuasan yang diterima wisatawan sangatlah besar. Di sisi lain, petani merasa puas ketika apa yang menjadi kehidupannya sehari-hari telah diabadikan lewat lensa kamera wisatawan. Tanpa disadari petani tersebut telah dikomersialkan oleh pemandu wisata tanpa ada kompensasi apapun yang diterima dari aktivitas tersebut, sebagai suatu penghargaan terhadap betapa mahalnya nilai budaya yang menjadi sumber kehidupannya sehari-hari dengan mengolah lahan pertanian dalam sistem subak (Wiguna, 2003).

Perubahan tatanan kehidupan masyarakat petani tradisional dalam perkembangan pariwisata Bali cenderung terjadi di pusat-pusat kawasan pariwisata yang berkembang, seperti halnya Kawasan Pariwisata Ubud. Kelurahan Ubud yang merupakan daerah tujuan wisata utama dalam kawasan wisata ini, secara fisik mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan semakin meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kepariwisataan. Masyarakat setempat merelakan persawahannya dijadikan lokasi pembangunan secara pariwisata baik dikelola sendiri, dikontrakkan, maupun karena tekanan ekonomi menjualnya kepada warga sekitar. Sehingga penyempitan areal persawahannya untuk pembangunan sarana kepariwisataan tidak lagi dihindarkan.

Melihat perkembangan yang terjadi tersebut, disatu sisi keberadaan subak sebagai sistem pengairan tradisional petani masyarakat Ubud secara berlahan-lahan mengalami perubahan di tengah pesatnya pengembangan pariwisata yang dimulai sekitar dekade 80-an. Perubahan akibat adanya pengembangan sektor pertanian terhadap keberadaan sistem Subak Muwa pada umumnya berawal dari *aspek palemahan* yaitu sawah atau ladang beralih fungsi menjadi sarana pariwisata, seperti; *hotel, pondok wisata, restaurant, cafe, art shop, money changer*, dan sebagainya. Selanjutnya mempengaruhi *aspek pawongan* yaitu anggota (krama) subak sebagai pendukung kelangsungan hidup petani, mulai kehilangan ikatan kepentingan bersama dan terancam bubar sebagai suatu organisasi tradisional. Kondisi seperti ini akhirnya akan merembet ke *aspek parahyangan*, dimana Pura Dugul atau Pura Ulun Suwi (pura krama subak) mulai kehilangan pendukungnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut bagaimana kondisi Subak Muwa sebelum dan sesudah perkembangan pariwisata di Kelurahan Ubud dan bagaimana arah perubahan Subak Muwa dalam perkembangan pariwisata di Kelurahan Ubud?

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Batasan Pengertian Subak

Subak merupakan suatu sistem irigasi di Bali, telah ada sejak ratusan tahun yang lalu yaitu sekitar 1071 Masehi. Batasan tentang pengertian subak menurut Peraturan Daerah (Perda) Bali No. 02/DPRD/1972 adalah masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosio-agraris-religius yang secara historis diirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan lain-lain untuk persawahan dari sumber air di dalam suatu daerah. Anom (2002) menyatakan, bahwa subak adalah organisasi petani Bali, mereka adalah masyarakat yang diasarkan pada hukum dan aturan tradisional seperti sosial Sedangkan menurut Pitana (1997), menyatakan subak memiliki lima ciri yaitu: (1) merupakan organisasi petani pengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya dan memiliki pengurus serta peraturan organisasi (awig-awig) baik tertulis maupun tidak; (2) mempunyai satu sumber air bersama, dapat berguna bendung/ empelan di sungai, mata air, air tanah, ataupun saluran utama suatu sistem irigasi; (3) mempunyai suatu wilayah persawahan; (4) bersifat otonomi, baik internal maupun eksternal; dan (5) mempunyai satu atau lebih pura Bedugul atau pura yang berhubungan dengan persubakan.

2.2 Batasan Konsep *Tri Hita Karana*

Secara hafiah uraian dari tiga kata *tri hita karana* mengandung suatu pengertian : (i) *Tri* artinya tiga, (ii) *Hita* adalah baik, senang, gembira, lestari dan sebagainya, (iii) *Karana* berarti sebab musabab atau sumbernya sebab, Kaler (1994: 14) dalam Jiwa Atmaja (2003). Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *tri hita karana* berarti tiga buah unsur yang merupakan sumbernya sebab yang memungkinkan timbulnya kebaikan.

Tri hita karana ini mengandung filsafat keselarasan yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam lingkungannya. Keselarasan itu sesuai dengan ajaran Hindu yang merupakan tujuan hidup sebagai orang Bali. Menurut Jiwa Atmaja (1999: 61-66), ketiga unsur dari *tri hita karana* ini adalah (a) *parhyangan* merupakan tempat suci pemujaan bagi umat Hindu, (b) *palemahan* adalah *lemah* berarti tanah. *Palemahan* berarti tanah tempat tinggal atau alam lingkungan, (c) *pawongan* berarti *wong* sama dengan orang yang segala

sesuatu menyangkut masalah kehidupan orang-orang di Bali. Ketiga unsur ini menurut Dharmika (1995: 99), dalam Jiwa Atmaja (2003), mengandung unsur-unsur (a) Hyang Widhi/Tuhan Maha Kuasa, (b) unsur manusia, dan (c) unsur alam. Ketiganya kemudian dipakai sebagai maket atau pola oleh masyarakat Bali, misalnya dalam pembuatan pola pemukiman menjadi (a) *parhyangan* berupa unit pura sebagai unsur pencerminan Ketuhanan (b) *pawongan* berupa keorganisasian masyarakat adat sebagai perwujudan manusianya, serta (c) *palemahan* berupa perwujudan unsur alamnya. Menurut Dharmayuda (1999:8)

2.3 Batasan Konsep Modernisasi

Perkembangan pendidikan, urbanisasi, industrialisasi merupakan beberapa faktor yang mempercepat perubahan dalam ekonomi, politik, sosial-kultural. Masyarakat yang tadinya merupakan persekutuan tradisional berdasarkan adat-istiadat, agama, dan pandangan hidup yang homogen beralih ke masyarakat heterogen. Masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks mengakibatkan perubahan pola-pola hubungan sosial. Perubahan sosial tersebut terasa sekali dalam masyarakat yang sedang berkembang dalam proses modernisasi (Abraham, 1991).

Rogers melihat bahwa modernisasi merupakan proses dengan mana individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup lebih kompleks dan maju secara teknologis. Sedangkan di satu sisi, Moore mengidentifikasi dua proses modernisasi yang berbeda dalam melihat perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang sedang berkembang, yaitu: (1) partisipasi pasar yang mencakup gerakan dari pertanian tradisional dan subsistem menuju mekanisasi dan komersialisasi berbagai segmen perekonomian serta peranan efektif dalam dunia pasar rasional; (2) relokasi sektoral yang mengacu kepada perubahan (pergantian) dari kegiatan-kegiatan pertanian menjadi non pertanian (Abraham, 1991).

2.4 Batasan Konsep Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan

Ciri-ciri dari masyarakat pedesaan adalah hubungan yang lebih erat dan mendalam antar intern warga dibanding dengan warga desa lain, pemukiman diarsarkan pada kelompok sistem kekeluargaan, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka hidup dari bercocok tanam pertanian, pekerjaan selain bertani merupakan pekerjaan sambilan belaka sebab terlihat bila panen tiba maka pekerjaan sambilan itu dihentikan lalu bergelut dengan panennya, dalam mengambil pekerjaan dengan kerjasama dalam bentuk gotong royong, di desa tidak dijumpai pembagian kerja atas dasar keterampilan akan tetapi atas dasar jenis kelamin dan usia, hubungan warga dengan "penciptanya" sangat kuat, kebutuhan hidup yang masih bersifat *subsistence farming*, kontrol sosial masih ketat, keserasian terhadap lingkungan fisik dan non sosial tetap terjaga, segala sesuatu berjalan sesuai keputusan musyawarah, kedudukan disentralisasi dalam tangan seseorang dalam kedudukan sebagai kepala desa, kepala agama (Pasaribu, 1986).

2.5 Batasan Konsep Subsistensi

Prilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani yang berorientasi subsistensi merupakan akibat dari kenyataan bahwa, berbeda dengan satu perusahaan kapitalis, dimana dalam kehidupan subsistem merupakan satu unit konsumsi unit produksi. Agar bisa bertahan sebagai satu unit, maka keluarga petani pertama-tama harus memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen subsistensi yang boleh dikatakan tak dapat dikurangi lagi dan tergantung pada besar kecilnya keluarga. Bagi petani tradisional yang hidup

dekat batas subsistensi lebih mengutamakan apa yang dianggap aman dan dapat diandalkan daripada keuntungan yang dapat diperoleh dalam jangka panjang (Scott, 1983).

Perekonomian subsistensi umumnya digunakan khusus dari perekonomian desa agraris yang produktivitasnya rendah. Produksi subsistensi adalah bagian dari produksi pertanian yang dikonsumsi oleh para anggota rumah tangga petani Subak Muwa, yang bertindak sebagai produsen sekaligus merupakan konsumen sebelum terjadinya perkembangan pariwisata di Kelurahan Ubud. Subsistensi digunakan dalam mengetahui kehidupan masyarakat Subak Muwa sebelum perkembangan pariwisata di Kelurahan Ubud.

2.6 Batasan Tentang Sarana Kepariwisataan

Menurut Wahab (1992) yang dimaksud dengan sarana kepariwisataan (*tourism superstructure*) adalah semua bentuk perusahaan yang dapat memberikan pelayanan pada wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya banyak tergantung kepada kedatangan wisatawan. Sedangkan menurut Pendit (1997), perusahaan utama yang langsung ini adalah semua perusahaan yang tujuan pelayanannya khusus diperuntukkan bagi perkembangan kepariwisataan dan kehidupannya benar-benar tergantung padanya. Terdapat tiga bagian yang penting dari sarana kepariwisataan, yaitu :

1. Sarana pokok kepariwisataan (*Main Tourism Superstructure*).
2. Sarana pelengkap kepariwisataan (*Supplementing Tourism Superstructure*).
3. Sarana penunjang kepariwisataan (*Supporting Tourism Super Structure*).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dengan Subak Muwa sebagai lokasi penelitian.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas dan membatasi permasalahan dalam penelitian, maka secara operasional yang dimaksud dengan masing-masing variabel dari masalah yang diteliti dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondisi Subak

Kondisi subak dalam penelitian ini adalah deskripsi dari kondisi Subak Muwa sebelum dan sesudah perkembangan pariwisata di Kelurahan Ubud tahun 1980-an. Kondisi subak ini ditinjau dari tiga unsur yang terdapat dalam konsep *tri hita karana*, yaitu *palemahan* berupa pemanfaatan lahan persawahan dan saluran irigasi Subak Muwa, *pawongan* menyangkut kehidupan masyarakat Subak Muwa, dan *parhyangan* adalah pelaksanaan ritual di Pura Subak dan lingkungan Subak Muwa.

2. Perubahan Subak

Perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan pada *palemahan* Subak Muwa berupa perubahan pemanfaatan lahan persawahan dan saluran irigasi dari kegiatan pertanian tradisional ke non pertanian yaitu industri pariwisata yang mengarah pada peralihan pemanfaatan lahan persawahan sehingga terjadi penyempitan lahan persawahan Subak Muwa; perubahan *pawongan* berupa

pergeseran kehidupan masyarakat dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup yang lebih kompleks yaitu dari pertanian subsistem menjadi masyarakat industri pariwisata disertai hilangnya solidaritas sosial petani, fungsi organisasi Subak Muwa, dan implikasi dari perubahan tersebut adalah pergeseran kegiatan ritual pertanian dan tanggungjawab terhadap Pura Dugul (*parhyangan*).

3.3 Jenis Data

Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu : (1) Data Kualitatif, yaitu dalam penelitian ini data kualitatif berupa data mengenai : (a) profil Kelurahan Ubud, (b) sejarah Kelurahan Ubud, (c) sejarah perkembangan pariwisata di Ubud, (d) sejarah Subak Muwa, (e) kondisi Subak Muwa. (2) Data Kuantitatif, yaitu dalam penelitian ini data kuantitatif berupa data jumlah subak dan luas lahan persubakan di Kelurahan Ubud, data statistik keadaan penduduk, dan jumlah sarana pariwisata di Kelurahan Ubud.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara : Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan, Informan dalam hal ini terbagi atas informan utama (informasi pangkal) dan informan kunci (informan pokok). Prosedur pelaksanaan wawancara dimulai dengan menentukan personal sebagai informan utama, dalam hal ini adalah Lurah Ubud. Orang-orang atau personal yang dipilih sebagai informan kunci, seperti: *Kelian* Subak Muwa, *Kesinoman* Subak Muwa, dan Ketua Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL) Ubud. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan kondisi Subak Muwa sebelum dan sesudah perkembangan pariwisata di Kelurahan Ubud.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Subak Muwa Sebelum Perkembangan Pariwisata

4.1.1 Pemanfaatan Lahan Persawahan

Lahan pertanian bagi masyarakat petani tradisional sangat memegang peranan penting sebagai sumber penghidupan keluarga dalam memenuhi tuntutan hidup sehari-hari. Luas seluruh lahan pertanian Subak Muwa adalah 25,514 hektar yang seluruhnya merupakan lahan pertanian basah untuk menanam padi. Lokasi lahan persawahan berpatokan pada Pura Subak atau Pura Dugul Subak Muwa, sehingga persebaran lahan persawahan mengitari posisi dari Pura Dugul. Berdasarkan catatan yang dimiliki oleh *kelian* Subak Muwa, pada awalnya lahan persawahan ini dimiliki oleh 93 orang anggota (*krama*) pemilik dan penggarap yang merupakan warga desa dari daerah sekitar Kelurahan Ubud, seperti Desa Padang Tegal Kelod, Tebesaya, Mekarsari, dan Ubud Kelod.

Kelian Subak Muwa menjelaskan bahwa sebelum berkembangnya sektor kepariwisataan di Kelurahan Ubud, lahan pertanian yang dimiliki petani Subak Muwa belum dirambah oleh sektor lain di luar sektor pertanian lahan basah. Masyarakat cenderung memanfaatkan tanahnya dengan menanam padi sebagai mata pencaharian hidup. Aktifitas yang terjadi di areal subak pun hanya sebatas kegiatan pertanian tanah basah, mencari makanan ternak (*sapi*). Keadaan sekarang, di atas petak-petak tanah persawahan terlihat pondok-pondok kecil yang merupakan tempat dari para petani

untuk menempatkan ternak sapi sekaligus untuk istirahat sejenak dalam proses mengerjakan sawah.

Pembangunan sarana pariwisata di Kelurahan Ubud membawa perubahan yang mendasar terhadap lahan Subak Muwa. Pemanfaatan lahan pertanian bukan lagi sebagai lahan pertanian basah, akan tetapi telah bergeser menjadi bangunan penunjang kegiatan pariwisata. Sarana kepariwisataan yang dibangun oleh masyarakat dalam areal persawahan Subak Muwa berawal dari adanya kunjungan wisatawan yang tertarik akan keberadaan Wenara Wana (hutan nera) sebagai objek wisata.

Meningkatnya pembangunan sarana kepariwisataan secara besar-besaran telah membawa perubahan peruntukan lahan dari kawasan pertanian tanah basah menjadi sarana pariwisata yang berpengaruh terhadap semua aktivitas yang pernah dilakukan dalam areal persawahan subak. Sebagian besar kegiatan pertanian menjadi semakin berkurang dan menghilang digantikan dengan kegiatan usaha ekonomis dalam usaha jasa pada sektor pariwisata.

Penyempitan lahan persawahan Subak Muwa tiap tahunnya tidak dapat diketahui secara detail oleh pengurus Subak Muwa. Hal ini disebabkan anggota Subak Muwa yang mengalihfungsikan lahan persawahannya untuk melakukan kegiatan usaha di luar sektor pertanian berupa penyediaan jasa pariwisata tidak melapor lebih dulu kepada pengurus subak sebagai suatu kewajiban dari anggota subak. Sehingga dalam kurun waktu 24 tahun terhitung sejak tahun 1980 sampai tahun 2004 telah terjadi penurunan luas areal sawah Subak Muwa sekitar 22,592 hektar. Lahan pertanian Subak Muwa yang pada awalnya berjumlah 25,514 hektar saat ini 90% atau sekitar 23 hektar berubah fungsi menjadi sarana kepariwisataan.

4.1.2 Saluran Irigasi

Sumber pengairan utama lahan pertanian Subak Muwa berasal dari bendungan Subak Muwa yang terletak di sebelah Barat Laut dari lokasi subak ini berada. Sumber irigasi utama tergolong sangat sederhana. Air irigasi mengalir dari bendungan Subak Muwa sampai muaranya yang terakhir pada saluran irigasi (*telabah*) Subak Nyuh Kuning, Subak Lod Tunduh dan sungai kecil di depan Wenara Wana, subak yang berada di hilir dari Subak Muwa berada. Sumber mata air utama bendungan Subak Muwa adalah air dari subak yang lokasinya berada di hulu Subak Muwa, seperti Subak Sakti dan Subak Juukmanis. Untuk itu, masa tanam petani Subak Muwa akan selalu mengikuti perkembangan subak di hulu sampai tersedianya air irigasi untuk mengolah lahan persawahan.

Pembangunan sarana pariwisata di atas lahan persawahan Subak Muwa membuat semakin tidak lancarnya air mengalir dari hulu, sehingga tidak teraturnya pembagian air ke dalam petak-petak persawahan krama subak yang berada di hilir. Saluran air yang dulunya tertata dengan baik, saat ini pemeliharaan dan perbaikan fasilitas irigasi hampir tidak pernah dilakukan oleh anggota Subak Muwa. Tiga buah saluran kecil dalam bentuk selokan saat ini hanya mengairi sekitar tiga hektara atau 10% dari seluruh luas Subak Muwa. Ketiga *daan* (daerah pembagian air) saluran pembagi tidak berfungsi dengan baik, karena semakin berkurangnya krama subak yang memiliki tanah pertanian basah dan mencari air untuk irigasi. Hal ini mengakibatkan sebagian saluran irigasi tertimbun menjadi trotoar jalan dan terkena tembok bangunan.

4.1.3 Kehidupan Masyarakat Subak Muwa

Bertani merupakan mata pencaharian pokok masyarakat Subak Muwa sebelum berkembangnya sektor jasa pariwisata di Kelurahan Ubud. Mereka tergolong masyarakat petani tradisional yang menggarap sawahnya dengan menanam padi atau melakukan kegiatan pertanian lainnya dalam memenuhi persediaan pangan terutama beras untuk keperluan hidup sehari-hari. Kehidupan masyarakat serba kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, jika hanya mengharapkan dari hasil bertani. Sehingga untuk mengisi waktu senggang dalam proses mengerjakan sawah masyarakat tani mengambil kerja sambilan dengan memelihara ternak, seperti sapi, babi, dan itik.

Keadaan ekonomi masyarakat subak ditunjukkan pula dengan bentuk rumah masyarakat yang masih sederhana menggunakan tembok dari bata mentah dan semennya menggunakan campuran antara kapur (*pamor*) dan pasir. Lantai rumah ada yang menggunakan campuran semen dengan pasir, dan tegel. Begitu juga dengan peralatan rumah tangga masyarakat subak yang hanya terdiri peralatan yang terbuat dari bahan kayu, seperti tempat tidur, kasur, almari, dan sebagainya. Peralatan dapur yang mereka miliki juga sangat sederhana dari bahan alami, seperti tungku api/dapur yang terbuat dari tanah dan memakai kayu sebagai bahan bakar, periuk nasi dan tutup tempat nasi terbuat dari tanah liat, sendok nasi dari kayu. Alat transportasi yang mereka miliki hanya sepeda, itupun jumlahnya sangat terbatas pada orang-orang tertentu saja. Untuk melakukan komunikasi masyarakat menggunakan media surat atau pesan dari mulut ke mulut.

Perkembangan pariwisata yang terjadi di Kelurahan Ubud membuka peluang masyarakat Subak Muwa untuk berkembang dan maju dalam usaha jasa pariwisata. Kegiatan sebagai petani tradisional secara perlahan pun semakin tidak tampak di lahan persawahan Subak Muwa dengan munculnya berbagai bidang usaha yang boleh dikatakan bergerak secara komersial untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional, maupun internasional. Bidang usaha jasa yang menyebabkan beralihnya mata pencaharian pokok sebagai petani tradisional menjadi pengusaha yang bergerak di bidang usaha industri pariwisata, seperti menjadi pengusaha artshop, rumah makan (*restaurant, café*), penginapan (*hotel, pondok wisata*), biro perjalanan dan sebagainya.

4.1.4 Solidaritas Sosial Masyarakat Subak Muwa

Solidaritas sosial yang dapat dilihat selama proses pengolahan tanah pertanian di Subak Muwa adalah dalam kegiatan tolong-menolong dan gotong-royong para petani dalam mengerjakan sawah dari awal sampai panen padi berlangsung. Tahap awal dalam proses produksi padi setelah panen padi, batang-batang padi yang belum membusuk kemudian disabit, dikeringkan, ditimbun, dan dibakar. Tahap berikutnya digenangi air beberapa hari sampai tanah pertanian menjadi basah sehingga mudah untuk penggarapan selanjutnya baik dicangkul maupun dibajak.

Aktivitas dalam mengolah lahan pertanian atau dalam proses produksi di sawah dilakukan oleh satuan kerja keluarga yaitu ayah, ibu, anak-anak mereka atau saudara-saudaranya. Para petani yang kekurangan tenaga untuk mengerjakan lahan persawahan atau tidak mempunyai ternak untuk menarik bajak, maka tidak akan membajak lahannya akan tetapi langsung dicangkulnya dengan meminta bantuan kepada para tetangga terdekat dan petani yang letak petak sawahnya berdampingan. Sumbangan tenaga itu akan dibalas dengan cara yang sama dimana suatu saat nanti bila petani yang menyumbang tenaganya untuk membantu dalam penggarapan sawah akan

mendapat perlakuan sama bila mereka mempunyai pekerjaan dalam pengerjaan sawah nanti, sehingga terjadi proses timbal balik untuk saling membantu. Tradisi inilah oleh para petani di Subak Muwa disebut *Melisi* (Mekir, dkk.1991). Petani yang memberikan sumbangan tenaga biasanya dikompensasikan dengan suguhan berupa minuman kopi dan makanan tradisional maupun nasi setelah mereka selesai mengerjakan lahan persawahan tanpa adanya imbalan berupa uang sebagai upah.

Rasa kebersamaan dan solidaritas diantara masyarakat yang berdomisili di Subak Muwa saat ini bukan lagi berdasarkan atas ikatan dalam kegiatan pertanian. Majunya perkembangan masyarakat dalam kegiatan bisnis atau usaha dalam bidang pariwisata merenggangkan ikatan solidaritas yang pernah ada dalam masyarakat petani tradisional. Beralihnya kegiatan anggota Subak Muwa dari petani tradisional ke sektor pariwisata yang memperenggang ikatan anggota Subak Muwa terlihat dari hilangnya rasa kebersamaan yang dimiliki dalam bentuk gotong royong dan saling tolong menolong mengerjakan tanah pertanian basah, memperbaiki saluran irigasi, maupun dalam kegiatan di Pura Subak Muwa.

4.1.5 Organisasi

Subak Muwa sebagai organisasi sosial yang mengatur masalah pengairan tradisional memegang peranan utama dalam kelangsungan kehidupan pertanian lahan basah di Kelurahan Ubud. Organisasi subak yang bersifat otonom dalam kehidupan masyarakat petani Subak Muwa dilengkapi dengan perangkat organisasi dan tugasnya masing-masing untuk mengkoordinasikan segala kegiatan subak, seperti rapat subak, pembagian air irigasi, kegiatan upacara di Pura Subak, dan pengaturan aktivitas subak lainnya.

Setiap pengurus subak mempunyai tugas masing-masing untuk mengatur kelangsungan jalannya organisasi. Kelian Subak Muwa bertugas untuk melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya organisasi subak dan aktivitas masyarakat di lahan persawahan, seperti mengawasi pembagian air, memimpin rapat subak, berkoordinasi dengan pengurus subak dan pemerintah. Bendahara (*juru raksa*) subak selaku pembantu pimpinan bertugas untuk memungut iuran anggota subak untuk perbaikan fasilitas subak (Pura Subak, bendungan) maupun memungut denda terhadap anggota subak yang melanggar. Sekretaris (*penyarikan*) subak bertugas untuk mencatat setiap kegiatan yang akan dilaksanakan subak sebagai hasil dari keputusan rapat subak, mencatat laporan dari anggota subak, pengarahan dari pemerintah yang nantinya akan disampaikan pada seluruh anggota Subak Muwa. Juru arah bertugas sebagai penyebar informasi kepada seluruh anggota subak berkaitan dengan aktivitas pertanian yang akan dilakukan di Subak Muwa. *Juru arah* merupakan perantara utama dari organisasi subak untuk memperlancar tugas dari kelihan subak dan pengurus lainnya.

Fungsi dan peran dari kelembagaan Subak Muwa pasca peralihan pemanfaatan lahan pertanian menjadi sarana pariwisata sudah tidak seperti dulu lagi saat masyarakat masih menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Serangkaian perubahan yang terjadi dalam palemahan dan pawongan Subak Muwa berpengaruh pula pada kontinuitas jalannya organisasi Subak Muwa. Menurut kelihan Subak Muwa, peran kelihan subak dalam melaksanakan pengawasan pembagian air, memimpin rapat subak maupun kewajiban lainnya tidak lagi terlaksana dengan baik. Apalagi sejak tahun 1990-an, dimana perkembangan pariwisata yang terjadi di Kelurahan Ubud dengan pencanangan Ubud sebagai desa internasional membuat organisasi Subak Muwa

semakin kehilangan pendukung dalam mempertahankan jalannya organisasi sosial subak.

Peran dari organisasi sosial subak semakin hilang fungsinya dalam mengatur kawasan yang telah beralih fungsi, secara perlahan diambil alih oleh organisasi sosial yang bersifat lebih modern. Organisasi yang muncul adalah organisasi yang sifatnya lebih kompleks dalam artian bahwa organisasi yang ada bukan lagi mengatur tentang irigasi seperti organisasi subak, akan tetapi cenderung mengarah pada organisasi yang memwadahi dan menghimpun berbagai kegiatan usaha di bidang pariwisata, seperti bina wisata dan PHRI.

4.1.6 Pertanggungjawaban Ritual di Pura Dugul

Pura Dugul Subak Muwa yang terletak di tengah areal pertanian Subak Muwa memiliki fungsi spiritual bagi kehidupan masyarakat Subak Muwa dalam menjaga keseimbangan hubungan antara petani dengan Tuhan (Dewi Sri). Setiap kegiatan upacara di Pura ini dilakukan oleh seluruh anggota Subak Muwa yang secara berkala jatuh setiap enam bulan sekali tepatnya pada Sukra Umanis Wuku Klau. Upacara ini dimaksudkan untuk memohon kesuburan dan kesejahteraan sehingga hasil panen berlimpah dan keselamatan petani selama mengerjakan sawah bebas dari gangguan hama penyakit, tikus, wereng, maupun walang sangit.

Secara kuantitas jika melihat jumlah *pengempon* atau anggota Subak Muwa yang menjadi pendukung kegiatan ritual keagamaan di Pura Dugul mulai menurun, sehingga pelaksanaan kegiatan upacara yang dilakukan secara kolektif di Pura Dugul sering menjadi tanggung jawab pengurus Subak Muwa. Wayan Lemek selaku pimpinan subak sampai saat ini masih bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan upacara di Pura bersama dengan beberapa orang anggota subak yang masih aktif mengerjakan tanah persawahannya.

Dapat dihitung pembiayaan satu pura dalam setiap 210 hari sekali, pekaseh harus mengeluarkan biaya ekstra untuk menyelenggarakan upacara di Subak Muwa. Begitu juga di pura Masceti Gunung Sari yang disungsung oleh sekitar 14 subak yang ada di Ubud termasuk Subak Muwa. Padahal gaji yang berupa *sarin tanah* maupun uang yang diberikan oleh sedehan agung sebesar Rp. 400.000,- per tahun, tidaklah cukup bila dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan dalam pelaksanaan upacara di Pura Subak. Kewajiban untuk membayar iuran perpetak maupun pepeson (iuran) subak setiap ada upacara di Pura Subak dan Masceti yang dikenakan bagi setiap pemilik lahan di Subak Muwa tidak lagi bisa dikumpulkan untuk disetor kepada panitia upacara guna melaksanakan upacara di Pura Gunung Sari. Sehingga secara keanggotaan Subak Muwa tidak lagi aktif sebagai pengempon pura Masceti Gunung Sari. Dalam setiap upacara di Pura Gunung Sari, prajuru dan krama Subak Muwa tidak lagi terlibat aktif dalam gayah maupun mengeluarkan pepeson (iuran) upacara karena lahan persawahan krama Subak Muwa tidak lagi sebagai lahan persawahan, bahkan sudah ada yang berpindah tangan baik itu dijual maupun dikontrakkan.

4.1.7 Pertanggungjawaban Ritual Pertanian di Areal Subak

Kegiatan anggota subak dalam mengerjakan sawahnya terkait dengan proses produksi padi tidak terlepas dari kegiatan upacara sebagai kepercayaan masyarakat petani tradisional terhadap Dewi Sri atau dewinya kesuburan yang memberikan kesejahteraan para petani. Upacara tidak hanya dilakukan terhadap tanaman dan hasil panen, upacara pula dilakukan terhadap ternak yang mereka miliki khususnya sapi yang

digunakan untuk membajak sawah. Begitu juga upacara terhadap alat-alat yang dipergunakan dalam mengerjakan tanah pertanian, seperti bajak (*lampit* dan *tenggala*), sabit, cangkul, serta peralatan pertanian tradisional lainnya.

Upacara dalam proses produksi padi dilakukan dengan berbagai rentetan sesuai dengan aktivitas yang sedang berlangsung di atas tanah persawahan, yaitu dari mencari air sampai panen padi. Rentetan upacara yang dilaksanakan berawal dari memasukkan air ke sawah yang disebut upacara *ngendagin*. Upacara *ngurit* dilaksanakan pada saat menabur benih padi di tempat pembibitan, upacara *newasen* dilaksanakan pada saat padi ditanam di lahan persawahan, dilanjutkan upacara *nguripin* setelah padi berumur kurang lebih 12 hari, ditujukan untuk memohon kehidupan agar tanaman padi dapat tumbuh besar. Upacara *mebiyukukung* yang dilakukan pada saat padi sudah mulai berisi buliran padi berumur sekitar 42 hari dari masa tanam. Upacara selanjutnya adalah upacara *mesaba* yang dilakukan pada saat menjelang padi akan segera dipanen. Upacara dilakukan di *pengalapan* atau *tugu penyawangan*. Setelah hasil panen kering barulah dilakukan penyimpanan padi ke lumbung dengan melaksanakan upacara *ngunggahang* padi. Menjelang akan menabur benih dilakukan upacara *mrelina* Dewa Nini sebagai pembersih dan penyucian lumbung dengan jalan membakar perwujudan Dewa Nini.

Perubahan lahan persawahan Subak Muwa menjadi asrana kepariwisataan seperti : pondok wisata, hotel melati, rumah makan, *artshop*, *money changer*, dan sebagainya memberikan pengaruh terhadap kegiatan upacara keagamaan di areal Subak Muwa. Kegiatan ritual pertanian tradisional yang dulu pernah dilakukan oleh krama Subak Muwa, saat ini mulai ditinggalkan masyarakat seiring dengan bergesernya pemanfaatan lahan persawahan yang terjadi di Subak Muwa. Upacara secara individu pada masing-masing lahan persawahan Subak Muwa tidak lagi berkaitan dengan proses produksi padi dihadapan Dewi Sri sebagai pemberi anugrah kesuburan dan kesejahteraan. Upacara secara individu dalam proses produksi padi tidak lagi dilaksanakan pada lahan yang sudah beralih fungsi. Artinya pada areal persawahan yang masih aktif dan produktif menghasilkan padi saja akan selalu dijumpai rutinitas kegiatan upacara keagamaan secara berkala seperti *nuwasen*, *mewinih* (mulai menabur benih) sampai panen padi berlangsung.

Menurunnya pelaksanaan ritual dalam proses produksi padi di atas areal Subak Muwa terlihat pula dari semakin sedikitnya *tugu penyawangan/tugu catu* yang terdapat pada masing-masing areal persawahan sebagai simbol dari berstananya Dewi Sri. Dalam melakukan pemugaran *tugu penyawangan* disertai dengan upacara *pengrapusan* atau *ngantukan* Dewi Sri ke Pura Dugul sebagai pertanda bahwa masyarakat tidak lagi mengolah lahannya sebagai lahan persawahan dengan ditanami padi. Berkurangnya anggota subak yang melaksanakan upacara ritual dalam proses produksi padi di areal persawahan menurut pengurus Subak Muwa, dikarenakan oleh struktur subak telah berubah dari segi pemilikan dan pemanfaatan lahan di luar pertanian yang menimbulkan sumber mata pencaharian dan unit usaha baru.

4.2 Arah Perubahan Subak Muwa Dalam Perkembangan Pariwisata di Kelurahan Ubud

Melihat perbandingan kondisi Subak Muwa sebelum dan sesudah perkembangan pariwisata Kelurahan Ubud pada pembahasannya sebelumnya, diketahui bahwa perubahan Subak Muwa berawal dari palemahan yaitu pergeseran pemanfaatan lahan pertanian basah menjadi tempat pembangunan sarana kepariwisataan. Lahan persawahan dan

saluran irigasi tampak sangat jauh berubah dari kondisi semula. Sebelum perkembangan pariwisata lahan Subak Muwa merupakan lahan pertanian tanah basah untuk menghasilkan padi seluas 25,514 hektar digarap secara langsung oleh petani pemilik tanah sebagai mata pencaharian hidup utama. Ciri masyarakat petani yang subsistensi mewarnai kehidupan masyarakat Subak Muwa. Hasil panen semata-mata untuk konsumsi keluarga. Perubahan pemanfaatan lahan persawahan mulai terjadi sesudah perkembangan pariwisata dengan dibangunnya unit-unit usaha pariwisata yang disebut sarana kepariwisataan, seperti hotel melati yang jumlahnya mencapai 21 buah, pondok wisata 53 buah, restoran dan café 42 buah, money changer 12 buah, artshop 28 buah, rent car 10 buah, dan gallery 5 buah. Karena seluruh sarana tersebut dibangun di atas lahan Subak Muwa sehingga dalam kurun waktu yaitu dari tahun 1980-an sampai tahun 2004 telah terjadi penurunan luas areal sawah Subak Muwa sekitar 22,592 ha.

Perubahan palemahan tersebut di atas memiliki implikasi terhadap perubahan pawongan subak, yaitu kehidupan sosial masyarakat Subak Muwa. Masyarakat petani tradisional yang subsisten turut berubah pula dengan semakin besarnya peluang kerja di sektor pariwisata yang menghasilkan pendapatan jauh lebih besar dari sektor pertanian lahan basah. Adapun variasi pekerjaan anggota Subak Muwa dari informan yang diwawancarai sesudah perkembangan pariwisata di Kelurahan Ubud adalah sebagai pengusaha rumah makan (café, restaurant, bar), pengusaha penginapan (pondok wisata, villa, hotel), pengusaha kerajinan (artshop, gallery), pengusaha layanan informasi (penjual tiket pertunjukkan, layanan paket tour).

Perubahan yang terjadi dalam palemahan dan pawongan Subak Muwa berimplikasi terhadap bergesernya tanggung jawab terhadap Pura Dugul dan upacara pertanian dalam proses produksi padi pada areal persawahan Subak Muwa. Karena upacara tersebut dianggap tidak relevan lagi dilaksanakan oleh krama subak yang sudah beralih pada kegiatan di luar pertanian lahan basah. Kegiatan ritual pertanian berkaitan dengan proses produksi padi di Pura Subak maupun pada areal lahan persawahan masing-masing anggota subak, seperti upacara *ngendagin*, *ngurit*, *newasen*, *mebiyukukung*, *mesaba*, *ngunggahang* padi, sampai upacara *mrelina* Dewi Sri *nini* semakin hilang pelaksanaannya. Sesudah perkembangan sarana kepariwisataan di Subak Muwa bentuk pelaksanaan upacara mengalami perubahan secara perlahan-lahan. Dalam artian kegiatan upacara di Pura Subak Muwa tidak seperti dulu saat dimana masyarakat masih menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian tradisional, seperti hilangnya tradisi ngayah di Pura Dugul dikarenakan oleh personel atau orang-orang baru yang membuka usaha jasa pariwisata di areal Subak Muwa tidak memiliki keterikatan secara struktural terhadap penyungungan di Pura Dugul. Walaupun setiap hari dijumpai kegiatan masyarakat untuk mengaturkan banten canang di Pura Dugul, hal itu terbatas pada kegiatan usaha yang sedang dilakoni oleh masyarakat di sekitar Pura Subak Muwa. Sehingga upacara yang dilakukan masyarakat mengarah pada upacara yang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa yang dilakukan masyarakat saat ini, seperti upacara *ngodalin* betara Rambut Sedana yang ditunjukkan untuk keberhasilan usaha yang dilakukan masyarakat.

Dengan demikian, perubahan yang muncul dari perkembangan pariwisata di Subak Muwa bersifat linier terhadap budaya subak itu sendiri. Keberadaan Subak Muwa dilihat dari kondisi sebelum dan sesudah perkembangan pariwisata di Kelurahan Ubud menggambarkan bahwa perkembangan sarana kepariwisataan di areal Subak Muwa telah menggeser kegiatan petani tradisional dengan semakin menyempitnya lahan pertanian dan beralihnya kegiatan yang dilakukan masyarakat dari kegiatan pertanian

tradisional ke non pertanian mengarah pada kehidupan masyarakat perkotaan yang modern dan semakin kompleks. Implikasi lanjutannya adalah muncul pergeseran tanggung jawab terhadap Pura Dugul (parhyangan) dengan semakin hilangnya pendukung yang bertanggung jawab penuh terhadap pura baik itu dalam hal pelaksanaan upacara di pura atau dalam hal pemeliharaan fisik pura.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Kondisi Subak Muwa sesudah perkembangan pariwisata di Kelurahan Ubud telah berubah dari kondisi sebelumnya, perubahan lahan persawahan dan saluran irigasi menjadi sarana penunjang pariwisata, seperti hotel melati, pondok wisata, artshop, restaurant, café, rent car, gallery, dan sebagainya. Kehidupan masyarakat subak mengalami perubahan dengan semakin bervariasinya sumber penghidupan masyarakat, sehingga solidaritas sosial pertanian, seperti nguopin, meslisi, dan peran dari organisasi subak mulai memudar dan menghilang seiring berubahnya aktivitas yang dilakukan masyarakat subak dalam sektor pariwisata. Implikasinya terhadap kegiatan upacara di Pura Dugul adalah semakin berkurangnya pendukung Pura Dugul dari anggota subak yang mengolah lahan untuk pertanian tanah basah karena munculnya orang-orang baru yang melakukan usaha jasa pariwisata di areal Subak Muwa tidak memiliki ikatan secara struktural terhadap pelaksanaan upacara di Pura Dugul. Pelaksanaan upacara secara berkala dilakukan oleh pengurus Subak Muwa dan beberapa anggota subak yang lahannya masih menghasilkan padi.
2. Perubahan Subak Muwa berawal dari perubahan pemanfaatan lahan pertanian Subak Muwa dari tanah pertanian ke non pertanian menjadi sarana kepariwisataan yang mengarah pada penyempitan lahan pertanian saluran irigasi. Arah perubahan selanjutnya diikuti dengan bergesernya kehidupan masyarakat Subak Muwa dari kegiatan pertanian subsisten menjadi industri jasa pariwisata yang bersifat komersial dalam peranan efektif pasar rasional. Perubahan ini terlihat dari kegiatan masyarakat subak telah bergerak dalam usaha jasa pariwisata. Kemapanan ekonomi ditunjukkan dengan bentuk bangunan rumah masyarakat subak yang permanen menggunakan desain style Bali, perlengkapan dan peralatan rumah tangga bervariasi dari televisi, radio, kompor gas, kulkas, telepon rumah, telepon seluler, dan peralatan elektronik lainnya. Alat transportasi yang dimiliki berupa sepeda motor sampai mobil roda empat. Tingkat pendidikan anak-anak masyarakat subak paling rendah adalah SMU dan SMK pariwisata, sedangkan sebagian besar sudah berada pada jenjang perguruan tinggi setingkat diploma sampai sarjana. Implikasi yang muncul dalam kegiatan ritual produksi padi pada lahan persawahan dan tanggung jawab terhadap Pura Dugul

5.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pesaratnya perkembangan sarana kepariwisataan di Kelurahan Ubud telah membawa penurunan nilai budaya masyarakat petani dalam hal pemanfaatan lahan

- pertanian. Sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan oleh pemerintah, pengusaha pariwisata, masyarakat Ubud pada umumnya dan organisasi subak khususnya akan dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan pariwisata agar kondisi subak seperti yang terjadi pada Subak Muwa tidak terulang lagi.
2. Pentingnya keberadaan subak sebagai organisasi pertanian tradisional dalam kehidupan masyarakat Ubud, hendaknya tetap dipertahankan masyarakat petani sebagai aset budaya dengan tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja yaitu usaha jasa sektor pariwisata, akan tetapi lebih dari satu sektor termasuk sektor pertanian lahan basah;
 3. Perkembangan sarana kepariwisataan di Kelurahan Ubud telah membawa dampak yang negatif terhadap budaya subak menjadi tidak berfungsi dan terancam bubar. Untuk memperkuat laporan ini maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan dampak perubahan Subak Muwa terhadap subak lainnya di Kelurahan Ubud.

KEPUSTAKAAN

- Abraham, Francis M. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga, Statu Teori Umum Pembangunan*, Yogyakarta : Tiarawacana.
- Anom. 2002. *Subak In Bali*. <http://www.info-indo.com/bali/subak>
- Ardana, Made. 2002. *Pariwisata Massa Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kawasan Pariwisata Ubud Kabupaten Gianyar*. Denpasar Universitas Udayana
- Jiwa Atmaja. 2003. *Perempatan Agung : Menguak Konsepsi Palemanahan, ruang dan waktu masyarakat Bali*. Denpasar. CV Bali Media Adhiaksara
- Bagus, I Gusti Ngurah. 2003. *Pemikiran Baru Untuk Pembangunan Bali yang Berkelanjutan Dari Perspektif Budaya*. Denpasar: Universitas Udayana
- Dharmayuda. 1999. *Konsepsi Tri Hita Karana Sebagai Dasar Hidup Harmonis*. Denpasar.
- Geertz, Clifford. 1995. *Interpretasi Kebudayaan*. Yogyakarta.: Kanisius.
- Geriya, I Wayan. 1996. *Pariwisata dan Dinamika Kebudayaan Lokal, Nasional, Global, Bunga Rampai Antropologi Pariwisata*, Denpasar: Upada Sastra.
- Kerti Pujani, Luh Putu. 2000. *Pekerja Anak Pada Sektor Informal Penjual Postcard di Objek Wisata Tanah Lot , Tabanan, Bali*. Denpasar: Universitas Udayana
- Koentjaraningrat. 1983. *Sejarah Teori Antropologi* 1. Seri Teori-teori Antropologi-Sosiologi No. 1 Universitas Udayana.
- _____. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Pande Bawa, Wayan. 2002. *Pemanfaatan Tebing di Sepanjang Sungai Ayung dalam Industri Pariwisata dan Implikasinya Terhadap Pelestarian Lingkungan (Studi di Desa Kedewatan Ubud*. Denpasar : Universitas Udayana.
- Pasaribu, L.L. 1986. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito.
- Pemayun, A.A. Putra. 2003. *Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Struktur Ekonomi dan Sosial Masyarakat Penjual Lahan di Kelurahan Ubud, Kab. Gianyar*. Denpasar: Universitas Udayana
- Pendit, Nyoman S. 1997. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Perda No. 3 Tahun 1991, tentang Pariwisata Daerah

- Picard, M. Et al.1996.” Cultural Tourism in Bali : National Integration and Regional Differentiation: in Hitchcock, M. Et al. (ed). Tourism in South East Asia. London : Rotledge
- Pitana.1997. Subak Sistem Irigasi di Bali: Sebuah Canang Sari. Denpasar : Upada Sastra.117 Sheets.
- PPL Ubud. 2008. Data Luas Subak di Kelurahan Ubud. Gianyar
- Pujastawa, I BG. 2002. Seri Mata Kuliah Antropologi Pariwisata, Denpasar
- Purwartatwa, Ida Bagus.2003. Dampak Konsolidasi Tanah Terhadap Perubahan Sistem Subak: Studi Kasus di Subak Muding, Desa Pekraman Kerobokan, Kec. Kuta. Kabupaten Badung. Denpasar : Universitas Udayana
- Putra.2002. Pariwisata Massa Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kawasan Pariwisata Ubud. Sebuah Laporan akhir Program Studi D4 Pariwisata.
- Redfield. 1947. Diferent of urban and rural societies. Annals of Tourism Research Vol 16.
- Scott, James C. 1983. Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara.Jakarta.LP3ES
- Smudhita Meker, dkk. 1991. Pengaruh Pembangunan Sarana Pariwisata Terhadap Struktur Petani di Desa Ubud. Denpasar : Universitas Udayana
- Spillane. James J. 1989.Ekonomi Pariwisata: Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta : Kanisius
- Spradley, James P. 1980. Observation Participant. Holt Rinehart and Winston. New Sudikan, Setya Yuwana.2001. Metode Penelitian Kebudayaan. Surabaya:UNESA Unipress dan Citra Wacana
- Sumarta.1992. Subak:Inspirasi Manajemen Pembangunan Pertanian. Denpasar : Citra Budaza. 55 sheets
- Sugawa Korry, Nyoman. 2002. Era Perdagangan Bebas vs UKM, Bali Post 10 September 2002
- Sustawan, Nyoman.dkk. 1986. Studi Tentang Pembentukan Wadah Koordinasi Sistem Iirigasi di Kabupaten Tabanan dan Buleleng. Provinsi Bali. Kerjasama Universitas Udayana dan Departemen PU Denpasar
- Swarsi, S. 1995. Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaza Daerah Bali. Denpasar: Departemen Pendiikan dan Kebudayaan.
- UU RI Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan
- Wahab, Salah. 1992. Manajemen Kepariwisataaan. Yakarta : Pradnya Paramita.
- Wiguna. 2003. Sistem Subak Sebagai Potensi Wisata di Bali. Denpasar
- Yoeti, Oka.1993. Pengantar Ilmu Pariwisata. Bandung : Angkasa Bandung.

WISATAWAN KURANG MINAT KE HUTAN BAMBU SEBAGAI ATRAKSI EKOWISATA DI DESA PENGLIPURAN KABUPATEN BANGLI

I Nyoman Jamin Ariana
jamin.ariana@yahoo.com
Dosen Fakultas Pariwisata Unud

Abstract

The bamboo forest as the location of the research is based on the interaction between the society and the tourist . The research problem is factors that make the tourist rarely comes to bamboo forest as the attraction ecotourism in Penglipuran Village. The purposes of this research ; knowing the factor which is causing the decrease of the tourist come to bamboo forest. The collecting datas in this research are by; observation, interview and questionnaire. The informant in this research is obtained from the figures in society, the tourist, guide and the government tourist staff. The result of this research showed the influence factor that make the tourist rarely comes to bamboo forest as follows: 1. the intern factor, such as; the amboo forest is un arranged well, the sanitation of the environment in the bamboo forest is still far from the standard, there aresome varieties of bamboo extincted , there are no conservation place and transportation to facilitate the tourise surrounded the bamboo forest, the handicraft madeof bamboo material are still limited in type and it varieties. 2, the extern factor envelope ; the travel bureau still not sell the tour package specially for bamboo forest, the guide did not give the informations of the existence of bamboo fprest before and in the journey, the tourists are in penglipuran village about 30 minutes, while their wish to visit the bamboo forest is huge enough.

Key word: Bamboo Forest, and Ecotourism.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan kepariwisataan di Bali sampai tahun sembilan puluhan, selalu berorientasi kepada kepariwisataan massal (*Mass Tourism*), menurut Failker (1997:14) pariwisata massal memiliki karakteristik yakni: (1) jumlah wisatawan yang mengikuti perjalanan dalam jumlah besar (group); (2) pembelian paket wisata dan perjalanan sangat diseragamkan (tidak ada pilihan); (3) perjalanan diatur segalanya oleh *Travel Agent*; (4) wisatawan yang mengikuti perjalanan ini relatif tidak berpengalaman; (5) wisatawan yang mengikuti perjalanan ini tidak canggih; (6) mengunjungi Daerah Tujuan wisata, hanya untuk bersantai, menikmati pemandangan dan melihat sinar matahari, pasir putih dan pantai putih, (7) wisatawan di daerah tujuan wisata banyak mengunjungi dan menyaksikan objek dan daya tarik wisata; (8) jadwal perjalanannya sangat padat.

Sedangkan menurut Poon (1997:15) dalam buku *Tourism Technology and Competitive Strategies*, mengatakan pariwisata masal (pariwisata konvensional) berorientasi ke wisata paket/kelompok, produk wisata yang dibakukan menurut pasar masal dan perjalanan ke banyak tujuan dan waktunya lebih lama. Kodhyat (1997:75) menyebutkan pariwisata masal sebagai pariwisata modern atau konvensional, dimana

jenis pariwisata ini memiliki ciri-ciri yakni kegiatan wisata berjumlah besar (*Mass Tourism*), sebagian dikemas dalam satuan paket wisata, pembangunan sarana dan fasilitas kepariwisataan berskala besar dan mewah memerlukan tempat-tempat yang dianggap strategis serta memerlukan tanah yang cukup luas.

Berdasarkan ciri-ciri/karakteristik yang melekat pada pariwisata massal atau pariwisata konvensional tersebut di atas, maka aktivitasnya membawa dampak negatif terhadap :

1. Sumber daya alam yakni: (1) terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke sektor pariwisata; (2) terjadinya pencemaran lingkungan dan terjadinya kerusakan lingkungan dan ekosistem; (3) lahan yang dihabiskan untuk membangun sarana kepariwisataan sangat besar; (4) kebutuhan air, listrik dan sumber daya alam lainnya sangat besar.
2. Sumber Daya Manusia yakni terjadinya: dampak negatif terhadap masyarakat/penduduk setempat, diantaranya : (1) terjadinya degradasi nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai moral; (2) komersialisasi tradisi keagamaan, (3) peningkatan prostitusi, (4) penggusuran penduduk dan kemiskinan, (Kodhyat (1997:76)).

Dampak negatif tersebut di atas disebabkan karena pengembangan pariwisata semata-mata dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan pariwisata dipersiapkan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan baik swasta maupun pemerintahan. Sebagai reaksi dari dampak negatif yang diakibatkan oleh pariwisata massal/pariwisata konvensional, atau untuk mengurangi dampak negatif pariwisata massal. maka muncul pariwisata alternatif (Kodhyat 1997:77). Pilihan wisata alternatif mempunyai karakteristik tertentu seperti: (1) tingkat perkembangan yang relatif lambat dan terkontrol; (2) mampu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan; (3) pengambilan keputusan bersifat lokal; (4) memperhatikan daya dukung yang dimiliki; (5) menerapkan pengembangan berkelanjutan; (6) skala kecil; (7) lebih terikat pada budaya dan lingkungan asli; (8) wisatawan lebih mandiri dan individual; (9) mencari wisatawan yang memiliki minat khusus.

Menurut Poon (1997:15) , sebenarnya pariwisata massal telah membuka jalan untuk pariwisata baru yang karakteristiknya : (1) wisatawan yang lebih canggih dan berpengalaman; (2) lebih suka merencanakan perjalanan wisata mereka sendiri; (3) bepergian secara mandiri; (4) bersifat lebih spontan dan luwes dalam mengatur susunan perjalanannya dan (5) mereka terdorong untuk mencari objek wisata dengan minat khusus seperti wisata budaya, ekowisata, wisata petualangan, agro wisata.

Salah satu bentuk dari pariwisata alternatif adalah ekowisata (wisata alam), dimana menurut Silver (1997:105) ekowisata memiliki karakteristik yakni : (1) wisatawan menginginkan pengalaman yang asli dan mendalam; (2) menganggap pengalaman itu layak dijalani baik secara pribadi maupun secara sosial; (3) kurang menyukai rombongan yang besar dengan rencana perjalanan yang ketat; (4) mencari tantangan fisik mental; (5) berinteraksi dengan budaya dan penduduk setempat; (6) mudah menyesuaikan diri; (7) lebih menyukai tempat penginapan yang asli di desa; (8) ingin ikut terlibat dan tidak bersifat pasif; (9) toleransi terhadap ketidaknyamanan; (10) lebih suka membayar untuk petualangan dari pada kenyamanan.

Kabupaten Bangli sebagai salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten dan Kotamadya Denpasar di Propinsi Bali juga menggalakkan sub sektor pariwisata baik dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah, memperkenalkan budaya yang dimiliki, memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, maupun menggali potensi-potensi yang ada.

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Bangli semakin mendapat perhatian dan diprioritaskan dalam pembangunan dan pengembangannya. Maka digariskan dan ditempuh kebijaksanaan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli untuk mencapai tujuan kepariwisataan di daerah ini.

Melalui Keputusan Kepala Daerah Kabupaten Bangli No. 15 Tahun 1991 menetapkan obyek dan daya tarik wisata yang sudah dikembangkan sebanyak 6 (enam) buah, yaitu: (1) Obyek dan Daya Tarik Wisata Batur; (2) Obyek dan Daya Tarik Wisata Trunyan; (3) Obyek dan Daya Tarik Wisata Pura Kehen; (4) Obyek dan Daya Tarik Wisata Penulisan; (5) Obyek dan Daya Tarik Wisata Toya Bungkah; (6) Obyek dan Daya Tarik Wisata Desa Adat Penglipuran.

Sementara objek dan daya tarik wisata yang sedang dan akan dikembangkan terdiri dari : (a) Pura Puncak Sari; (b) Taman Bali; (c) Kolam Renang Sengginang; (d) Desa Pengotan; (e) Bukit Demulih; (f) Bukit Serokadan; (g) Pura Tirta Payuk; (h) Pura Dalem Bangung Lemah Kangin; (i) Goa dan Mata air Bambang; (j) Bukit Pula Sari; (k) Panorama Desa Jahem; (l) Candi Tebing Jehem; (m) Panorama Desa Pinggan; (n) Air Terjun Kutuh; (o) Agrowisata Tanaman Kopi di Desa Catur; (p) Agrowisata Tanaman Jeruk dan Sirsak di Desa Sekaan; (q) Desa Batu Kaang; (r) Air Terjun Kuning dan obyek wisata hutan bambu Desa Penglipuran.

Hutan Bambu ini merupakan kawasan yang berada di sebelah utara desa Penglipuran. Kawasan ini dijadikan salah satu objek wisata alternatif yakni ekowisata karena Hutan Bambu ini merupakan wilayah yang menjadi satu dengan Desa Penglipuran sehingga apabila berjalan dari awal maka berhenti di tempat itu juga yaitu dari sebelah utara Desa Penglipuran dan berhenti di utara Desa Penglipuran itu juga.

Prospek dari kawasan ini sangat baik di masa depan karena memiliki keunikan dan kelangkaan jenis serta ragam bambu yang tertata dan memiliki jalan setapak di sela hutan bambu, sehingga menjadikan wisatawan lebih berkesan mengunjungi Hutan Bambu khususnya peneliti yang melakukan penelitian, serta wisatawan yang lainnya akan ikut berkunjung ke areal Hutan Bambu. Namun dalam pengembangan potensi Hutan Bambu sebagai wisata alternatif masih banyak ditemui kendala yang perlu diperhatikan. Ini diakibatkan masyarakat belum begitu banyak terlibat dalam pengelolaan obyek wisata serta sarana-sarana yang perlu diperbaiki antara lain jalan setapak menuju Hutan Bambu sehingga wisatawan bisa langsung ke kawasan tersebut di Desa Penglipuran. Dari hal tersebut maka diperlukan penanganan-penanganan yang lebih matang agar perkembangan kawasan tersebut sesuai dengan harapan di masa yang akan datang baik bidang ekonomi, sosial maupun hal-hal lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja menyebabkan wisatawan kurang minat ke hutan bambu sebagai atraksi ekowisata.

II. KAJIAN KONSEP

2.1 Konsep Ekowisata

Menurut Coy (1998: 180) mengemukakan lima faktor pokok yang mendasar menentukan batasan prinsip utama ekowisata adalah :

1. Lingkungan
Ekowisata harus bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu.
2. Masyarakat
Ekowisata harus dapat memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat tuan rumah.

3. Pendidikan dan Pengalaman
Ekowisata harus dapat meningkatkan pembangunan akan lingkungan alam dan budaya terkait sambil memperoleh pengalaman yang mengesankan.
4. Keberlanjutan
Ekowisata harus dapat memberikan sumbangan positif bagi keberlanjutan ekologi dari lingkungan tempat kegiatan.
5. Manajemen
Ekowisata harus dapat dikelola dengan cara yang dapat menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah tempat kegiatan ekowisata.

Dalam Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, dimana pada pasal 6 mengatakan bahwa salah satu obyek wisata adalah ekowisata, di samping wisata budaya dan wisata minat khusus dan pada pasal 18 menyebutkan bahwa perusahaan obyek dan daya tarik ekowisata merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sarana wisata. Di samping itu SK Dirjen PHPA Nomor 129/Kpt/DJ/1996 menyebutkan bahwa ekowisata merupakan sebuah kegiatan dan sebagian dari kegiatan yang dilakukan secara sukarela, bersifat sementara dan untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam kawasan konservasi. Kedua kebijakan pemerintah tersebut mengukuhkan bahwa ekowisata merupakan kegiatan yang dapat memberikan harapan masyarakat lokal untuk mengelola potensi alam sekitarnya. Di samping itu ada beberapa sarjana memberikan konsep ekowisata diantaranya : Fandeli (2000:5) memberi batasan ekowisata yaitu suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomis dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Berdasarkan pengertian tersebut, bentuk ekowisata pada dasarnya merupakan suatu gerakan konservasi yang dilakukan oleh penduduk Sementara Organisasi *The Ecotourism Society* (2000: 15) mengatakan ekowisata suatu bentuk perjalanan wisata ke daerah alami yang dilakukan dengan aturan mengenai konservasi lingkungan dan pelestarian kehidupan serta kesejahteraan penduduk setempat dan Eplerwood (1999:23) ekowisata adalah bentuk baku dari perjalanan bertanggung jawab di daerah alami dan berpetualangan yang dapat menciptakan industri pariwisata. Di samping itu ia juga mengemukakan delapan prinsip ekowisata yaitu :

1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap alam dan budaya.
2. Pendidikan konservasi lingkungan artinya mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi.
3. Pendapatan langsung untuk kawasan artinya pendapatan yang diperoleh dipergunakan untuk membina melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam.
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan artinya masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata termasuk melakukan pengawasan.
5. Penghasilan masyarakat artinya keuntungan secara nyata diterima masyarakat dari kegiatan ekonomi dapat mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam.
6. Menjaga keharmonisan dengan alam artinya semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam.

7. Daya dukung lingkungan artinya dalam pengembangan ekowisata harus tetap memperhitungkan daya dukung lingkungan.

8. Peluang penghasilan negara porsinya cukup besar.

Selanjutnya menurut Raka Dalem (2002:4), ekowisata adalah penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di tempat alami atau daerah yang dibuat berdasarkan kaedah alam, mendukung upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu disepakati prinsip-prinsip Ekowisata Bali sebagai berikut :

1. Memiliki kepedulian, komitmen dan tanggung jawab terhadap konservasi alam dan warisan budaya
2. Menyediakan interpretasi yang memberikan peluang kepada wisatawan untuk menikmati alam dan meningkatkan kecintaannya terhadap alam
3. Memberikan kontribusi secara kontinyu terhadap masyarakat setempat serta memberdayakan masyarakat setempat.
4. Peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradesi keagamaan masyarakat setempat.
5. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengembangannya harus didasarkan atas musyawarah dengan persetujuan masyarakat setempat.
7. Secara konsisten memberikan kepuasan kepada konsumen.
8. Dipasarkan dan dipromosikan dengan jujur dan akurat sehingga sesuai dengan harapan.
9. Sistem pengelolaan yang serasi dan seimbang sesuai dengan konsep Tri Hita Karana.

2.2 Konsep Konservasi

The International Union For Conservation of Nature and Natural Resources dalam Fandeli (2000;7) mengemukakan konservasi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan biosphere dengan berusaha memberikan hasil yang besar dan lestari untuk generasi kini dan mendatang. Adapun tujuan konservasi itu adalah :

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologi yang tetap mendukung suatu kehidupan.
2. Melindungi keanekaragaman hayati.
3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

Selanjutnya Sulthoni (2000;74) mengatakan kawasan konservasi adalah sebagai kawasan yang dilindungi karena memiliki ciri tertentu dari kawasan tersebut. Adapun cirri kawasan konservasi itu adalah; (1) keunikan ekosistemnya, (2) adanya sumber daya fauna yang telah terancam kepunahan, (3) keanekaragaman flora dan fauna, (4) panorama atau ciri geofisik yang memiliki nilai estetika dan (5) karena fungsi hidrokologi kawasan.

2.3 Konsep Pariwisata Alternatif

Pariwisata alternatif dikembangkan di beberapa daerah tujuan wisata, agar dapat mencegah kerusakan alam dan mencegah dampak negatif dari pariwisata masal. Untuk lebih jelasnya apa itu pariwisata alternatif, ada beberapa sarjana memberikan konsep pariwisata alternatif seperti ; Kodhiyat (1997;75) memberikan batasan bahwa pariwisata alternatif memiliki dua pengertian yaitu (1) Sebagai salah satu bentuk kepariwisataan yang alami, bahkan sebagai reaksi terhadap dampak negatif dari

pengembangan pariwisata konvensional, (2) Sebagai bentuk kepariwisataan yang berbeda dari pariwisata konvensional untuk menunjang kelestarian lingkungan. Begitu juga Smith dalam Myra (1997:87) memberi batasan pariwisata alternatif sebagai bentuk pariwisata yang konsisten dengan nilai-nilai alami, sosial dan masyarakat memungkinkan baik tuan rumah maupun pengunjung untuk menikmati interaksi yang positif dan benar serta saling membagikan pengalamannya. Beberapa bentuk pariwisata alternatif seperti : wisata pedesaan, wisata memancing, agrowisata, wisata bersepeda, wisata alam, wisata hiking, trekking dan canoing. Jadi pariwisata alternatif merupakan kecenderungan baru dari bentuk pariwisata yang telah dikembangkan (konvensional) atau sering juga diartikan sebagai suatu bentuk pariwisata yang sengaja disusun dalam skala kecil (*small scale tourism*) yang lebih memperhatikan aspek lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat setempat. Pariwisata alternatif ini merupakan kombinasi atau gabungan dari beberapa jenis wisata seperti wisata petualangan, wisata alam dan wisata komunitas.

2.4 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu prinsip dari ekowisata adalah pemberdayaan masyarakat lokal dalam mengelola obyek wisata di daerahnya, begitu juga Bawa (1998:14) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah menyiapkan kemampuan masyarakat atau sumberdaya manusia agar mereka mampu berperan dalam pemrosesan pariwisata itu. Sumodiningrat (1999:44) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat seperti di atas, pemerintah pertama-tama menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, dengan mengeluarkan kebijakan yang memihak kepada masyarakat setempat.

2.5 Konsep Pengembangan Hutan Bambu sebagai Ekowisata

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, memiliki luas hutan yang besar baik itu hutan lindung dan hutan industri, hendaknya dikelola dan dikembangkan dengan baik sehingga dapat dijadikan obyek dan daya tarik wisata. Dalam pemanfaatan dan pengembangan hutan sebagai obyek dan daya tarik wisata hendaknya mematuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, agar tetap lestari untuk generasi berikutnya. Menurut Wawan Ridwan (2000:16) ada empat sasaran dalam pemanfaatan dan pengembangan hutan yaitu :

1. Membina keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang dalam jangka waktu yang panjang.
2. Melestarikan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang dalam jangka panjang.
3. Mencegah kemerosotan mutu lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
4. Membimbing manusia Indonesia dari posisi perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan.

Keempat sasaran pemanfaatan dan pengembangan hutan sebagai obyek dan daya tarik wisata di atas tetap berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyelamatan hutan sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu Pengusahaan Hutan.
Peningkatan mutu pengusahaan hutan ini sangat terkait dengan usaha menyeimbangkan antara luas area hutan dengan luas daerah masing-masing, sehingga dapat dikelola dengan baik serta mutu hutan dapat dijaga kelangsungannya.
2. Reboisasi dan Penghijauan.
Reboisasi dan penghijauan sangat penting artinya dalam meningkatkan mutu lingkungan, terutama pemanfaatan lahan kritis. Reboisasi dan penghijauan dapat mengurangi erosi tanah dan banjir, terutama di kawasan daerah aliran sungai. Salah satu pohon yang dikenal mampu menahan tanah, terutama di daerah-daerah curam adalah pohon bambu.
3. Pengembangan Taman Nasional.
Tujuan pengembangan taman nasional adalah untuk membangun wilayah penyangga yang mampu menopang kebutuhan penduduk sekitarnya dan mencegah kerusakan hutan. Oleh karena itu perlu dilakukan zona seperti wilayah penyangga (*buffer zone*), wilayah pengembangan (*development zone*), wilayah rimba (*widerness zone*) dan wilayah inti (*sanctuary zone*). Bambu sebagai salah satu pohon yang banyak tumbuh di Indonesia, kegunaannya banyak sekali seperti menahan tanah dari erosi, tanah longsor, banjir, bahan baku keperluan rumah tangga, bahan baku kerajinan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta sebagai obyek dan daya tarik wisata. Supaya pohon bambu tidak mengalami kepunahan, maka konservasi sangat diperlukan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Adat Penglipuran yang terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dengan ketinggian sekitar 600-700 meter di atas permukaan laut sehingga suhu udara relatif sejuk. Hutan Bambu yang ada di Desa Penglipuran mempunyai luas areal sekitar 45 hektar dengan berbagai jenis bambu yakni terdiri dari Bambu Petung, Bambu Jajang Aya, Bambu Jajang Abu, Bambu Tali, Bambu Papah, Bambu Suet dan jenis bambu lainnya, beberapa sudah punah. Hutan Bambu ini sebagian dimiliki oleh desa adat dan sebagian lagi dimiliki oleh masyarakat. Di samping Hutan Bambu Desa Penglipuran terkenal dengan bangunan tradisional Bali yang merupakan ciri khas sehingga sekarang disebut sebagai Desa Tradisional Penglipuran.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Menurut sifatnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu : (1) Data Kualitatif, yaitu : data ini meliputi ide, ungkapan pandangan dari tokoh masyarakat setempat, pengelola Hutan Bambu, pemandu wisata, Pemda Bangli (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) dan wisatawan yang berkunjung ke Desa Penglipuran. (2) Data Kuantitatif, yaitu : data ini berupa jumlah kunjungan wisatawan, jumlah penduduk, jumlah pengelola Hutan Bambu di Desa Penglipuran, Bangli.

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu : (1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui wawancara dengan, tokoh masyarakat, pramuwisata Dinas Pariwisata, pengelola dan melalui kuisisioner terhadap wisatawan. (2) Data Sekunder, yaitu : data yang diperoleh bukan dari pihak pertama, tapi data ini diperoleh melalui buku atau literatur yang relevan dan mempunyai sangkut paut atau hubungan dengan penelitian, hasil penelitian yang berwujud laporan serta data resmi dari instansi yang terkait seperti monografi desa dan konsep-konsep dari berbagai pustaka yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisa penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Observasi

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian sehingga berada bersama dengan objek yang dikelilinginya untuk mendapatkan gambaran dan pengamatan yang jelas tentang potensi Hutan Bambu serta keadaan yang ada di daerah penelitian. Dalam hal ini menggunakan teknik pencatatan dari jenis dan macam-macam bambu yang ditemukan serta dokumentasi yang berupa foto-foto potensi Hutan Bambu.

3.3.2 Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelum tanya-jawab berlangsung dengan informan. Metode wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan kunci yang dianggap mengetahui tentang Hutan Bambu seperti Kepala Desa Penglipuran, Tokoh Adat Penglipuran dan Diparda Bangli. Di samping itu juga dilakukan wawancara terhadap pramuwisata.

3.3.3 Kuisisioner

Pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada wisatawan, yang berisi tentang faktor yang menyebabkan wisatawan kurang minat ke obyek hutan bambu sebagai ekowisata.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah tokoh masyarakat, pemandu wisata, pengelola, Kadis dan staf dinas pariwisata Bangli. Pengambilan informan dalam penelitian ini didasarkan beberapa kriteria yaitu (1) mereka memiliki pengalaman dalam mengantar wisatawan ke hutan bambu (2) mereka mendalami seluk beluk obyek wisata hutan bambu (3) Mereka memiliki pengetahuan dan kritis terhadap berbagai kasus yang muncul yang berkaitan dengan faktor yang menyebabkan wisatawan kurang minat ke obyek wisata hutan bambu dan strategi pengembangan apa yang sesuai dilaksanakan oleh pengelola.

Pandangan wisatawan terhadap obyek wisata hutan bambu mempergunakan quota sampling artinya pengambilan sampelnya berdasarkan jatah yang telah ditentukan sebanyak 25 wisatawan. sedangkan untuk memperoleh datanya dengan accidental artinya wisatawan yang dijadikan sampel yang kebetulan bertemu di lokasi penelitian pada saat pencarian data, dan dipandang wisatawan yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Antara 2004:54).

3.5 Teknik Analisis Data

Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara lengkap dan tepat data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan penelitian, yakni faktor yang menyebabkan wisatawan kurang minat ke obyek wisata hutan bambu sebagai atraksi ekowisata.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Potensi Hutan Bambu

Hutan Bambu yang terdapat di Desa Penglipuran, terletak di sebelah utara Desa Penglipuran yang luasnya mencapai 45 Ha. Di Hutan Bambu tersebut terdapat beberapa macam bambu yang mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda, disamping itu terdapat juga beberapa pohon yang berada di sekitar Hutan Bambu tersebut seperti tanaman kakao, pohon kelapa, pohon nangka, pohon durian dan pohon pisang.

Hutan Bambu sebagai salah satu obyek wisata yang terdapat di Desa Penglipuran, memiliki beberapa potensi Untuk dikembangkan menjadi obyek wisata, sehingga wisatawan berada lebih lama dan pendapatan masyarakat bertambah serta dapat melestarikan Hutan Bambu itu sendiri. Adapun potensi dimiliki Hutan Bambu dapat dijadikan obyek wisata sebagai berikut :

1. Ekowisata

Hutan Bambu dapat dijadikan sebagai ekowisata dengan mengajak wisatawan untuk menikmati sejuknya berada dalam Hutan Bambu, menikmati pemandangan alam, mengetahui bermacam jenis bambu dan dapat juga menikmati beberapa tanaman seperti pohon durian, nangka, kakao, pisang pohon kelapa dan yang lainnya.

2. Pelestarian

Hutan Bambu juga bisa dijadikan sebagai obyek penelitian bambu oleh wisatawan yang bertujuan untuk melakukan penelitian, oleh karena itu perlu adanya tempat khusus untuk konservasi. Adapun jenis bambu yang terdapat di Desa Penglipuran meliputi.

A. Bambu Jajang yang terdiri dari

- 1.1 Bambu jajang aya.
- 1.2 Bambu jajang abu (sudah punah).
- 1.3 Bambu jajang papah (sudah punah).
- 1.4 Bambu jajang panteg (sudah punah).
- 1.5 Bambu jajang batu.

B. Bambu Tali, yang terdiri dari

- 2.1. Bambu tali petung.
- 2.2. Bambu tali tutul (sudah punah).
- 2.3. Bambu tali suet.

C. Bambu tamblang, bambu gading (sudah punah) dan bambu buluh.

Bambu ini berguna sebagai perlengkapan upacara keagamaan.

3. Bersepeda (*Cycling*)

Di areal Hutan Bambu juga tersedia jalan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Hutan Bambu baik dengan berjalan kaki maupun bersepeda. Hal ini dapat dilakukan dengan mudah dan lancar, karena kondisi jalan yang tersedia

cukup bagus dan sudah terpaving, sehingga memudahkan wisatawan untuk melakukan perjalanan.

4. Berkuda

Hutan Bambu yang luasnya 45 hektar dan disertai jalan yang lebarnya 4 (empat) meter dapat dijadikan obyek wisata berkuda, sehingga wisatawan dapat mengelilingi Desa Penglipuran dari arah utara sampai selatan desa. Di mana pemandangannya sangat bagus, karena selain menikmati Hutan Bambu wisatawan juga dapat menikmati perkebunan yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

5. Kerajinan

Hutan Bambu selain untuk dinikmati juga dapat dibuat berbagai jenis kerajinan yang dapat dibeli oleh wisatawan sebagai salah satu kenang-kenangan dari Desa Penglipuran. Hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan masyarakat setempat.

4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wisatawan Kurang Minat Ke Hutan Bambu sebagai Atraksi Ekowisata

4.2.1 Faktor Intern

Faktor internal yang dapat mempengaruhi wisatawan berkunjung ke hutan bambu sebagai atraksi ekowisata adalah :

1. Perencanaan hutan bambu sebagai atraksi ekowisata sepenuhnya dari pihak pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah belum melakukan promosi dengan baik dan tepat sasaran.
3. Belum melakukan kerja sama dengan biro perjalanan wisata.
4. Masyarakat setempat belum merasakan manfaat ekonomi dari atraksi ekowisata.
5. Tempat peristirahatan wisatawan sekarang keadaannya sudah rusak dan belum diperbaiki oleh pemda maupun penegelola.
6. Kebersihan sepanjang jalan yang terdapat di tengah-tengah hutan bambu belum dibersihkan, sehingga kelihatan kotor.
7. Belum tersedianya tempat penjualan souvenir dari bambu di tempat peristirahatan wisatawan.

4.2.2 Faktor Eksternal

Pendapat pramuwisata terhadap jarang nya wisatawan berkunjung Ke Hutan Bambu, juga disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pramuwisata mengatakan tidak terdapat wisatawan berkunjung ke Hutan Bambu karena waktu kunjungan terbatas yakni kurang lebih 30 menit.
2. Padatnya acara perjalanan yang telah ditentukan oleh biro perjalanan.
3. Wisatawan yang mengikuti perjalanan tujuannya hanya bersenang-senang (Tidak terdapat yang meneliti).
4. Hanya menawarkan Hutan Bambu saja dan perlu ditawarkan hal-hal yang dapat menarik minat wisatawan.
5. Terbatasnya fasilitas yang terdapat di dalam Hutan Bambu seperti tempat untuk beristirahat dan tempat untuk minum.
6. Jarak tempuh ke Hutan Bambu terlalu lama, sehingga perlu alat transportasi untuk mengelilingi Desa Penglipuran seperti sepeda, dokar.

Sedangkan persepsi wisatawan mengatakan,(1) wisatawan tidak mengetahui adanya obyek wisata hutan bambu sebanyak 92% ,(2) Biro Perjalanan tidak memberitahukan obyek tersebut sebanyak 90%, (3) Pemandu wisata juga tidak

memberitahukan obyek wisata hutan bambu sebanyak 92% dan (4) wisatawan tidak mengetahui terdapat obyek wisata yang lainnya selain rumah tradisional penglipuran seperti Taman Pahlawan, kebun jeruk, pohon kakao sebanyak 92%.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Faktor internal yang mempengaruhi wisatawan kurang minat berkunjung ke Hutan Bambu sebagai atraksi ekowisata adalah Hutan bambu belum tertata dengan baik, beberapa jenis bambu sudah punah, fasilitas penunjang di dalam hutan bambu sudah rusak, perencanaan belum memenuhi prinsip ekowisata(salah satunya belum tersedia daerah konservasi), pengelola dan pemerintah setempat belum melakukan promosi ke negara yang senang dengan hutan bambu, belum melakukan kerja sama dengan biro perjalanan dan yayasan bambu Nyuh Kuning di Gianyar.
2. Sedangkan faktor eksteren yang mempengaruhi di antaranya Biro Perjalanan Wisata belum menjual Hutan Bambu sebagai ekowisata, pramuwisata hanya mengunjungi Desa Penglipuran selama kurang lebih 30 menit serta belum terdapat kerja sama antara biro perjalanan dengan pengelola obyek wisata. Serta pendapat wisatawan sebanyak 92% tidak mengetahui keberadaan hutan bambu sebagai atraksi ekowisata

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Hutan Bambu sebagai Ekowisata sebagai berikut :

1. Hendaknya pengelola obyek wisata menata tempat hutan bambu sesuai jenisnya, sehingga memudahkan wisatawan mengenalnya dan memahami kegunaannya.
2. Supaya wisatawan yang berkunjung ke hutan bambu mengetahui jenis bambu dan kegunaannya, maka pengelola hendaknya memberikan papan nama terhadap jenis bambu.
3. Supaya hutan bambu tidak mengalami kepunahan, pengelola dan Pemda Bangli membuat tempat konservasi hutan bambu di sekitar areal hutan bambu, mengadakan kerja sama dengan Yayasan Nyuh Kuning di Ubud. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke hutan bambu dapat ikut berpartisipasi dalam konservasi.
4. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat setempat hendaknya setiap pengunjung ke hutan bambu diberikan kenang-kenangan kerajinan bambu dengan harga yang sudah termasuk dalam paket wisata.
5. Supaya masyarakat setempat merasa memiliki dalam mengelola obyek wisata hutan bambu, hendaknya Pemda Bangli menyelenggarakan dan mendidik masyarakat lokal untuk menjadi pramuwisata lokal, sehingga dapat menambah pendapatannya.
6. Pengelola obyek wisata hendaknya membuat satu paket kunjungan Desa Adat Penglipuran yakni dari Hutan Bambu mengelilingi desa menuju Tugu Pahlawan baru melihat Desa Penglipuran dan terakhir baru ke Pura Desa Penglipuran.

7. Supaya wisatawan yang berkunjung ke Desa Penglipuran, mengetahui keberadaan hutan bambu, hendaknya pengelola obyek wisata membagikan brosur obyek wisata yang terdapat di Desa Penglipuran.
8. Supaya kerja sama antara biro perjalanan dengan pengelola obyek wisata, berjalan dengan baik, maka pihak pengelola obyek memberikan imbalan kepada pramuwisata atau biro perjalanan.
9. Bagi kalangan akademis, perlu dilakukan penelitian secara mendalam terhadap keberadaan Hutan Bambu terkait dengan konservasi bambu yang sudah punah, studi kelayakan Hutan Bambu dan Perencanaan tentang Hutan Bambu sebagai Ekowisata.

KEPUSTAKAAN

- Anonim. 2000. *Perencanaan Umum Wisata Alam*. Dirjen PHPA Departemen Kehutanan RI.
- _____. *Undang-undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan*.
- _____. 2000. *Kumpulan Peraturan Daerah Tingkat I Bali. Bidang Usaha Pariwisata*. Diparda Propinsi Bali.
- _____. 2008. *Data Kepariwisataan Kabupaten Bangli*.
- _____. 2008. *Data Kepariwisataan Tingkat I Bali*.
- _____. 2008. *Monografi Desa Penglipuran*.
- _____. SK Bupati Kepala Daerah Tk.II Bangli No. 15 Tahun 1991 *Tentang Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli*.
- Ariawan, Nyoman, 1987. *Pemanfaatan Hutan Bambu Sebagai Atraksi Obyek Wisata di Desa Adat Tradisional Penglipuran Kecamatan Bangli Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, PS. D4 Pariwisata Unud, Denpasar*.
- Anom, I Putu. 2005, *Perencanaan Kawasan Bendungan Telaga Tunjung Sebagai Obyek Dan Daya Tarik Di Kabupaten Tabanan*
- Antara, I Putu, 2002, *Materi Perkuliahan Metodologi Penelitian, Pascasarjana Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana, Denpasar*.
- Bawa, I Wayan. 1998. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengantisipasi Perkembangan Pariwisata Di Bali*. Majalah Analisa Pariwisata Volume 2 No. 1 Denpasar, PS. Pariwisata Universitas Udayana.
- Backler, Wendi. 1996. *Pedoman Praktek Penyusunan Rencana Strategi*. Proyek Pengembangan Pusat Studi Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Choy, Darry Low. 1997. *Makalah Ecotourism Planning*. Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan. Penerbit: ITB, Bandung.
- Dalem, A.A Raka, 2002. *Makalah Mengenal Ekowisata, Lokaarya Pelatihan Ekowisata Se-Bali, Kementerian Lingkungan Hidup, Denpasar*.
- Eplerwood, M. 1999. *The Ecotourism Society*. Seminar dalam Reuni Fakultas kehutanan UGM Yogyakarta. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fandeli, Chafid. 2000. *Pengusahaan Ekowisata*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
- Faufikurrahman. 1997. *Makalah Ekowisata di Tangkuban Perahu dan Ciater*. Lokakarya perencanaan Pariwisata berkelanjutan. Penerbit ITB, Bandung.

- Faulkner, Bill. 1997. *Makalah Perkembangan Pariwisata di Indonesia: Perspektif Gambaran Besar*. Penerbit: ITB, Bandung.
- Goodwin, Harold. 1997. *Makalah Ekowisata Terrestrial*. Lokakarya Perencanaan Pariwisata berkelanjutan. Penerbit : ITB, Bandung
- Gunawan, Myra P,1997, Makalah Pariwisata di Indonesia Dulu, Kini dan yang akan Datang. Lokakarya Pariwisata Berkelanjutan. Penerbit ITB, Bandung.
- Kodhyat, SH. 1997. *Makalah Hakekat dan Perkembangan Wisata Alternatif*. Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan. Penerbit ITB, Bandung.
- Manuaba, IB Adnyana, 1998. *Makalah Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*, PS. Pariwisata, Denpasar
- Poon, Auliana. 1997. *Tourism Technology and Competitive Strategies*. Editor Myra Gunawan P. Penerbit : ITB, Bandung.
- Pendit, S, Nyoman. 1990. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar*. Pradnya Paramita Perdana., Jakarta.
- Ridwan, Wawan, 2000. *Makalah Kebijakan Pengembangan Hutan Untuk Ekowisata*, Departemen Kehutanan RI, Jakarta
- Simpen I Nengah, 1999. *Strategi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Tenganan*. PS. D4 Pariwisata, Denpasar..
- Sumodiningrat,.Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. PT. Gramedia, Pustaka Utama., Jakarta.
- Silver, Christopher. 1997. *Makalah Ekowisata Berbasis Kota di Indonesia*. Lokakarya Perencanaan panwisata Berkelanjutan. Penerbit : ITB, Bandung.
- Supriana, Nana. 1997. *Makalah Pengembangan Pariwisata Alain di Kawasan Pelestarian Alain Suatu. Peluang Ekonomi, Peran serta Masyarakat dan Ramah Lingkungan Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam*. Lokakarya Perencanaan Pariwisata berkelanjutan. Penerbit : ITB, Bandung.
- Sulthoni, Achmad. 2000. *Makalah Pengembangan Ekowisata, Dalam Kawasan Konservasi*. Seminar Dalam Reuni Fakultas Kehutanan UGM. Penerbit Pustaka pelajar ,Yogyakarta.
- Sensudi, Edi. 1997. *Makalah Ecotourism di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*. Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berkelanjutan. Penerbit ITB, Bandung
- Hakim, Luchman. 2004. *Dasar-Dasar Ekowisata*, Bayumedia, Malang.
- Yoeti, Oka A. 1999. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung Angkasa.
- _____. 1989. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI MODAL PERANGKAT INFRASTRUKTUR SDM MENGHADAPI PASAR GLOBAL

Yohanes Kristianto
inselbali@yahoo.com
Dosen Fakultas Pariwisata Unud

Abstrak

Indonesia berada pada posisi strategis dalam persaingan SDM global baik di kawasan ASEAN, Asia, maupun dunia. Namun, Indonesia belum cukup memiliki infrastruktur kompetensi SDM yang mampu bersaing dengan SDM asing yang mulai masuk ke pasar kerja Indonesia. Indonesia dihadapkan permasalahan perangkat infrastruktur kompetensi SDM. Pihak stake holders dan lembaga pendidikan/pelatihan belum memiliki persepsi yang sama, sehingga isu pasar global SDM masih dalam tataran wacana. Sebaliknya, pihak industri (user) telah memberikan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja.

Sebenarnya, Indonesia telah memiliki modal dan perangkat pengembangan infrastruktur SDM yang memadai. Direktorat Jendral Perguruan Tinggi telah merumuskan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai paket pengembangan kompetensi acuan standar minimal pengembangan ranah-ranah kompetensi di perguruan tinggi, Begitu juga, lembaga pendidikan vokasi telah mengadopsi dan mengadaptasikannya dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang juga menjadi standar minimal dalam pengembangan kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Disinilah, terjadilah kesenjangan lembaga pendidikan/pelatihan terhadap standar kebutuhan pasar/industri.

Untuk itu, aktor pembentuk kompetensi yang mencakup lembaga pendidikan/pelatihan, instruktur, guru, dan dosen memiliki tanggung jawab dalam membangun dan memelihara, serta menjamin kompetensi SDM lulusannya sesuai dengan kebutuhan industri/pasar kerja. Penggunaan standar kompetensi hendaknya disesuaikan dengan pihak industri, sehingga lembaga pendidikan/pelatihan memiliki model standar kompetensi yang gayut dengan pasar. Dalam rangka pemeliharaan dan penjaminan kompetensi SDM, sebuah lembaga pendidikan/pelatihan perlu memiliki lembaga independen dalam mensertifikasi kompetensi SDM lulusannya. Sehingga SDM lulusannya dapat dijamin kompetensinya selama pendidikan/pelatihan hingga SDM tersebut berada di dunia kerja/industri.

Kata Kunci: *Kompetensi, Sertifikasi Kompetensi KKNI, SKKNI.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakta ketertinggalan Indonesia dalam menyongsong SDM global 2015-2020 untuk kawasan ASEAN/global mulai kita rasakan dampaknya. Benarkah ini sebagai bukti bahwa SDM kita masih rendah kualitasnya dan belum siap untuk bersaing jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN khususnya? Ironisnya pemerintah

Indonesia telah memiliki kesepakatan untuk meratifikasi globalisasi pasar kerja melalui forum WTO sejak tahun 1994 dan tahun 1999 menyatakan dirinya masuk keanggotaan G20. Bahkan Indonesia berperan aktif dalam keanggotaan dengan organisasi-organisasi lainnya seperti APEC, AFTA, GATT, CAFTA, ANAFTA, KAFTA, IAFTA, ASEAN. Konsekuensi terhadap hal ini tentunya akan semakin diwarnai persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja (Diklat Asesor, Mei 2013).

Dalam hitungan hari saja, Indonesia akan dibanjiri SDM asing jika Indonesia tidak mempersiapkan infrastruktur SDM yang kompeten dengan penetapan regulasi dan manajemen birokrasi, serta pendidikan SDM yang matang. Meskipun hal ini terasa agak terlambat, namun setidaknya ada strategi dan kebijakan pemerintah terhadap SDM dalam menghadapi arus global yang hanya tinggal hitungan hari saja. Di Thailand, bahasa Indonesia telah menjadi salah satu bahasa asing yang diajarkan di lembaga pelatihan kerja. Hal ini berarti SDM Thailand telah mempersiapkan daya saing pasar kerja di Indonesia. Bahkan sebuah perusahaan Korea yang menang *tender* di Bali harus mempekerjakan tukang las langsung dari Korea. Apakah di Bali kekurangan tukang las? Permasalahannya adalah tukang las di Bali atau di Indonesia belum tersertifikasi kompetensinya. Lalu bagaimana dengan SDM kita di bidang pariwisata ? (Deklarasi Asosiasi Instruktur Seluruh Indonesia Bali, Juni 2013).

Memang, tuntutan dunia kerja saat ini memaksa SDM kita harus memiliki kompetensi adaptif terhadap akselerasi teknologi yang sangat cepat dan dimensi kompetensi yang kompleks sesuai dengan standar yang diminta oleh pasar industri. Hal ini nampak tidak sejalan dengan derasnya arus global yang masuk ke Indonesia dengan ditandai teknologi-teknologi baru, pemegang-pemegang saham/ pemilik modal baru, organisasi produksi berskala dunia yang kurang harmonis antara pembangunan ekonomi dan pekerjaan yang tersedia dan perubahan persyaratan dan siklus hidup yang lebih pendek dari suatu produk. Kesenjangan kompetensi apa yang diajarkan/dilatihkan pada peserta didik/latih masih jauh dari harapan kualifikasi kompetensi pihak industri. Hal ini terbukti SDM kita yang sering ditempatkan pada bidang kompetensi yang sesuai atau bahkan ditolak di tempat *training/praktek*. SDM kita belum memiliki label kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi dunia kerja nyata. Ini mestinya menjadi tanggung jawab bersama setiap lembaga pendidikan akademik maupun vokasi.

Sebagai konsekuensi logis terhadap kebutuhan pasar, lembaga pendidikan/pelatihan harus memelihara kompetensi peserta didik/latihnya agar tetap relevan dengan standar kebutuhan industri. Pemeliharaan kompetensi tentunya dilakukan dengan proses sertifikasi kompetensi. Kompetensi-kompetensi apa sajakah yang menjadi target yang sesuai dengan kebutuhan pasar/industri (*market driven*).

1.2 Permasalahan

Latar belakang tersebut di atas harus menjadi bahan introspeksi mendalam bagi dunia pendidikan kita yang juga bertanggungjawab sekaligus berperan mendidik dan mencetak SDM kita. Paradigma lembaga pendidikan mesti berubah dengan model dan standar pendidikan - kurikulum serta pembelajaran yang sesuai dengan perubahan kondisi lapangan kehidupan. Perubahan ini hendaknya juga menjadi komitmen KEMENDIKNAS untuk melihat fakta yang ada saat ini. Dengan demikian masalah tentang sertifikasi kompetensi dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur SDM dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sudahkah lembaga pendidikan akademik/vokasi menerapkan pendidikan/pelatihan menurut UNESCO yaitu, pendidikan yang humanis, pengembangan pendidikan yang

terkait dengan pembangunan, dan pendidikan yang dapat menjawab fenomena *anthropos, tekne, oikos, dan etnos*?

2. Sudahkah lembaga pendidikan akademik/vokasi membekali SDM kita dengan kurikulum yang mengembangkan (1) *learning how to know*, (2) *learning how to do*, (3) *learning how to be*, dan (4) *learning how to live together* sesuai the International Commission on Education for the 21 st Century dari UNESCO?
3. Sudahkah lembaga pendidikan akademik/vokasi kita memiliki komitmen untuk memberikan label kompetensi terhadap lulusannya agar dikenali oleh pihak industri?
4. Siapkah lulusan kita memenuhi standar kompetensi yang dituntut oleh pihak industri lokal maupun global?
5. Sudahkah kurikulum yang dikembangkan lembaga pendidikan akademik/vokasi mengadaptasi dan mengadopsi tuntutan pasar kerja lokal maupun global?
6. Apakah aktor pembangun kompetensi (guru/dosen) hanya berkutat dalam dunia akademik yang masih kurang tanggap terhadap kebutuhan industri?

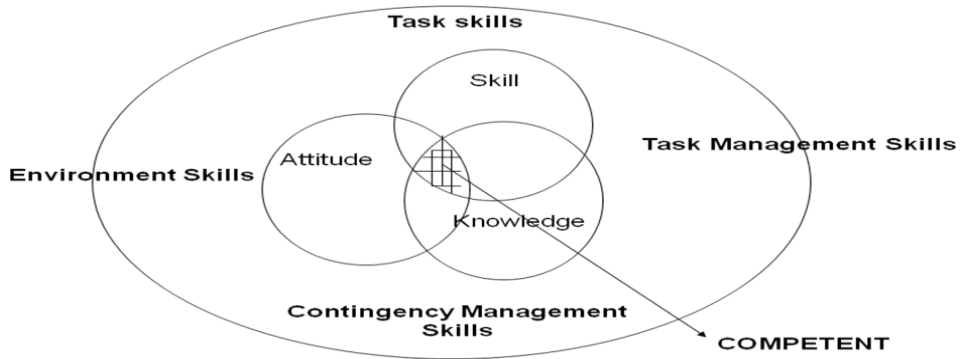
II. TINJAUAN PUSTAKA

Dunia kerja mempersyaratkan berbagai standar kompetensi yang harus dipenuhi. Standar kompetensi tersebut sangat erat berkaitan dengan kompetensi kerja yang nyata. Dalam hal ini Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2010/2011 telah mengkaji implikasi dan strategi implementasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI dimiliki oleh setiap Negara yang pada dasarnya merupakan Pemaketan Unit Kompetensi. KKNI inilah yang menjadi pedoman pengembangan kompetensi di lembaga pendidikan akademis. Sementara itu, untuk lembaga pelatihan/ kejuruan menurunkan pemaketan kompetensi tersebut dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Untuk itu, penulis akan menampilkan beberapa definisi operasional berkaitan dengan dimensi kompetensi, sertifikasi kompetensi, KKNI, dan SKKNI.

2.1 Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan (melaksanakan tugas) yang dilandasi oleh pengetahuan (*Knowledge*), keterampilan (*Skills*) dan sikap kerja (*Attitude*) untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Standar kompetensi merupakan kesepakatan tentang kompetensi yang dibutuhkan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh *Stake Holder* atau perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan (SKKNI). Adapun elemen kompetensi pokok yang wajib dikembangkan dalam setiap proses pendidikan/pelatihan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1. Elemen Kompetensi



Sumber : Diklat Asesor, 2013.

Dari gambar elemen kompetensi diatas, masing-masing elemen dijelaskan sebagai berikut :

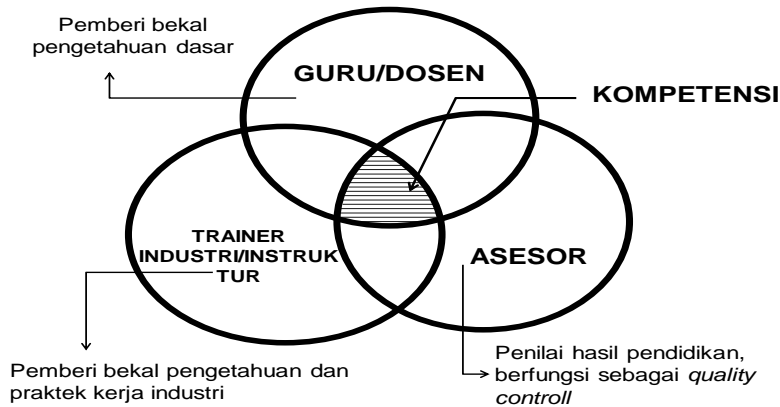
1. *Task Skill* merupakan kompetensi melaksanakan tugas individu (kemampuan melakukan tugas secara teknis profesional);
2. *Task Management Skills* merupakan kemampuan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan;
3. *Contingency Management Skills* merupakan kemampuan merespon dan mengelola kejadian ireguler dan masalah (kemampuan mengantisipasi masalah, dalam melaksanakan pekerjaan; dan
4. *Job/Role Environment Skills* merupakan kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja.

2.2 Sertifikasi Profesi

Sertifikasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengakuan resmi (keabsahan) atas produk, proses, keterangan, kepemilikan barang, atau orang. Sertifikasi untuk orang diberikan karena yang bersangkutan mempunyai kompetensi atas suatu tugas/pekerjaan/jabatan. Proses ini dikenal juga dengan Sertifikasi Kompetensi. Bila yang bersangkutan telah mendapatkan pengakuan atas kompetensinya, maka ia akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat.

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional. Untuk itu, sebuah lembaga pendidikan atau pelatihan harus memiliki perangkat persyaratan sertifikasi yaitu, Standar kompetensi kerja, asesor kompetensi, Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP) atau Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Berikut penulis tampilkan gambar keterlibatan aktor dalam proses sertifikasi kompetensi.

Gambar 2.2. Keterlibatan Aktor



8

Sumber: Diklat Penyusunan Dokumen LSP 2013)

2.3 Standar Kompetensi Nasional

2.3.1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2010/2011) telah menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI/*Indonesian Qualification Framework*). Dalam KKNI dideskripsikan bahwa implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut : (1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (2) memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya, (3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, (4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya, (5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain, (6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Adapun peta KKNI dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Peta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pendidikan		Kualifikasi	Pelatihan / Pengalaman
Akademik	Vokasi		
S3		IX	Ahli 3
	Pend Spesialis	VIII	Ahli 2
S2	Pend Terapan	VII	Ahli 1
S1	D4	VI	Teknisi / Analisis 3
	D3	V	Teknisi / Analisis 2
	D2	IV	Teknisi / Analisis 1
	D1	III	Operator 3
SM		II	Operator 2
SD		I	Operator 1

Sumber : KKNI, 2011.

Adapun penjelasan masing-masing kualifikasi level berdasarkan jenjang pendidikan baik akademik maupun vokasi adalah sebagai berikut :

Kualifikasi Level 1 mencakup kompetensi sebagai berikut: (1) mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan dan tanggung jawab atasannya, (2) memiliki pengetahuan faktual, dan (3) bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

Kualifikasi Level 2 mencakup kompetensi sebagai berikut: (1) mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya, (2) memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul, dan (3) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

Kualifikasi Level 3 mencakup kompetensi sebagai berikut: (1) mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung (2) memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai, (3) mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya, dan (4) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

Kualifikasi level 4 meliputi: (1) mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, (2) menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya, (3) mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif, dan (4) bertanggung jawab pada

pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

Kualifikasi level 5 meliputi: (1) mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, (2) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural, (3) mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif, dan (4) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Kualifikasi level 6 meliputi: (1) mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah, (2) menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural, (3) mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi. Mampu menggerakkan masyarakat untuk menjadi lebih berdayaguna (*community development*), dan (4) bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Kualifikasi level 7 meliputi; (1) mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi, (2) mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner, dan (3) mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Kualifikasi level 8 meliputi: (1) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, (2) mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner, dan (3) mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Kualifikasi level 9 meliputi: (1) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, (2) mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner, dan (3) mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010/2011).

2.3.2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Berdasarkan pada arti bahasa Indonesia, *Standar* diartikan sebagai “ukuran” yang disepakati, sedangkan *Kompetensi Kerja* mempunyai arti sebagai kemampuan

kerja seseorang yang dapat teramati yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja seseorang dalam menyelesaikan suatu fungsi tugas atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan. Kata *Nasional* mempunyai arti berlaku di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan kata *Indonesia* mempunyai arti nama untuk negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pemilik standar tersebut (SKKNI, 2008).

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/ atau keahlian serta sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan tugas/ pekerjaan tertentu yang berlaku secara nasional. Standar yang akan disusun berdasarkan RMCS (*Regional Model Competency Standard*) (SKKNI, 2008). Jadi, secara sederhana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan pernyataan yang disetujui secara nasional mengenai keterampilan, pengetahuan dan sikap serta standar unjuk kerja yang disyaratkan di tempat kerja. SKKNI merupakan standar minimal untuk kompetensi di Indonesia di samping standar khusus (SOP Perusahaan), dan standar internasional (ISO).

III. PEMBAHASAN

Mengacu pada kurikulum yang disarankan UNESCO, Bali yang telah menjadi desa global karena perkembangan pariwisata, harus mempersiapkan diri lebih proaktif lagi. Terutama bagi lembaga pendidikan, dengan menerapkan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada pengajaran klasikal-tradisional (*teacher-centered*), tetapi harus menerapkan strategi membelajarkan dimana peserta didik/latih aktif dan berpartisipasi dalam membentuk pengetahuan (*student-centered*). Dengan demikian, semua elemen dan dimensi kompetensi dapat terpenuhi sesuai standar kompetensi baik standar nasional, khusus, maupun internasional. Program pendidikan/pelatihan yang mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap menjadi suatu kewajiban bagi lembaga pendidikan/keterampilan dalam rangka memenuhi KKNI/SKKNI.

Untuk itu, pendidikan atau pelatihan berbasis kompetensi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi (*Competency Based Training/CBT*) adalah suatu pendekatan pelatihan dan penilaian yang diarahkan pada *outcomes* yang spesifik. Penerapan pendekatan ini membantu individu untuk menguasai keterampilan, pengetahuan dan sikap sehingga mereka mampu menunjukkan hasil kerjanya pada standar di tempat kerja pada kondisi tertentu (Diklat CBT, Mei 2013).

Kejelasan ranah kualifikasi level kompetensi menjadi pertimbangan pengembangan kurikulum pembelajaran di lembaga pendidikan/pelatihan. Peta KKNI hendaknya menjadi acuan pengembangan elemen kompetensi peserta didik dalam setiap bidang pengembangan ipteks. Selama ini, penulis menemukan beberapa program studi atau program pelatihan yang tidak mencerminkan standar KKNI/SKKNI dimana tumpang tindih sering terjadi dalam pengembangan suatu disiplin ilmu/kompetensi tertentu yang kurang memperhatikan kualifikasi level kompetensi yang termaktub dalam KKNI/SKKNI. Dengan demikian, dalam masing-masing jenjang pendidikan/ pelatihan tidak terjadi ketumpangtindihan kompetensi. Sebaran mata kuliah/pelatihan tentunya juga menyesuaikan dengan kualifikasi level kompetensi yang ditargetkan.

Berkaitan dengan KKNi, lembaga pendidikan tinggi sudah seharusnya mengimplementasikannya dalam setiap kegiatan pembelajaran berbasis standarisasi kompetensi. Model dan standar pembelajaran baik kurikulum maupun silabus hendaknya mengembangkan peta kompetensi berdasarkan kualifikasi kompetensi yang akan dicapai dan sesuai dengan standar yang diperlukan pasar. Dengan pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi, diharapkan lembaga pendidikan akademik/vokasi mampu (1) mengembangkan kompetensi kerja individu terhadap standar nasional, (2) memperbaiki kompetensi angkatan kerja Indonesia secara menyeluruh, dan (3) memperbaiki efektifitas dan kemampuan SDM bagi perusahaan/Industri di Indonesia terhadap sesuatu hal yang baru.

Lembaga pendidikan akademik/pelatihan yang berbasis kompetensi dan memelihara kompetensi peserta didik/latihnya dapat menjamin kompetensi lulusannya untuk memasuki dunia kerja. Selain membangun kompetensi, lembaga pendidikan/pelatihan juga wajib mensertifikasi kompetensi lulusannya. Dengan demikian SDM yang dihasilkan memiliki standar kompetensi yang (1) mudah untuk ditulis, di *review* dan di *update*, (2) profesional dan kreatif, (3) memiliki nilai saing yang fair secara profesional, dan (4) *multi-purpose* dan *multi-usage*. Dengan demikian, dalam konteks yang lebih luas standar kompetensi SDM dapat memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh industri serta sesuai dengan pelaksanaan di industri dan dalam rangka menghadapi persaingan bebas.

Dalam persaingan global, standar kompetensi SDM diperlukan untuk menjawab beberapa pandangan industri yang menganggap bahwa sistem pendidikan/pelatihan (1) memiliki lulusan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, (2) menghasilkan para lulusan tidak dapat dipercaya secara kompetensi, dan (3) memiliki pendidik yang kurang memiliki pengalaman di industri dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri, serta (4) tidak sesuai dengan harapan industri untuk ikut serta dalam menentukan apa yang seharusnya terjadi di tempat pelatihan/ pendidikan.

Lalu dimanakah kita sekarang ini dengan semakin derasnya arus globalisasi pasar kerja? Penulis akan memaparkan mengenai posisi Indonesia dengan analisis SWOT sebagai berikut:

1. Indonesia memiliki kekuatan (*Strength*), yaitu Indonesia adalah peserta aktif dalam sidang tingkat regional ASEAN, (2) Indonesia adalah *lead country* untuk *Task Force Manpower Development*, dan (3) Indonesia sudah memiliki SKKNI sebagai *benchmark*. Inilah modal perangkat infrastruktur kompetensi untuk menghadapi pasar kerja global.
2. Namun, Indonesia masih memiliki kelemahan (*Weakness*), yaitu: (1) Indonesia negara yang termasuk kategori transitional dalam sistem CBT (hasil survey ACCSTP Project), (2) SKKNI belum sepenuhnya dikenal dan diterapkan dalam pengembangan SDM, dan (3) masih sedikit SDM Indonesia memiliki sertifikat kompetensi.
3. Terkait peluang (*Opportunities*), Bali masih memiliki peluang untuk masuk masuk kategori pengguna (*user*) dalam sistem CBT dan melakukan koordinasi yang baik disertai peningkatan *good will* dari semua *stake holder*.
4. Untuk itu, sikap (*threats*) yang perlu diambil adalah segera menerapkan CBT di semua bidang pendidikan/pelatihan mengingat perkembangan penerapan sistem CBT yang pesat di negara-negara ASEAN lain seperti Cambodia, Phillipines dan Vietnam dan telah menerapkan MRA di kawasan ASEAN mulai 2008. Sementara itu,

stake holder di Indonesia belum memiliki persepsi yang sama dalam menghadapi ancaman dari luar.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari pemaparan pendahuluan, tinjauan pustaka, dan pembahasan, maka permasalahan sertifikasi kompetensi sebagai perangkat pembangunan infrastruktur kompetensi SDM dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi yang mengembangkan aspek pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) menjadi wajib bagi setiap lembaga pendidikan/pelatihan kerja untuk mempercepat infrastruktur kompetensi SDM yang handal dalam menghadapi pasar kerja global yang hanya menunggu hari saja. KKNl harus menjadi standar pengembangan kurikulum dalam membangun kompetensi peserta didik/latihnya. KKNl menjadi dasar pengembangan kompetensi yang mencakup dimensi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitude*).
2. Bagi pendidikan akademis yang memiliki jenjang kualifikasi level 4 hingga 9, hendaknya mengembangkan KKNl sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sesuai dengan kebutuhan industri/pasar kerja, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengembangan kompetensi di masing-masing jenjang pendidikan.
3. Sebaliknya, di jenjang pendidikan vokasi/ pelatihan kerja telah melaksanakan pengembangan kompetensi peserta latihnya berdasarkan standar minimal kompetensi yaitu SKKNI. Selain SKKNI sebagai standar minimal, lembaga pelatihan juga telah memiliki *benchmark* (acuan pembandingan) standar kompetensi dengan industri baik menggunakan standar khusus maupun standar internasional.
4. Aktor pembangun kompetensi yang terlibat baik instruktur/guru/dosen hendaknya menjadi katalisator dalam membangun, memelihara, dan menjamin kompetensi peserta didik/latih untuk memasuki dunia kerja global. Inilah perlunya rekognisi kompetensi bagi SDM kita dengan memberikan sertifikasi kompetensi yang dimiliki sehingga SDM kita dapat dikenali oleh industri dan mampu bersaing dengan standar yang disepakati baik ASEAN maupun global. Dengan sertifikasi profesi diharapkan SDM kita akan semakin mampu memiliki daya saing yang lebih handal.
5. Perlunya perangkat pemeliharaan dan penjaminan kompetensi peserta didik/latih di setiap lembaga pendidikan/pelatihan yaitu lembaga sertifikasi beserta perangkat organisatorisnya baik asesor kompetensi maupun tempat uji kompetensinya.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Lembaga pendidikan akademik/vokasi perlu mengembangkan model pembelajaran dan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
2. Lembaga pendidikan akademik harus mengembangkan sebaran elemen kompetensi berdasarkan KKNl, sehingga tidak terjadi *overlapping* pengembangan kompetensi peserta didik antara jenjang akademik dan vokasi.
3. Lembaga pendidikan akademik/vokasi perlu memiliki *benchmark* standar kompetensi yang digunakan oleh *user* dalam pasar kerja (industri).

4. Lembaga pendidikan akademik/vokasi hendaknya memiliki perangkat pemeliharaan dan penjaminan kompetensi SDM selama mengikuti pendidikan akademik/vokasi hingga memasuki dunia kerja dengan mendirikan lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang melibatkan pihak industri (*user*).
5. Perlunya persamaan persepsi dan tindakan holistik antara lembaga pendidikan dengan stake holders dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kompetensi SDM menghadapi pasar global.

KEPUSTAKAAN

- AISI.2013. Materi Deklarasi Asosiasi Instruktur Seluruh Indonesia. Bali : Sekolah Tinggi Perhotelan Bali-BI.
- BNSP.2013. Materi Diklat LPK Asesor Balindo Paradiso. Bali.
- _____. 2013. Materi Diklat Competency Based Training. Bali.
- _____. 2013. Materi Sertifikasi Instruktur. Bali: LPK Balindo Paradiso
- DIKTI. 2011. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Jakarta.
- MSC.2012. Job Description and Standard Operational Procedure Meditteranean Shipping Company (MSC-Cruise Lines). Sorento Italy.
- Tim Penyusun SKKNI. 2008. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Jakarta.

KEAMANAN DAN KENYAMANAN WISATAWAN DI BALI (Kajian Awal Kriminalitas Pariwisata)

I Gst. Ag. Oka Mahagangga
I Made Bayu Ariwangsa
I Gst. Ayu Athina Wulandari
oka_mahagangga@yahoo.com
Dosen Fakultas Pariwisata Unud

Abstract

It couldn't be denied that security and convenience are related to image branding of Bali as a tourist destination in Indonesia. The image as the island of the gods has been threatened by many factors, both outside and inside Bali itself. It is to bear in mind that security and convenience for tourists are not merely the police's duties, but also the responsibility for all Balinese components such as local government, security officers, tourism stakeholders, local society and tourist itself. The involvement and cooperation of those components are the keys to create a better security and convenience situation in Bali.

Keywords: *Security, Convenience, Tourists, Tourism.*

I. PENDAHULUAN

Keamanan menjadi isu relevan pada dekade terakhir ketika terjadi berbagai macam teror dan tindak kriminalitas yang menonjol di berbagai belahan dunia. Sebelumnya keamanan hanya menjadi isu sampingan terutama dalam konteks kepariwisataan. Jika disimak secara mendalam keamanan justru faktor dominan menentukan suatu destinasi wisata layak untuk dikunjungi. Tidak ada wisatawan yang mau berwisata ke daerah konflik atau rawan tindak kriminalitas karena pada dasarnya aktifitas berwisata adalah untuk memenuhi kebutuhan berrekreasi, hiburan, dan kenyamanan yang dikenal sebagai *leisure and recreation* (Mahagangga, 2011 : 58).

Keamanan berwisata di dunia internasional telah lama menjadi perhatian serius, karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan wisatawan. WTO (World Tourism Organization, dalam Gromang 1991) sudah mengeluarkan buku sebagai kumpulan dari rumusan-rumusan untuk memantapkan keselamatan dan keamanan para wisatawan. Menurut buku panduan WTO tentang keselamatan dan keamanan wisatawan, perlu dipertimbangkan 4 kemungkinan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam hal perencanaan keselamatan dan keamanan wisatawan. Risiko tersebut adalah (1) lingkungan hidup manusia dan lembaga non pemerintahan (kejahatan, kekerasan, terorisme, konflik, dll), (2) sektor-sektor pariwisata dan sektor-sektor terkait (standar keselamatan bangunan, sanitasi, lemahnya hukum, dll), (3) Wisatawan Perorangan/Mandiri (kecelakaan, kondisi kesehatan, perilaku wisatawan terhadap penduduk lokal, peredaran obat terlarang, kunjungan ke tempat-tempat bahaya, kehilangan karena kelalaian), (4) Risiko-risiko terhadap alam dan lingkungan (tidak

paham dengan kondisi geografis setempat, tidak siap dengan obat, salah makan, ketidaksiapan menghadapi lingkungan alam).

Keamanan dan kenyamanan wisatawan adalah suatu keadaan yang diharapkan stabil, menimbulkan perasaan yang tenang tanpa disertai kekhawatiran dari orang-orang yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat tujuan dan menginap selama beberapa waktu. Rasa aman dan nyaman mutlak diperlukan bagi para wisatawan untuk mewujudkan rasa puas mereka dalam berwisata. Orang asing yang berniat berkunjung ke Bali ketika mengetahui situasi dan kondisi Bali dari media massa bahwa sering terjadi tindak kriminal, bukannya tidak mungkin mereka akan mengalihkan waktu liburan mereka ke daerah tujuan wisata lain. Suatu ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan sangat berarti bagi setiap wisatawan karena mereka mencari kepuasan berwisata bukan mencari masalah dalam berwisata (Mahagangga, 2008).

Melihat keamanan dan kenyamanan wisatawan di Bali menggunakan pendekatan kualitatif difokuskan kepada kondisi secara natural/alamiah. Artinya, keamanan dan kenyamanan wisatawan berkunjung ke Bali, bukan di ukur secara kuantitas melainkan sebagai deskripsi yang kemudian berupaya diinterpretasi untuk menemukan makna sebagai suatu fenomena. Sehingga sebagai kajian awal diharapkan ada penelitian-penelitian lanjutan untuk menemukan upaya-upaya yang tepat mewujudkan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan di Bali.

II. PEMBAHASAN

Sewajarnya Gubernur Bali Made Mangku Pastika berencana mengajukan Ranperda tentang pengelolaan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat berstandar internasional di tahun 2009 (Radar Bali, 2008). Terdapat dua hal penting sebagai substansi Ranperda tersebut yaitu *crisis centre* dan *crisis service* yang dipusat pada Badan Kesbangpol Linmas dengan sistem *Emergency Service Respons (ESR)* yang berstandar internasional. Sampai tahun awal tahun 2010 ini, sistem ESR sudah aktif di beberapa titik daya tarik wisata (Kota Denpasar, Kuta dan Nusa Dua) yang difokuskan terhadap kerawanan bencana alam.

Keamanan mutlak berlaku dalam dunia industri moderen. Pariwisata jelas berkaitan dengan keramahan, kesantunan, kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Jika tidak begitu lupakan saja mimpi besar membangun sebuah daerah yang kaya objek wisata sebagai sumber nafkah masyarakat (Tokoh, 2008). Upaya dari Pemerintah Provinsi Bali patut disambut positif, tetapi yang terpenting ialah keberlanjutannya yang sering dipertanyakan karena secara kuantitatif tindak kriminal dari tahun ke tahun terus meningkat. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pemasangan *cctv (circuit camera television/kamera pengintai)* bekerja sama dengan Pemkot Denpasar. Namun, karena berbagai keterbatasan dari 17 *cctv* yang dipasang, hampir semua sudah tidak berfungsi (Nusa Bali, 2008). Tidak salah jika ada keluhan dari masyarakat tentang sistem keamanan di Bali yang hangat-hangat tahi ayam dan terus meminta upaya aparat kepolisian bertindak lebih baik lagi (Denpost, 2009).

Dapat diamati permasalahan keamanan bukan hanya menyangkut *political will*, melainkan juga monitoring dan evaluasi yang pasti akan menentukan suatu keberlanjutan program jika dilaksanakan secara proporsional dan profesional. Harus disadari bersama, program apa pun itu terlebih menyangkut keamanan dan kenyamanan di Bali memerlukan peran, koordinasi dan tanggungjawab segenap pihak untuk mewujudkan. Apabila hanya dilaksanakan secara parsial, maka dapat ditebak,

hasilnya pun tidak akan tepat sasaran. Beberapa program pemerintah sudah menunjukkan kenyataan ini, yang pada akhirnya banyak program pemerintah tidak berjalan sesuai harapan.

Keunikan sebagai *trade mark* Bali sebagai destinasi wisata sudah tidak diragukan lagi keberadaannya. Bali yang sejak awal abad ke-19 mulai dikenal dengan eksotisme budaya dan keasrian alam, terus tumbuh berkembang, sejalan dengan kedatangan wisatawan lokal maupun asing. Pencitraan Bali pun tumbuh sejalan dengan informasi yang dibawa oleh wisatawan asing, diawali dari mulut ke mulut, media massa dan promosi yang terprogram dari pihak pemerintah maupun *stakeholders* pariwisata setempat.

Pembangunan pariwisata berkembang di belahan Bali selatan dan kini mulai mengarah ke Bali Utara dan Bali Timur. Penataan daya tarik wisata dan kawasan pariwisata dilakukan untuk menjaga citra destinasi dan sebagai usaha memberikan kepuasan kepada wisatawan. Berbagai fasilitas pendukung dibangun untuk memenuhi kepentingan wisatawan mulai dari *home stay, cottages, resorts, kondotel, Hotel* hingga tempat-tempat hiburan. Fakta ini mengarah kepada pengembangan pariwisata di Bali mengarah kepada “pariwisata komplit”, yakni pariwisata dibuat untuk memenuhi permintaan pasar. Padahal, Bali telah memiliki konsep pariwisata budaya yang sangat luar biasa bernilai sebagai suatu upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan dengan mengakomodasi budaya lokal dengan peka terhadap budaya asing (Mahagangga dalam *Bali Post Edisi Rabu Pahing, 17 Juli 2013*).

Kenyataan tersebut mendorong perubahan Bali dari berbagai dimensi pula yang sering tidak disadari memberikan implikasi atau pengaruh negatif selain diakui banyak manfaat positifnya. Mulai dari dampak lingkungan, menyusutnya lahan pertanian, pencemaran air dan udara, transportasi, hingga permasalahan keamanan dan kenyamanan Bali yang kondisinya dikhawatirkan banyak pihak akan semakin mencemari pencitraan pariwisata jika tidak segera ditanggulangi.

Dewasa ini pertumbuhan sektor pariwisata Bali secara kuantitas tidak menunjukkan permasalahan berarti, namun secara kualitas terjadi kecenderungan penurunan daya beli wisatawan mancanegara yang disebabkan perbedaan latar belakang ekonomi dan asal wisatawan yang berkunjung ke Bali setelah periode Bom Bali I 12 Oktober 2002, berbeda dengan periode sebelumnya. Pariwisata memang sangat rentan terhadap berbagai isu, apalagi menyangkut permasalahan keamanan. Buktinya, ketika ekonomi masyarakat Bali terpuruk akibat tragedi Bom Bali I, ternyata negara tetangga memetik keuntungan. Begitu pula sebaliknya, ketika di Thailand pada tahun 2007 lalu ditimpa konflik politik, para wisatawan Eropa-Amerika Serikat justru mengalihkan kunjungan mereka ke Bali. Hal ini mengindikasikan, jaminan keamanan menjadi salah satu kunci keberlanjutan pembangunan pariwisata di Bali.

Meskipun akhir tahun 2009 dan tahun 2012, data dari Polda Bali menunjukkan penurunan angka kriminalitas di Bali secara umum dibandingkan tahun sebelumnya, namun untuk beberapa jenis kejahatan seperti aksi pencurian dengan pemberatan (curat) kekerasan dan pencurian dengan kekerasan (curas) justru meningkat. Data dari Polda Bali ini hanya mencatat tindak kriminal yang dilaporkan. Tidak dipungkiri terjadi fenomena gunung es, terutama di daerah wisata, sangat mungkin terjadi banyak tindak kriminal namun tidak dilaporkan oleh korbannya karena berbagai alasan.

Tabel 1.1. Jumlah Angka Kriminalitas di Bali, 2008-2012

No	Tahun	Angka Kriminalitas	Pertumbuhan (%)
1	2008	5.921	-
2	2009	5.345	-9,73
3	2010	5.840	9,26
4	2011	5.711	-2,21
5	2012	4.593	-19,58
Rata-rata		5.482	-5,56

Sumber : Polda Bali, 2013.

Angka kriminalitas yang dilaporkan ke pihak kepolisian di Bali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kisaran jumlah tertinggi di tahun 2008 yaitu sebanyak 5.921 kasus dan terendah di tahun 2012 sebanyak 4.593 kasus. Namun perlu disadari bersama, terjadinya penurunan kasus di tahun 2012 bukanlah hal yang terlalu menggembirakan. Apalagi penurunan angka tersebut justru dibarengi dengan peningkatan jenis kejahatan yang sangat mudah ditemui dan bentuknya sangat cepat sekali muncul di permukaan baik melalui media massa maupun pemberitaan di internet yang akan sangat merugikan pencitraan Bali.

Tindak kriminalitas seperti pencurian dengan kekerasan dan penipuan merupakan faktor utama yang mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan mancanegara maupun domestik di Bali. Ketika pertumbuhan perekonomian Bali meningkat maka akan dibarengi dengan pembangunan suprastruktur dan infrastruktur. Hal ini akan menimbulkan persaingan secara ekonomi yang rentan terhadap tindak kriminal ketika seseorang atau kelompok menginginkan capaian materi dengan cara singkat dan gelap mata di luar batas kemampuannya.

Pariwisata dapat memberikan nilai tambah terhadap kehidupan masyarakat. Seperti pada kasus di Solomon, pariwisata sangat memberikan dampak positif dari kesejahteraan hingga pendidikan masyarakatnya. Mereka ingin pekerjaan yang telah mampu memberikan kesejahteraan (sektor pariwisata) dapat terus meningkat penghasilannya dan suatu saat nanti mereka bercita-cita akan kaya raya dan mampu menjadi wisatawan yang berkunjung ke negara lain. Namun, disini lain ketika harapan tersebut tidak mampu dipenuhi, terjadi kekecewaan. Pada kasus Solomon ini, orang-orang yang tidak mampu meraih pekerjaan yang diinginkan akan menjadi gelandangan yang pada akhirnya menumbuhkan angka kejahatan terhadap wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya. Pariwisata di satu sisi dapat meningkatkan pendidikan kepada masyarakat, tetapi di sisi lain berdampak terhadap rasa frustrasi yang berujung kepada tindakan kriminal (Burns dan Holden, 1995). Intensitas tindak kriminal yang meningkat sangat berpengaruh terhadap wisatawan. Mereka tidak akan tenang dalam berwisata karena dihantui oleh bayang-bayang tindak kriminal. Suatu keadaan yang sangat ditakuti oleh berbagai pihak, ketika suatu destinasi wisata terancam oleh pencitraan buruk akibat maraknya tindak kriminalitas (Mahagangga, 2010 : 352).

Faktor kedua adalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) dan minuman keras (miras). Seperti diketahui setiap destinasi wisata sangat rentan terhadap narkoba karena tingginya peminat pengguna narkoba yang semakin fatal karena penggunaannya ternyata tidak hanya wisatawan melainkan masyarakat lokal banyak yang menjadi pecandunya. Kawasan wisata harus menjadi fokus perhatian untuk mewaspadaai peredaran narkoba dan minuman keras tanpa ijin. Secara nasional saat ini sekitar 3,8 juta penduduk Indonesia tercatat sebagai pecandu narkoba. Dari

jumlah sebanyak itu baru 18.000 di antaranya yang sudah direhabilitasi. Sisanya, masih menjadi sasaran pasar peredaran narkoba di Indonesia (Bambang dalam www.seputar-indonesia.com).

Penyalahgunaan narkoba sangat marak di tempat-tempat hiburan malam di Bali dan masih sulit untuk ditertibkan karena upaya dari aparat keamanan (termasuk BNN) belum mampu mengungkap jaringan peredaran narkoba hingga ke akarnya. Peran masyarakat mutlak diperlukan jika menginginkan suatu destinasi minim atau bahkan bersih dari narkoba. Termasuk pula peran dari pemerintah daerah dan *stakeholders* atau pihak industri pariwisata tidak dapat tinggal diam dan hanya menyerahkan penyalahgunaan narkoba kepada aparat keamanan. Peran serta aktif dari segenap komponen jika dilakukan secara sinergis dipastikan akan mendapatkan hasil maksimal sehingga akan mampu menekan peredaran narkoba di Bali.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba terhadap keamanan dan kenyamanan wisatawan tidak secara langsung dirasakan. Melainkan akan dirasakan ketika para pengguna narkoba dan miras "berulah" setelah mereka meng-konsumsi barang terlarang tersebut atau justru sebelum mereka meng-konsumsi (ketagihan, *sakaw*, dll). Para "bandar-bandar kecil" termasuk pengedar narkoba sering dirasakan mengganggu kenyamanan wisatawan. Mereka menawarkan narkoba secara vulgar di sudut-sudut tempat hiburan malam, bahkan di pinggir-pinggir jalan (Kuta). Dugaan kuat juga pengedar narkoba memiliki akses ke dalam beberapa hotel melati atau *home stay*. Sehingga seorang wisatawan sebagai pengguna narkoba dapat minta tolong dengan memesan narkoba kepada pegawai di tempat mereka menginap. Pegawai hotel tersebut sudah memiliki hubungan kerjasama dengan pengedar narkoba sehingga via telepon narkoba sesuai pesanan akan diantar langsung ke kamar hotel.

Untuk penyalahgunaan minuman keras (miras) pada kasus Bali menjadi kendala yang unik karena Bali sejak zaman dahulu sudah dekat dengan minuman keras yang disebut "arak" terkait dengan upacara keagamaan dan secara sosial berfungsi untuk menggalang solidaritas serta secara kesehatan untuk memberikan kehangatan pada pada tubuh dan sudah diakui secara medis apabila penggunaan miras dengan kadar alkohol tidak melampaui batas justru akan memberikan kesehatan pada tubuh.

Bahayanya jika penggunaan miras melampaui batas dan intensitasnya tinggi maka dapat merusak jaringan saraf dan mengganggu sistem metabolisme tubuh manusia. Dampak yang paling berkaitan erat dengan keamanan dan kenyamanan wisatawan tidak jauh berbeda dengan penyalahgunaan narkoba yaitu ketika seseorang berlebihan konsumsi miras maka akan berdampak kepada gangguan kesadaran (*mabuk*) yang cenderung dapat merugikan orang lain. Banyak kasus-kasus perkelahian antar wisatawan maupun antar wisatawan dengan masyarakat lokal yang diakibatkan karena kondisi *mabuk* akibat berlebihan meng-konsumsi miras. Termasuk banyak pula tindak kriminal pencurian dengan kekerasan bahkan perampokan yang dilatar belakangi oleh miras (termasuk narkoba).

Pengendalian miras memang agak sulit dilakukan di suatu destinasi wisata karena miras selain sudah dekat secara sosial dengan masyarakat lokal dan sangat biasa bagi wisatawan (terutama eropa, amerika, rusia dan australia) ditambah dengan maraknya hadir tempat-tempat hiburan malam. Diakui banyak pihak tidak mudah meng-kontrol wisatawan maupun masyarakat lokal untuk meng-konsumsi miras secara tidak berlebihan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menekan peredaran miras masih sebatas pencegahan seperti larangan minum miras bagi anak-anak dan remaja, penggerebekan pabrik miras tanpa ijin dan razia bagi pengendara kendaraan yang

masuk. Terlebih lagi masih sulit menertibkan miras oleh para aparat penegak hukum karena masih perlu kajian menyeluruh untuk langkah-langkah penertiban selanjutnya.

Faktor ketiga adalah prostitusi dan *trafficking* yang sudah menjadi pisau bermata dua bagi dunia pariwisata sejak zaman dahulu. Kehadiran prostitusi jika diperhatikan secara mendalam dan holistik karena adanya permintaan. Jika tidak ada permintaan maka sebenarnya prostitusi akan hilang dengan sendirinya. Dapat dilihat dengan kemajuan dunia komunikasi (*IT*), banyak negara-negara yang melegalkan prostitusi untuk menunjang industri pariwisatanya. Permasalahannya adalah apakah Bali juga akan meniru pola serupa? Mengingat prostitusi saat ini sangat berkaitan dengan *trafficking* sebagai tindak kriminalitas yang terorganisir selain menimbulkan dampak negatif bagi pembangunan pariwisata Bali yang memiliki ikon Pariwisata Budaya juga akan melahirkan banyak permasalahan sosial-budaya sebagai patologi sosial maupun ancaman serius bagi kesehatan masyarakat secara medis (bahaya virus HIV Aids).

Fenomena prostitusi di Bali saat ini bukan hanya akibat *trafficking*, tetapi masyarakat lokal pun diduga ada yang terserap oleh jaringan prostitusi yang diakibatkan karena faktor ekonomi maupun faktor psikologi. Dugaan sementara pelaku prostitusi di Bali sudah merambah kepada oknum-oknum kalangan pelajar/mahasiswa dan ada pula mereka yang sudah memiliki profesi tetap namun menginginkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Meskipun baru sebatas dugaan, pernyataan di atas wajib menjadi perhatian serius karena tidak hanya akan merusak citra kepariwisataan Bali ke depan tetapi juga akan memberikan dampak negatif bagi moral dan mentalitas generasi penerus bangsa.

Faktor keempat adalah ancaman terorisme yang menghantui hampir seluruh destinasi wisata dunia. Bali sudah dua kali terkena bom akibat aksi teror yang sangat berdampak terhadap sektor jasa pariwisata. Dampak bom Bali I tanggal 12 Oktober 2002 dan bom Bali II tanggal 1 Oktober 2005 sangat dirasakan merugikan pariwisata dan pada akhirnya mempengaruhi perekonomian Bali secara keseluruhan. Penurunan angka kunjungan wisatawan, berkurangnya permintaan wisatawan terhadap industri kerajinan, sepi kamar hotel dan restoran merupakan *multipalyer effect* dari aksi para teroris.

Bali menjadi salah satu target utama teroris setelah Jakarta dan beberapa daerah lain di Indonesia karena gaung aksi teror tersebut diharapkan oleh para pelaku terdengar ke seluruh dunia. Padahal korban dari bom tersebut nyatanya bukan hanya wisatawan melainkan banyak warga lokal yang terkena bom tersebut karena berada di TKP. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan seperti ekonomi, sosial, dan psikis justru menimpa warga lokal.

Hasil penelitian menunjukkan tragedi bom Bali sangat dirasakan oleh praktisi pariwisata mulai dari pedagang acung, pengusaha *art shop*, hingga jasa hotel dan restoran. Bom Bali secara nyata mengakibatkan kerugian pembangunan pariwisata Bali (Mahagangga, Dkk, 2012:65) :

1. Angka kunjungan wisatawan menurun.
2. Tingkat hunian kamar hotel menurun.
3. Bar dan Restoran menurun omset-nya.
4. Banyak terjadi PHK.
5. Pergeseran pangsa pasar.
6. Investor ragu untuk menanamkan modal.

7. Krisis berbagai sektor.

Meskipun kondisi keamanan Bali saat ini telah pulih ditandai dengan terus meningkatnya angka kunjungan wisatawan langsung ke Bali, tetapi ancaman terorisme tidak dapat dianggap remeh. Peran Kepolisian sebagai penjaga keamanan, peran pemerintah pusat dan daerah sebagai pengampu kebijakan, peran *stakeholders*/praktisi pariwisata sebagai pelaku, peran akademisi sebagai pengkaji dan peran seluruh komponen masyarakat Bali harus bersama-sama memerangi terorisme sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tanpa kesamaan konsep dan koordinasi serta tindak nyata memerangi aksi terorisme maka Bali harus bersiap-siap menunggu bom waktu selanjutnya. Hal ini disebabkan Bali masih menjadi primadona pariwisata dunia, artinya akan selalu dilirik pula oleh para teroris. Seperti diketahui bersama aksi teroris sebenarnya adalah aksi psikis karena kemampuan mereka yang terbatas namun ingin menunjukkan eksistensinya. Sehingga tempat-tempat destinasi wisata seperti Bali atau pusat Ibu Kota seperti Jakarta akan selalu menjadi sasaran empuk dengan harapan aksi mereka akan terdengar tidak hanya di Indonesia melainkan di dunia.

Faktor kelima adalah kemacetan lalu lintas di Bali terutama di Bali selatan meskipun sudah diupayakan untuk mengatasinya tetapi kemacetan pada ruas-ruas jalan protokol dan di destinasi wisata Kuta, Nusa Dua, Ubud dan Denpasar sangat mengganggu aktifitas wisatawan. Banyak pihak menyalahkan sikap pemerintah di Bali yang mengatasi kemacetan melalui pendekatan konvensional seperti dengan menambah jalan. Perlu tindakan yang integratif dengan memadukan rencana tata ruang dan sistem transportasi. Kemacetan di Bali (khususnya di Kuta, Nusa Dua, Ubud dan Denpasar) hampir menyamai Jakarta di mana pergerakan hanya 9-15 kilometer per jam. Di Bali, Organda mencatat jumlah sepeda motor mencapai 2,2 juta dan mobil berjumlah 350 ribu. Dilihat dari jenisnya, jumlah sepeda motor mencapai hingga 71,81%, disusul mobil pribadi 19% dan sisanya jenis kendaraan yang lain. (Parikesit, dalam www.merdeka.com).

Sangat disayangkan ketika wisatawan yang baru tiba di Bandara Ngurah Rai di pagi, siang maupun sore hari sudah disambut oleh kemacetan di By Pass maupun di Kuta. Entah apa yang akan dijelaskan oleh pihak *travel agent* atau *driver* yang jelas seandainya itu penjelasan yang menyenangkan, tentunya tidak akan bertahan lama di benak wisatawan karena mereka pada akhirnya akan mengambil kesimpulan bahwa manajemen transportasi destinasi wisata Bali belum dapat dikatakan baik. Kenyamanan wisatawan dalam hal ini harus menjadi prioritas karena mereka ke Bali bukan untuk disuguhkan “atraksi wisata” seperti kemacetan, aksi perebutan jalur dan ugat-ugalan pengendara roda dua. Belum lagi sering terlihat para pengendara saling mengumpat yang tanpa disadari fakta ini berkaitan dengan pencitraan pariwisata. Apakah masyarakat Bali masih sopan dan ramah-tamah?

Ada beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi keamanan dan kenyamanan wisatawan seperti maraknya peminta-minta, anak-anak jalanan, penipuan (*money changer* liar, dll), permainan harga, kinerja pelayanan kepada wisatawan (birokrat maupun swasta), hingga *safety vacation* pada destinasi wisata seperti wisata alam maupun *sport tourism*.

III. PENUTUP

Sebelum krisis ekonomi dan keuangan melanda dunia, pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat drastis. Pada tahun 1994, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 537,4 juta orang. WTO memproyeksikan

bahwa pada tahun 2010 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 937 orang wisatawan (WTO dalam Gromang 2003). Tidak salah jika dikatakan, kalau mesin penggerak dalam menciptakan tenaga kerja pada abad ke-19 adalah pertanian, dan pada abad ke-20 adalah industri manufacturing, maka pada abad ke-21, mesin penggerak tersebut adalah pariwisata (Dawid J. de Villiers; Salah Wahab 1999, dalam Pitana 2003).

Dewasa ini pertumbuhan sektor pariwisata Bali secara kuantitas tidak menunjukkan permasalahan berarti, namun secara kualitas terjadi kecenderungan penurunan daya beli wisatawan mancanegara yang disebabkan perbedaan latar belakang ekonomi dan asal wisatawan yang berkunjung ke Bali setelah periode Bom Bali I 12 Oktober 2002, berbeda dengan periode sebelumnya. Pariwisata memang sangat rentan terhadap berbagai isu, apalagi menyangkut permasalahan keamanan. Buktinya, ketika ekonomi masyarakat Bali terpuruk akibat tragedi Bom Bali I, ternyata negara tetangga memetik keuntungan. Begitu pula sebaliknya, ketika di Thailand pada tahun 2007 lalu ditimpa konflik politik, para wisatawan Eropa-Amerika Serikat justru mengalihkan kunjungan mereka ke Bali. Hal ini mengindikasikan, jaminan keamanan menjadi salah satu kunci keberlanjutan pembangunan pariwisata di Bali.

Keamanan dan kenyamanan wisatawan tidak hanya dapat diselesaikan dengan kecanggihan teknologi, sistem yang berstandar internasional atau efektifitas secara *partial* dari salah satu komponen, melainkan peran serta dari bawah, utamanya upaya partisipasi masyarakat yang berhadapan langsung dengan wisatawan hingga pengambil kebijakan Bali harus memiliki visi yang sama bahwa keamanan dan kenyamanan Bali sangat *urgent* untuk diwujudkan, sehingga ditemukan formulasi misi serta strategi yang tepat dalam merealisasikan visi tersebut secara sistemik dalam rangka mewujudkan pariwisata berkelanjutan untuk mensejahterahkan masyarakat.

KEPUSTAKAAN

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi : Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Douglas, Jack D dan Waksler, Franches Chaput. 2002. *Kekerasan Dalam Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya : PT. Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra.
- Dalam TR. Sudarta, dkk (ed). *Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa*. Denpasar : Upada Sastra.
- Koran Tempo. 10 Maret 2008. *Akibat Pasibikaran Bersalin Rupa*. Halaman 3, kolom 1.
- Mahagangga, I Gst. Ag. Oka. 2008. *"Premanisme dan Pariwisata"*. Jurnal Analisis Pariwisata. Fak. Pariwisata, Universitas Udayana. Denpasar.
- _____, Dkk. 2010. *"Premanisme, Pariwisata dan Media Massa"*. Jurnal Kepariwisata Indonesia. Puslit dan Pengembangan Kepariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. Jakarta
- _____, 2011. *Tantangan Keamanan Pariwisata Bali : Kajian Pemetaan Kriminalitas di Daerah Wisata Kuta*. Ed. I Nyoman Darma Putra dan I Gde Pitana. Pustaka Larasan. Denpasar.
- _____, 2012. *"Peran dan Kendala Pemulihan Pascabom (Suatu Kasus Disparda Prov. Bali)"*. Jurnal Analisis Pariwisata. Fak. Pariwisata, Universitas Udayana. Denpasar.
- _____, 2013. *"Reklamasi Teluk Benoa, Konyol"*. Harian Bali Post Nomor 313. Tahun ke 65, Rabu Pahing, 17 Juli 2013, Hal. 1.

Sanderson, Stephen K. 2000. *Sosiologi Makro*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Toawi, Darwis. 2001. *Dasar Pelayanan Pariwisata*. Materi Diklat Teknis Dasar Bidang Pariwisata. Denpasar : Pusdiklat Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan STP Nusa Dua Bali.

Abimanyu, Irjen. Bambang. "Narkoba Bidik Objek Wisata". www.seputarindonesia.com/ediscetak/content/view/491619.

Parikesit, Danang. "MTI: Kemacetan di Kawasan Wisata Bali Melebihi Jakarta". www.merdeka.com.

PENGELOLAAN POTENSI EKOWISATA DI DESA CAU BELAYU KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN

Ida Bagus Suryawan
inigusmail@yahoo.com
Dosen Fakultas Pariwisata Unud

Abstract

This research is motivated by the inequality of economic activity and development of a number of villages that were around the Tourism Attraction emerging. The development of tourism activities Sangeh only impact the development of economic activities in the Village Sangeh only and does not provide an optimal multiplier effect impacts to the surrounding region. With this research can be formulated in the identification of potential ecotourism activities, a management for ecotourism and the formulation of the potential of ecotourism management strategies will be developed.

In general, the implementation of research combining the basic principles of ecotourism are applied to the existing tourism potential. In the next section described the realization of the implementation of the ecotourism potential of the existing management plan for the general management plan or conservation areas. At this stage also assessed the realization of management activities to the achievement of stage management of ecotourism potential, namely: planning conservation areas and preliminary evaluation of the area, diagnostic area as a whole, data analysis and prepare a plan, the implementation of ecotourism management plan, and measure success. At the end of the mechanism formulated management strategies with SWOT analysis followed by analysis QSPM to formulate efforts - efforts to implement strategic priorities based on the assessment of a number of sources. In each stage of decision-making methods, valuation comparisons between variables using a paired comparison technique.

Based on this research, there is physical potential as Penet Riverflow, the condition of the cliffs surrounding the river Penet, traking gardens and traditional settlements of environmental conditions. The potential of the existing culture that is hanging there Titi Pura, Pura Dukuh Sari and Beji Panca Resi. Ecological potential that can be used that is the diversity of flora and fauna due to the heterogeneous conditions of the area and adjacent to Forest Pala as a habitat for monkeys. Based on the results of the analysis of potential ecotourism management strategies that will be done to apply the pattern of vertical integration. Where, the basic strategy is a management strategy that is more typical and more use of existing potentials and opportunities as technical guidance in the Desa Adat Cau Belayu, each functional strategy later reaffirmed divided into operational strategies in SO Strategies, WO Strategies, ST Strategies WT Strategies.

Keywords : *Potential of Tourism, Ecotourism, Strategy Management.*

I. PENDAHULUAN

Desa Adat Cau Belayu memiliki karakteristik wilayah (kondisi tebing, karakter lahan dan kegiatan sosial masyarakat) yang cenderung sama dengan objek dan daya tarik wisata yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu perlu dikembangkan kegiatan wisata di Desa Adat Cau Belayu dengan memanfaatkan karakter / potensi daerah yang ada. Konsep kegiatan wisata yang ditawarkan adalah ekowisata, dimana, ekowisata menawarkan konsep *low invest-high value* bagi sumberdaya dan lingkungan sekaligus menjadikannya sarana cukup ampuh bagi partisipasi masyarakat, karena seluruh aset produksi yang digunakan merupakan milik masyarakat lokal. Dengan penerapan konsep ekowisata diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat Desa Adat Cau Belayu . Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: mengidentifikasi potensi ekowisata di Desa Adat Cau Belayu, menyusun Model Pengelolaan Ekowisata di Desa Adat Cau Belayu, merumuskan strategi pengelolaan ekowisata di Desa Adat Cau Belayu.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian terapan (*applied research*) dengan tujuan tujuan akhir dari penelitian ini adalah pemecahan masalah yang dihadapi / yang ada di lokasi studi yaitu perumusan strategi pengelolaan potensi ekowisata. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman wawancara untuk mengetahui kondisi wilayah, persepsi dan aspirasi terkait upaya pengelolaan potensi ekowisata. Instrumen penelitian lainnya yang digunakan yaitu tabel *Attractive Score* yang berfungsi untuk memberikan tingkat ketertarikan strategi pengelolaan dalam proses analisis QSPM. Untuk menganalisa bagaimana pengelolaan potensi ekowisata eksisting, dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan produk rencana, juga diupayakan penilaian terhadap tahapan pengelolaan potensi ekowisata (Drumm, A dan Moe, A, 2002) yang terdiri atas : perencanaan wilayah konservasi dan evaluasi pendahuluan wilayah, diagnostik wilayah secara menyeluruh, analisis data dan menyiapkan rencana, implementasi rencana pengelolaan ekowisata, mengukur kesuksesan. Kelengkapan produk rencana yang harus tercapai terdiri atas rencana pengelolaan umum dan rencana daerah konservasi.

Setelah itu disusun strategi pengelolaan potensi ekowisata dengan menetapkan formulasi strategi yang terdiri dari 4 tahap pekerjaan yaitu identifikasi faktor internal dan eksternal, analisis matriks IFAS dan EFAS untuk mengetahui posisi usaha dan kesesuaian strategi fungsional, analisis SWOT dengan menggunakan matriks SWOT yang akan menghasilkan alternatif strategi induk, analisis QSPM yang akan merumuskan strategi prioritas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian ekowisata berakar dari pengertian *ecotourism*. Menurut wikipedia (2009), ekowisata adalah salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya, ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran dan pendidikan.

Berdasarkan analisis *The International Ecotourism Society* (2000) pertumbuhan pasar ekowisata berkisar antara 10-30 persen pertahun sedangkan pertumbuhan wisatawan secara keseluruhan hanya 4 persen. Tahun 1998 WTO memperkirakan

pertumbuhan ekowisata sekitar 20 persen. Di kawasan Asia Pasifik sendiri angka pertumbuhan tadi berkisar antara 10 - 25 persen pada pertengahan tahun 1990-an. Di Indonesia diperkirakan sekitar 25 persen wisman pada tahun 1996 merupakan ekowisatawan (*ecotourist*). Statistik ini menunjukkan bahwa pergeseran perilaku pasar wisata sedang berlangsung saat ini dan ekowisata diperkirakan akan menjadi pasar wisata yang sangat prospektif di masa depan.

Di samping itu ada beberapa kriteria lagi yang menjadi pertimbangan mereka untuk memilih produk - produk ekowisata (*The International Ecotourism Society, 2000*), yakni :

1. Aspek pendidikan dan informasi. Wisatawan biasanya mempelajari lebih dahulu latar belakang social dan budaya masyarakat di daerah tujuan sebelum mereka memilih daerah tujuan wisata itu. Lebih dari 50 persen wisatawan Amerika dan Inggris mengaku menikmati pengalaman yang lebih baik dalam perjalanan ketika mereka sebelumnya mempelajari kebiasaan - kebiasaan, budaya, lingkungan, dan geografi masyarakat di negara tujuan.
2. Aspek sosial budaya daerah tujuan wisata. Wisatawan menaruh perhatian besar pada budaya masyarakat di daerah tujuan wisata.
3. Aspek lingkungan. Seperti disebutkan di atas, aspek lingkungan yang alamiah pada produk wisata menjadi incaran sebagian besar wisatawan global, mulai dari Amerika Utara sampai Eropa.
4. Aspek estetika. Keindahan dan otensitas objek wisata merupakan kebutuhan yang elementer dalam berwisata. Konservasi DTW menjadi penting dalam ekowisata.
5. Aspek etika dan reputasi. Meskipun iklim, biaya dan daya tarik menjadi kriteria pilihan berwisata, namun wisatawan sangat peduli pada etika kebijakan dan pengelolaan lingkungan.

Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1995) dalam Husein, U (2005), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Secara umum strategi dikelompokan kedalam tiga kelompok / strata besar yaitu strategi generic, strategi induk dan strategi fungsional. Strategi generik (*generic strategy*) akan dijabarkan menjadi strategi utama/ induk (*grand strategy*). Strategi induk ini selanjutnya dijabarkan menjadi strategi fungsional perusahaan, yang sering disebut dengan strategi fungsional (Umar, 2005). Dalam penelitian ini metode dasar dari manajemen / pengelolaan ekowisata yang dikembangkan menggunakan siklus Deming atau PDCA (Deming, 1986). Dalam metode ini dijabarkan 4 langkah yang umum dilakukan dalam pengendalian kualitas, yaitu : (1) Plan (Perencanaan), (2) Do (Kerjakan), (3) Check (Cek), (4) Act (Tindakanjuti).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Desa Adat Cau Belayu

Desa Adat Cau Belayu terletak di wilayah Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Pola Guna Lahan yang terbentuk yaitu pola linier dengan ke dalaman grid.struktur pola guna lahan terbagi menjadi 4 (empat) zona yaitu zona permukiman, zona persawahan, zona tegalan dan zona tebing. Kondisi daerah yang terjal diakibatkan adanya tebing batu padas dengan kedalaman antara 30 - 130 meter

dari permukaan air Sungai Penet yang ada di dasar tebing. Pelayanan fasilitas umum yang ada di Desa Adat Cau Belayu tergolong baik. Masyarakat telah menggunakan dan memelihara fasilitas yang ada sehingga mampu digunakan dengan maksimal. Kelengkapan sarana transportasi di Desa Adat Cau Belayu telah mampu memenuhi kebutuhan layanan akan sarana transportasi. Kondisi prasarana jalan yang ada sebagian besar merupakan jalan aspal tetapi dengan kondisi rusak terutama pada jalur utama desa. Jumlah total warga Desa Adat Cau Belayu adalah 106 KK *Pengarep* atau 423 KK total yang terbagi menjadi 35 KK *pengarep* pada Banjar Puseh, 37 KK *pengarep* pada banjar Desa dan 34 KK *pengarep* pada Banjar Dalem. Persepsi masyarakat terhadap perkembangan kegiatan pariwisata bahwa perkembangan kegiatan pariwisata di Desa Adat Cau Belayu dirasakan mengalami perkembangan jika dilihat dari kedatangan wisatawan mancanegara yang melewati wilayah ini. Kondisi perkembangan kegiatan pariwisata dan banyaknya potensi sumber daya alam dan budaya yang ada dirasakan oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat menjadi sebuah tantangan dan modal dasar bagi pengembangan kegiatan pariwisata di daerah ini. Pengelolaan potensi ekowisata nantinya diharapkan akan bersinergi antara pihak desa adat dengan masyarakat pemilik lahan.

3.2 Potensi dan Kendala

Potensi ekowisata yang ada di Desa Adat Cau Belayu yaitu : potensi fisik (adanya tebing, aliran sungai dan pola perkampungan), potensi budaya (lokasi kegiatan upacara keagamaan, keberadaan Pura Titi Gantung dan Pura Dukuh Sulandri, potensi ekologis (tumbuhan liar dan jalur perlintasan monyet dari Hutan Sangeh). Kendala pengembangan potensi ekowisata yang dihadapi yaitu kendala fisik berupa kemungkinan longsor, kondisi jalan yang buruk, kondisi topografi pada daerah pinggir sungai dan kekeringan. Kendala SDM yang ada berupa kurangnya kompetensi dari masyarakat, tidak ada struktur organisasi dan waktu pelayanan wisata yang kurang dimiliki masyarakat. Kendala kebijakan yang terdiri atas kebijakan kawasan konservasi, kebijakan fungsi kawasan, kebijakan regulasi kelembagaan. Kendala motivasi berupa keinginan masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pertanian untuk kegiatan wisata. Kendala adat istiadat berupa pengambilan keputusan melalui paruman seluruh krama dan tidak adanya reward terhadap pengelolaan aset desa.

3.3 Pengelolaan Potensi Ekowisata

Penggambaran realisasi mekanisme pengelolaan mengacu kepada matrik pengelolaan yaitu realisasi tahapan perencanaan ekowisata dan penggambaran elemen kepariwisataan. Bilamana dilihat dari kondisi Desa Adat Cau Belayu pada kondisi eksisting, belum ada mekanisme pengelolaan potensi ekowisata yang dilakukan baik oleh desa dinas maupun oleh desa adat. Hingga kini, aparat Desa Adat Cau Belayu dan Desa Dinas Cau Belayu belum mengupayakan penyusunan rencana pengelolaan potensi ekowisata. Realisasi kegiatan hanya pada penyusunan program penanganan tebing pada daerah pinggiran Sungai Penet. Sedangkan ditingkat masyarakat, isu dan aspirasi terkait dengan pemanfaatan daerah tebing untuk pembangunan akomodasi wisata, mengintegrasikan kegiatan wisata dan penegasan pemanfaatan daerah untuk kegiatan wisata.

3.4 Strategi Pengelolaan

Formulasi strategi ini lebih kepada penjabaran faktor-faktor internal dan eksternal Desa Adat Cau Belayu yang akan dikembangkan kegiatan ekowisata. Faktor-faktor internal dilihat dari kekuatan dan kelemahan dari Desa Adat Cau Belayu sedangkan faktor eksternal lebih melihat kepada materi peluang dan ancaman yang ada dan berkembang seiring dengan pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekowisata yang ada. Tahapan analisis EFAS dan IFAS dimulai dengan penjabaran faktor internal dan eksternal yang ada di Desa Adat Cau Belayu. Setelah itu dirumuskan bobot masing-masing faktor dengan metode Perbandingan Berpasangan. Berdasarkan hasil perhitungan, besaran total nilai untuk faktor internal yaitu 3,366 yang masuk kategori tinggi. Sedangkan besaran faktor eksternal yaitu 3,095 yang juga masuk golongan tinggi. Berdasarkan Internal dan Eksternal Matriks, posisi kegiatan berada pada Zona I dimana dibutuhkan konsentrasi secara vertikal. Proses analisis QSPM dimulai dengan merumuskan sejauh mana besaran ketertarikan responden terhadap sejumlah strategi hasil rumusan analisis SWOT. Dari 7 (tujuh) orang responden yang dimintakan partisipasinya untuk memberikan nilai terhadap sejumlah strategi, diperoleh nilai rata-rata ketertarikan. Disamping nilai ketertarikan yang diperoleh dari responden, pada proses analisis ini juga digunakan bobot faktor internal dan eksternal pada analisis EFAS dan IFAS pada sub bab sebelumnya. Perkalian antara dua data ini kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh total *attractive score*. Jumlah dari total *attractive score* inilah yang kemudian dijumlahkan sehingga diperoleh gabungan total nilai pada setiap faktor pada tiap macam strategi yang akan dikembangkan. Strategi pengelolaan dibagi menjadi strategi fungsional Strategi SO, Strategi WO, Strategi ST dan Strategi WT. **Strategi SO** : Merumuskan biaya dasar kegiatan wisata termasuk penguasaan nilai partisipasi pemilik lahan, pemanfaatan SDM lokal sebagai *tour guide* dan posisi lain didalam rencana kegiatan wisata yang akan dilakukan, pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan wisata sebagai bentuk partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan rencana promosi dan pemberitaan mengenai produk ekowisata yang ada di Desa Adat Cau Belayu kepada semua pihak / target market yang akan disasar di Desa Adat Cau Belayu. **Strategi WO** : Pembentukan lembaga pengelola potensi ekowisata yang sah, penyusunan sistem perekrutan pekerja wisata pada periode tertentu sehingga dapat ditentukan pekerja yang bertugas / siaga untuk melayani wisatawan yang datang, peningkatan penggunaan media promosi yang bersifat global baik berupa internet dan telepon oleh pelaku pemasaran terhadap produk ekowisata di Desa Adat Cau Belayu, penyediaan papan informasi terutama pada jalur Denpasar - Bedugul - Singaraja yang disamping sebagai papan penunjuk arah sekaligus sebagai media promosi kegiatan wisata yang ditawarkan. **Strategi ST** : Pemanfaatan fasilitas yang ada di permukiman penduduk untuk melayani kebutuhan wisatawan baik untuk tempat makan siang, beristirahat sejenak, lokasi daya tarik wisata atau kegiatan lain, penyusunan program pengurangan pemanfaatan tenaga kerja luar secara bertahap sejalan dengan jalannya kegiatan wisata yang ada, pelatihan dan pengembangan kesepahaman terhadap potensi dan materi *guiding* yang akan diberikan kepada wisatawan agar tidak menyimpang, optimalisasi pelibatan masyarakat dalam pelayanan wisata utamanya pada tempat dan waktu tertentu yang berpotensi kerawanan bahaya / bencana. **Strategi WT** : Dibutuhkan pembangunan jaringan kerjasama dengan pelaku usaha wisata, perbaikan sejumlah fasilitas utamanya jalur wisata yang rusak atau kurang layak agar dapat dimanfaatkan dengan baik, memberikan kesempatan tenaga kerja dibidang wisata dari luar (yang dibawa oleh *tour operator*) pada tahap awal

sekaligus memberikan kesempatan praktek kerja lapangan bagi tenaga kerja wisata lokal yang sedang berlatih.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dalam studi ini telah digambarkan dan dibahas sejumlah hal mengenai pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekowisata yang ada. Sejumlah hal yang dapat disimpulkan yaitu : Potensi ekowisata yang ada di Desa Adat Cau Belayu dijabarkan menjadi sejumlah elemen yaitu : potensi fisik, Potensi budaya, Potensi ekologis, Potensi lainnya. Terkait dengan upaya pengelolaan potensi ekowisata di Desa Adat Cau Belayu, hingga akhir pelaksanaan penelitian belum ada rencana dan upaya untuk mengelola potensi ekowisata yang ada. Strategi pengelolaan potensi ekowisata dibagi menjadi strategi fungsional Strategi SO, Strategi WO, Strategi ST dan Strategi WT.

4.2 Saran

Sejumlah hal yang disarankan pada studi ini adalah : dibutuhkan pengenalan yang lebih luas dan terarah sehingga lebih banyak orang akan mengetahui mengenai penawaran produk ekowisata di daerah ini, dibutuhkan kerjasama dengan pihak pelaku pariwisata lain seperti tour operator dan pihak pengelola akomodasi wisata, dibutuhkan perhatian dari pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya untuk peningkatan kapasitas pelayanan bidang sarana dan prasarana utamanya infrastruktur kewilayahan. Perlu dilakukan studi perancangan yang lebih teknis utamanya terhadap pemanfaatan potensi dan penetapan produk ekowisata yang lebih menarik dan ergonomis sehingga aman dan nyaman untuk semua pelaku wisata.

KEPUSTAKAAN

- Drumm, A dan Moore, A, 2002. *Ecotourism Development - A Manual for Conservation Planners and Managers Volume I : An Introduction to Ecotourism Planning, Second Edition*. The Nature Conservancy. Arlington, Virginia, USA.
<http://id.wikipedia.org/wiki/Ekowisata> diunduh 21 desember 2009 pukul 16.48 wita.
- The International Ecotourism Society*. 2000. *Ecotourism Statistical Fact Sheet*, Nort Bennington, USA.
- Umar Husein. 2005. *Strategic Management in Action*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**POTENSI KEPARIWISATAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(Studi Kasus di Kawasan Pariwisata Komodo)**

I Putu Anom
iputuanom@yahoo.co.id
Dosen Fakultas Pariwisata Unud

Abstract

To diversity the tourist attraction in West Manggarai regency, especially in Komodo tourism resort as development to be nature and culture tourist attractions. According to the result of the research which Focus Group Discussions, observation, field research, literatures and documents data, and by using descriptive analysis. The result is that the tourist attractions in Komodo tourism resort are the Komodo Dragon, Batu Cermin Cave, Beach Resort, Melo Culture Village etc. The tourism will be exist when the west Manggarai regency plan the true komodo tourism resort, infrastructures, facilities of tourism industry (accommodations, restaurants, travel beaures, tourist transportation, tourist attractions), human resources and the optimal coordination among the government, tourism stakeholders and local communities.

Key words: The Diversity Tourist Attractions, Planning and Development Tourism.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan pariwisata adalah: i) mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional; ii) berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan sumber daya (pesona) alam lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat dan; iii) mengembangkan serta memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri (Depbudpar, 2000).

Undang-Undang RI. No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengamanatkan agar sumber daya dan modal kepariwisataan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Depbudpar, 2009).

Garis - Garis Besar Haluan Negara mengamanatkan bahwa pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata bertujuan meningkatkan penerimaan devisa, meningkatkan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja, memperkenalkan alam dan budaya nusantara serta mempererat pergaulan antar bangsa.

Adapun visi kepariwisataan Indonesia adalah "Pariwisata Menumbuhkembangkan Kesejahteraan dan Perdamaian". Visi ini mengandung pengertian : 1) pariwisata

menjadi andalan pembangunan nasional yang secara seimbang mempertimbangkan bidang ekonomi dan bidang - bidang lainnya, demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia; 2) Indonesia menjadi kawasan pariwisata dunia yang mengutamakan pembangunan pariwisata nusantara dan sekaligus sebagai tujuan wisatawan mancanegara (Depbudpar, 2000).

Sektor pariwisata merupakan sektor yang padat karya dan memiliki multiplier effect (efek ganda) yang cukup besar sehingga banyak meningkatkan sektor-sektor yang terkait yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Demikian pula menurut kajian bahwa mesin penggerak penyerapan tenaga kerja pada abad ke-19 adalah pertanian; pada abad ke -20 adalah industri manufacturing dan pada abad ke -21 adalah pariwisata (Dowid. J. Villiers 1999 dalam Salah wahab, 1999).

Pitana, Sirtha, Anom, *et.al*, (2005) dalam “ Hospitality Industry and Tourism Education (The Case of Indonesia) menyatakan “ *Tourism has been one of the biggest industries in the world, seen from various indicators, such as labor absorption, people movement, and income earned. For a number of countries and territories, tourism has been the biggest contributor in the formation of their gross domestics products*”.

Pada beberapa negara di dunia, industri pariwisata merupakan salah satu industri besar di dunia karena banyak menyerap tenaga kerja, peningkatan pendapatan bahkan memberikan kontribusi terbesar pada product domestic brutto suatu negara.

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) Koridor V, bersama-sama dengan Provinsi NTB dan Bali diharapkan bisa mengembangkan sektor pariwisata untuk mempercepat pembangunan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu perlu diketahui potensi kepariwisataan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dalam hal ini akan diuraikan potensi dan permasalahan kepariwisataan dikawasan Pariwisata Komodo yang menjadi andalan daya tarik wisata di Provinsi NTT.

II. PERMASALAHAN

1. Potensi apakah yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya kawasan Pariwisata Komodo untuk bisa dikembangkan kepariwisataan ?
2. Faktor-faktor penghambat/kendala apakah yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan kepariwisataan khususnya di kawasan Pariwisata Komodo ?

III. METODELOGI PENELITIAN

Data yang terkumpul dari penelitian yang meliputi : observasi ; dokumentasi dari Pemda Nusa Tenggara Timur dan khususnya Kabupaten Manggarai Barat ; literatur dan Focus Group Discussion (FGD) dengan stakeholders pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, tokoh-tokoh masyarakat khususnya pengelola objek dan daya tarik wisata, pengusaha biro perjalanan wisata, pengusaha perhotelan dan restoran, pegawai Kementerian Kehutanan yang membidangi pengelolaan hutan lindung kawasan komodo serta usaha wisata yang lain, para cendekiawan serta tokoh masyarakat. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif dan kajian pustaka.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Sarana dan Jasa Pariwisata

Wisatawan yang mengunjungi Daerah Tujuan Wisata (DTW) dengan berbagai tujuan perjalanannya antara lain : pesiar atau keperluan rekreasi, hiburan, kesehatan, studi, keagamaan, olah raga, hubungan dagang, sanak keluarga, handaitaulan, konferensi-konferensi, misi dan sebagainya yang walaupun hanya tinggal sementara di daerah yang dikunjunginya, namun kehadiran mereka membutuhkan berbagai macam fasilitas sarana/prasarana maupun jasa pariwisata berupa akomodasi, rumah makan/restoran, bar, jasa transportasi, biro perjalanan dan pemandu wisata, jasa konvensi, jasa atraksi wisata, yang tentunya harus tersedia serta mampu memenuhi kebutuhan wisatawan.

4.1.1 Sarana Pariwisata (Akomodasi, Bar, Rumah Makan/Restoran, Tempat Pertunjukan Atraksi Wisata dan Fasilitas MICE)

Propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 3 (tiga) pulau : Flores, Sumba dan sebagian pulau Timor dengan pulau-pulau kecil lainnya, merupakan destinasi wisata kepulauan dengan kawasan wisata Komodo dan pulau-pulau disekitarnya merupakan maskot pengembangan pariwisata NTT karena di pulau Komodo, pulau Rinca dan pulau Riung terdapat biawak raksasa komodo yang merupakan satu-satunya biawak raksasa terbesar yang masih hidup di habitatnya.

Kawasan pulau Komodo terletak di kabupaten Manggarai Barat yang merupakan kabupaten relatif baru sehingga perlu ditunjang dengan fasilitas kepariwisataan yang memadai. Di kabupaten Manggarai Barat terdapat 1 (satu) buah hotel bintang satu dan 22 (dua puluh dua) buah hotel melati dengan jumlah kamar sebanyak 279 buah (Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai barat, 2006), jumlah akomodasi ini sudah cukup memadai dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan ini serta telah tersedia beberapa rumah makan dan restoran. Penambahan jumlah hotel, rumah makan/restoran perlu dikaji lebih mendalam terutama lokasi pembangunannya agar sejak awal penataan fasilitas kepariwisataan sudah mengikuti aturan tata ruang wilayah.

4.1.2 Jasa Pariwisata (Transportasi, Biro Perjalanan dan Pemandu Wisata, Jasa Objek dan Atraksi Wisata, Jasa MICE dll)

Di Kabupaten Manggarai Barat telah terdapat 7 (tujuh) buah perusahaan Dive and Sail Shop yang berlokasi di Labuan Bajo; 2 (dua) buah usaha olah raga memancing; 16 (enam belas) buah usaha biro perjalanan wisata serta ditunjang fasilitas pelabuhan laut, maskapai penerbangan karena telah tersedia penerbangan langsung dari bandara/airport Ngurah Rai Bali ke bandara Labuan Bajo di kabupaten Manggarai Barat (Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai barat, 2006), sehingga memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mengunjungi Kawasan Wisata Komodo.

4.2 Faktor-Faktor Penghambat/Kendala Pembangunan Destinasi Wisata

1. Fasilitas akomodasi yang tersedia masih terbatas terutama klasifikasi hotel tergolong hotel melati dengan fasilitas dan pelayanan yang sederhana.
2. Fasilitas dan pelayanan rumah makan/restoran masih sederhana.
3. Transportasi laut/boat untuk fasilitas mengunjungi kawasan wisata komodo cukup baik namun kemampuan pemandu wisata masih terbatas terutama untuk memberikan informasi secara detail tentang kawasan wisata komodo.

4. Transportasi darat dan biro perjalanan wisata masih sederhana baik fasilitas maupun pelayanannya terutama kemampuan pemandu wisata untuk menjelaskan objek dan daya tarik wisata yang ada di Kawasan Pariwisata Komodo.
5. Karena NTT merupakan Provinsi kepulauan sehingga untuk mengunjungi objek dan daya tarik wisata yang terpecah di berbagai pulau yang ada membutuhkan sarana angkutan darat, laut dan udara dengan biaya yang cukup tinggi.
6. Fasilitas MICE belum tersedia yang memadai, hal ini sangat penting mendapat perhatian karena diperkirakan ada kemungkinan mengadakan konvensi terutama membahas masalah ekowisata yang terkait dengan kawasan wisata komodo.
7. Penataan daya tarik wisata disekitar kawasan komodo perlu dibenahi antara lain Goa Batu Cermin, Kawasan Pantai, Desa Melo yang memiliki daya tarik wisata budaya, dll.

4.3 Rencana Pengembangan Sarana Pariwisata

1. Penambahan jumlah akomodasi/hotel dan rumah makan/restoran perlu pengkajian mendalam baik dari sisi supply and demand maupun peningkatan fasilitas dan pelayanannya serta lokasi tempat usaha yang harus mengikuti rencana detail tata ruang kawasan.
2. Perlu penataan kawasan wisata komodo karena kawasan tersebut menjadi ikon Pariwisata NTT karena dikawasan tersebut khususnya di Pulau Komodo terdapat biawak raksasa yang masih hidup di habitatnya yang satu-satunya terdapat didunia.
3. Perlu pengembangan tempat atraksi pertunjukan wisata terutama pengkemasan pentas atraksi budaya beserta informasi alur cerita terutama pentas atraksi wisata yang unik yang terdapat di Nusa Tenggara Timur khususnya di kawasan Wisata Komodo.

4.4 Rencana Pengembangan Jasa Pariwisata

1. Perlu peningkatan usaha angkutan wisata/transportasi darat, laut dan udara mengingat Nusa Tenggara Timur sebagai daerah tujuan wisata kepulauan dengan objek dan daya tarik wisata yang beraneka ragam serta menyebar diberbagai daerah.
2. Perlu peningkatan fasilitas dan kualitas kinerja biro perjalanan wisata terutama pemandu wisata yang harus mampu memberikan informasi yang akurat perihal keberadaan objek dan daya tarik wisata di Nusa Tenggara Timur khususnya di kawasan wisata komodo.
3. Daerah kawasan wisata komodo yang berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat Pulau Flores merupakan kabupaten yang relatif baru sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi harus memprioritaskan pembangunan kabupaten tersebut sehingga daerah kawasan wisata pulau Komodo yang menjadi maskot pengembangan wisata di Nusa Tenggara Timur semakin banyak dikunjungi wisatawan apalagi bisa ditunjang dengan ketersediaan instansi pemerintah (Imigrasi, Bea Cukai dan Karantina).
4. Dari hasil diskusi dengan stakeholders pariwisata beserta instansi terkait di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 20 Oktober 2006 terungkap bahwa diperlukan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pariwisata, Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pariwisata di Nusa Tenggara Timur khususnya di Kabupaten Manggarai Barat.

5. Perlu pembentukan organisasi/asosiasi kepariwisataan serta tourism board untuk mengoptimalkan koordinasi pengembangan kepariwisataan.

4.5 Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pariwisata merupakan industri jasa (services industry) ; industri kemarah-tamahan (hospitality industry) dan industri citra/kesan (image industry), maka peranan kualitas sumber daya manusia sangat penting agar mampu memberikan kepuasan kepada wisatawan baik dalam bentuk pelayanan pada industri pariwisata maupun sikap masyarakat lokal (host) yang ada di Daerah Tujuan Wisata (DTW).

Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki objek wisata berupa Eco and Nature Tourism khususnya kawasan Pulau Komodo yang berlokasi di Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan kabupaten yang relatif baru sehingga prasarana dan sarana penunjang kepariwisataan masih terbatas, termasuk keterbatasan kursus dan lembaga pendidikan dan latihan kepariwisataan, yang dengan sendirinya kualitas pelayanan yang diberikan kepada wisatawan masih kurang, karena SDM yang bekerja pada industri pariwisata masih banyak yang belum berpendidikan pariwisata. Karena mereka sebagian besar bekerja berdasarkan pengalaman yang sederhana. Untuk itu diperlukan kepedulian semua stakeholders pariwisata dan kebijakan pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas SDM pariwisata agar bisa eksis bekerja pada industri pariwisata (akomodasi, rumah makan/restoran, biro perjalanan wisata) termasuk kualitas pemandu wisata yang mampu memberikan informasi kepariwisataan terutama dengan adanya potensi wisata minat khusus di kawasan pulau Komodo maupun pada objek dan daya tarik wisata yang lain yang ada di Nusa Tenggara Timur.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Penataan daya tarik wisata di kawasan wisata komodo belum memenuhi standar untuk menjadi kawasan pariwisata internasional.
2. Prasarana dan sarana pariwisata juga masih belum memadai untuk dijadikan kawasan pariwisata internasional.
3. Sumber daya manusia yang bergerak langsung di sektor pariwisata termasuk sumber daya manusia pengambil kebijakan publik di sektor pariwisata belum memadai.
4. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat khususnya pengelola taman nasional komodo dengan pemerintah daerah Provinsi NTT dan Pemda Kabupaten Manggarai Barat serta masyarakat setempat.

5.2 Saran

1. Penataan dan penyusunan paket wisata di kawasan komodo perlu direncanakan dengan baik agar mampu meningkatkan diversifikasi daya tarik wisata.
2. Pembenahan dan penataan prasarana dan sarana kepariwisataan harus ditingkatkan bekerjasama dengan investor serta melibatkan masyarakat lokal dengan difasilitasi pemerintah.
3. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan pariwisata.
4. Diperlukan koordinasi yang efektif antara pengelola taman nasional komodo dengan Pemda NTT khususnya dengan Pemda Kabupaten Manggarai Barat serta

masyarakat lokal agar terwujud penataan kawasan pariwisata komodo yang bertaraf internasional yang diharapkan bisa menjadi “the seven wonders” dunia.

KEPUSTAKAAN

- Anom, I Putu, 1999, *Pemberdayaan The Input of Tourism Resources yang Berdimensi Kerakyatan Menuju Pariwisata Berkelanjutan*, Analisis Pariwisata Vol 2 No. 2, PS. Pariwisata Unud, Denpasar.
- _____. 2004, *Pendidikan Pariwisata di Era Globalisasi*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Akpar Kupang.
- _____. 2005 *Membangun Birokrasi Pemerintah yang Profesional Berbasis Kinerja untuk Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Kabupaten Badung*. Makalah Seminar Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan VIII BAKN, Hari Kamis, 3 Februari 2005 Denpasar.
- Anom, I Putu, Michael Hitchcock and Sunarta I Nyoman. 2005. *Pro Poor Tourism: Tanjung Benoa Focus Group*. Paper Presented at “ 3rd Trans National Patners Meeting of the EU-ASEAN Project Building Research Capacity Pro Poor Tourism “Organized by National University of Laos Faculty of Forestry Department of Forest Management. April 4-7, 2005 in Vientiane Laos.
- Anonimus. 2000. *Panduan Operasional PK PK (Pengembangan Kemampuan Pemerintah Kabupaten / Kota)*, Kerjasama DEPDIAGRI dengan BAPPENAS.
- _____. *Undang-undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Bab VIII*.
- _____. 2006. *Potensi Objek dan Daya Tarik Wisata Kabupaten Manggarai Barat, Disnas Perhubungan dan Pariwisata*.
- _____. 2006. *Potensi Kepariwisata Nusa Tenggara Timur*, Dinas Pariwisata NTT.
, *Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*, Depbudpar R.I.
- Ardika, I Gde. 2001. *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Yang Berbasis Kerakyatan*, Makalah Seminar Nasional *The Last or The Lost Paradise*.
- Bawa, I Wayan dkk, 2001, *Studi Keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) Bali di Bidang Pariwisata*, Unud - STP Bali - BTDC, Denpasar.
- Colman, D And Nixon, F. 1978. *Economic of Change in Less Development Countries*, Second editor University of Manchester.
- Cooper, Chris and Jackson, Stephen. 1997. *Distination Life Cycle: The Isle of Man Case Study*, (ed Lesley France) dalam *The Eartscan in Sustainable Tourism*, MK : Easthscan Publication Heunited.
- Inskeep, Edward, 1991. *Tourism Planning and Integrated and Sustainable Development Approach*, Van Non Strand Reinhold, New York.
- Mathieson, A, and Wall. G, 1990. *Tourism, Economic, Physical and Social Impact*.
- Nelson, J. G Butler, R. Wall. G, 1993. *Tourism and Sustainable Development, Monitoring, Planning, Managing*, University of Waterloo : Heritage Resources Culture
- Parining, Nyoman dkk. 2001. *Studi Tentang Implementasi Konsep Pariwisata Kerakyatan*, Unud - Bappeda Propinsi Bali, Denpasar.
- Peace, Douglas G. 1991. *Tourism Development*, John Walley & Sons, Inc, New York.

- Pitana, I Gede dkk. 2000. *Daya Dukung Bali Dalam Pariwisata (Kajian dari Aspek Lingkungan dan Sosial Budaya)*, Unud - Bappeda Propinsi Bali, Denpasar.
- Pitana I Gede, Sirtha I Nyoman, Anom I Putu, Wita I Wayan, Wirawan I Gede Putu. 2005. *Hospitality Industry and Tourism education (The Case of Indonesia)*. Paper presented at the 2005 ASAIHL Seminar on “ Hospitality and Tourism Education”, Phuket, Thailand, October 16-19, 2005, organized by Association of South East Asian institutions of Higher Learning (ASAIHL) and Prince of Songkla University.
- Puja Astawa, IB, dkk. 2000. *Pola Pengembangan Pariwisata Terpadu Bertumpu Pada Model Pemeberdayaan Masyarakat di Wilayah Bali Tengah*, Puslit teknologi dan Kesenian Unud, Denpasar.
- Wahab, Salah. 1999. *Manajemen Kepariwisataaan*, Jakarta.